

**PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG
DI KALANGAN MASYARAKAT TALOHEN HULU
KELURAHAN AMPAH KOTA
KABUPATEN BARITO TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh

SRI DEWI NUR AZIZAH
NIM. 1202120192

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH
TAHUN AJARAN 1438 H/ 2016 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG DI
KALANGAN MASYARAKAT TALOHEN HULU
KELURAHAN AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO
TIMUR
NAMA : SRI DEWI NUR AZIZAH
NIM : 120 212 0192
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARI'AH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2016

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002

Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI
NIP. 19820707 200604 1 003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam

Ketua Jurusan,
Ekonomi Islam

Dra. Hj. Rahmaniar, M. SI
NIP. 19540631 198103 2 001

Jelita, M. SI
NIP. 19830124 200912 2 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Sri Dewi Nur Azizah

Palangka Raya, Oktober 2016

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari:

Nama : **SRI DEWI NUR AZIZAH**

Nim : **120 212 0192**

Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG
PIUTANG DI KALANGAN MASYARAKAT
TALOHEN HULU KELURAHAN AMPAH KOTA
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002

Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI
NIP. 19820707 200604 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG DI KALANGAN MASYARAKAT TALOHEN HULU KELURAHAN AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR”, Oleh Sri dewi nur azizah, NIM 120 212 0192 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 07 November 2016

Palangka Raya, 07 November 2016

Tim Penguji:

1. **Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI** (.....)
Ketua Sidang/ Anggota
2. **Dr. Sadiani, MH** (.....)
Penguji I/ Anggota
3. **Dr. Syarifuddin, M. Ag** (.....)
Penguji II/ Anggota
4. **Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI** (.....)
Sekretaris/ Anggota

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam,

Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
NIP. 19540631 198103 2 001

PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG DI KALANGAN MASYARAKAT TALOHEN HULU KELURAHAN AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR

ABSTRAK

Oleh : Sri Dewi Nur Azizah

Hutang Piutang merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang di perbolehkan dalam Islam. Kebanyakan masyarakat salah memilih tempat peminjaman dan ketika terjadi *wanprestasi* menyebabkan sengketa kerap kali terjadi tindakan kriminalitas dan tidak bermoral terhadap pihak yang meminjam. Berbeda halnya dengan sengketa hutang piutang yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana latar belakang terjadinya hutang piutang di kalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur? 2. Bagaimana bentuk akad hutang piutang itu terjadi di kalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur ? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa hutang piutang ketika terjadi wanprestasi di kalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur ? Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui latar belakang terjadinya utang piutang, bentuk akad utang piutang dan penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi di kalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, metode yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif deskriptif*. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yakni melakukan observasi langsung, wawancara, dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting. Selain hal tersebut juga mengkaji buku-buku Islam yang berkaitan dengan utang piutang yang dipertajam dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Adapun subjek terdiri dari 7 orang (4 orang dari pihak debitur dan 3 orang dari pihak kreditur).

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, latar belakang terjadinya utang piutang adalah karena Profesi kebanyakan petani karet yang penghasilan tidak menetap dalam keadaan kurang menguntungkan tidak cukup memenuhi keperluan lain menyebabkan berutang dengan motif untuk kebutuhan yang mendadak (keperluan transportasi anak sekolah dan modal usaha). Hal demikian merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan. Kemudian Transaksi terjadi dirumah kreditur dengan mematuhi syarat dan aturan yang berlaku dari kreditur, bentuk akad adalah *Qardhul* hasan. Sengketa yang berjumlah 2 orang akhirnya dapat terselesaikan dengan cara musyawarah berprinsip kekeluargaan dikenal dengan istilah unik yaitu *Adat badamai* masyarakat banjar walaupun sebelumnya terjadi konflik yang berkepanjangan antara pihak yang berjanji (akad).

Kata Kunci: Hutang Piutang, Wanprestasi, Sengketa, Musyawarah.

**DISPUTE SETTLEMENT ACCOUNTS PAYABLE
AMONG COMMUNITY OF TALOHEN HULU
VILLAGE OF AMPAH CITY DISTRICT OF EAST BARITO**

ABSTRACT

By : Sri Dewi Nur Azizah

Debt is one of the activities *muamalah* are allowed in Islam. Most people choose the wrong place when the event of default of borrowing and cause disputes often occur crime and immoral actions against the borrower. Unlike the case with accounts payable disputes that occur in society Talohen Hulu. A number of problem in this research are: 1. How the background of the debts in among community of Talohen Hulu village of Ampah City district of East Barito ? 2. How the form of contract debts in among community of Talohen Hulu village of Ampah City district of East Barito? 3. How the settlement of disputes when the event of default (*wanprestasi*) in among community of Talohen Hulu village of Ampah City district of East Barito? The purpose of this study was to determine the background of the debts, the form of contract debts and settlement of disputes when the event of default (*wanprestasi*) in among community of Talohen Hulu village of Ampah City district of East Barito.

This study uses field research, the method used is descriptive qualitative approach. This research was conducted by collecting data that is direct observation, interviews, and gathering important documents. In addition it also examines Islamic books relating to debts that have been exacerbated by the arguments of the Qur'an and *Hadits*. The subjects consisted of 7 people (4 people of the debtor and the third person of the creditor).

The results of this study show that, the background of the debts is because

Profession mostly rubber farmers whose income does not settle in less favorable circumstances did not quite meet other needs caused owes the motive for the sudden need (Purposes of transportation schoolchildren and venture capital). It thus is reasonable and permissible. Then the transaction occurred at home lenders to comply with the terms and the applicable rules of the creditors, the form of contract is *Qardhul hasan*. Disputes which amounted to 2 people can finally be resolved by way of principled deliberation kinship known as its unique Indigenous community *badamai banjar* previously occurred despite the ongoing conflict between the parties promise (contract).

Keywords: Debt, Default, Dispute, Deliberation.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG DI KALANGAN MASYARAKAT TALOHEN HULU KELURAHAN AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR.”** Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH selaku Rektor IAIN Palangka Raya, semoga Allah membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu Agama khususnya dan Institut ini pada umumnya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M. SI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Jelita, M. SI, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Islam IAIN Palangka Raya.

4. Bapak Zainal Arifin, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pembelajaran, pengarahan dan motivasi yang berguna bagi penulis.
5. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag, selaku pembimbing I, Dr. Ahmad Dakhoir, M. HI, selaku pembimbing II, Semoga Allah membalas segala kemuliaan hati mereka yang begitu sabar dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Penghormatan dan penghargaan kepada ayah dan ibunda penulis yang selalu memberikan semangat serta tiada henti-hentinya mendoakan yang terbaik.
7. Dosen-dosen IAIN yang tidak mungkin penulis sebut satu per satu yang telah meluangkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat Jurusan Ekonomi Islam angkatan 2012, kelas A dan B yang selalu menemani dalam suka dan duka, serta teman-teman mahasiswa lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, November, 2016

Penulis,

SRI DEWI NUR AZIZAH
NIM. 120 212 0192

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG DI KALANGAN MASYARAKAT TALOHEN HULU KELURAHAN AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2016
Yang Membuat Pernyataan,

SRI DEWI NUR AZIZAH
NIM. 120 212 0192

Motto

[illegible]

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

(Q.8 Ali-Imran(3):159)

Persembahan

- ❖ *Ku persembahkan karya kecil ini kepada Mama dan bapak terkasih dan tersayang yang telah mendidik, membesarkanku dengan penuh kasih sayang.*
- ❖ *Adik-adikku yang tercinta dan seluruh keluarga yang telah membantu dan memberikan ku semangat.*
- ❖ *Dosen-dosen kebanggaanku yang telah memberikan waktu, bimbingan, ilmu dan pengetahuan yang tidak bisa terhitung berapa banyaknya serta seluruh staf febi yang telah membantu dalam penyelesaian karya kecil ini.*
- ❖ *Semua guru-guru yang telah sabar mengajariku semasa sekolah.*
- ❖ *Serta untuk sahabat-sahabat seperjuangan sealmamater FSY A, FSY B, AHS, JFS, PAI dan yang telah memberikan inspirasi juga motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini Serta membuatku senang, dan bahagia selama aku kuliah.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fath}ah	A	A
---	Kasroh	I	I
---	D{hommah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

ذُكِرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
---	Fath}ah dan ya	Ai	a dan i
---	Fath}ah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ--ا- اِ--ا-	Fath}ah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ--ي- اِي--ي-	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ--و- اُو--و-	D{hommah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta Marbut}ah

Transliterasi untuk *ta marbut}ah* ada dua, yaitu:

1. Ta Marbut}ah hidup

Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}amah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbut}ah mati

Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raud}ah al-at}fāl
raud}atul-at}fāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah
al-Madīnatul-Munawwarah

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā	نَزَّلَ : nazzala
الْبِرَّ : al-birr	الْحَجُّ : al-h}ajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

1.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

G. *Hamzah* (ء)

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* (ء) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* (ء) itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal:

أَمْرٌ : umirtu

أَكَلَ : akala

Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuẓūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

Hamzah di akhir:

سَيِّءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

· Fa aufūl-kaila wal-mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muh}ammadun illā rasūl

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramad}āna al-laẓī unzila fīhi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ حَوْفَتُح : Nas }rum minallāhi wa fath }un

قَرِيبٌ qarīb

لِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī'an

· Lillāhi amru jamī'an

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Persetujuan	ii
Nota dinas	iii
Pengesahan	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata pengantar	vii
Pernyataan orisinalitas	viii
<i>Motto</i>	ix
Persembahan	x
Pedoman transliterasi	xi
Daftar Isi.....	xx
Daftar Tabel	xxiv
Daftar Singkatan.....	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Batasan Masalah	10
E. Kegunaan Penulisan	10
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Deskripsi Teoritik Dan Konseptual	17
1. Konsep Hutang Piutang	17
a). Pengertian Hutang Piutang	17

b). Dasar Hukum Hutang Piutang.....	20
c). Rukun dan Syarat Hutang Piutang.....	22
d). Tempat Pengembalian Qardh (Utang Piutang)	24
e). Harta yang boleh dihutangkan	24
f). Beberapa Hukum Berkaitan Dengan hutang piutang.....	25
g). Melebihi Pembayaran	26
h). Tata Krama Berutang	27
2. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	28
a). Musyawarah.....	28
b). Mediasi	30
c). Tahkim (Arbitrase)	31
d). Wilayah al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman)	32
3. Konsep <i>Adat Badamai</i> Masyarakat Banjar	35
a). Pengertian <i>Adat Badamai</i>	35
b). <i>Adat Badamai</i> dalam UU Sultan Adam	37
c). <i>Adat Badamai</i> Masyarakat Banjar	38
4. Teori Hukum Perikatan.....	41
a). Pengertian Hukum Perikatan	41
b). Macam-macam Hukum Perikatan Syariah.....	42
c). Asas-asas Perikatan dalam Islam.....	44
d). Prestasi, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa	49
5. Teori Perlindungan Konsumen	51
a). Pengertian Perlindungan Konsume	51
b). Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	52
C. Kerangka Berpikir	55
 BAB III METODE PENELITIAN	 57
A. Waktu Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	57
C. Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
D. Penentuan Subyek dan Obyek	58

E. Jenis dan Sumber Data	59
F. Teknik Pengumpulan Data	60
G. Pengabsahan Data.....	62
H. Teknik Analisis Data	63
 BAB IV PEMAPARAN DATA	65
A. Selayang Pandang Kabupaten Barito Timur	65
B. Lingkungan Alam Lokasi Penelitian	70
C. Gambaran Tentang Subjek Penelitian	71
D. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu	71
1. Latar Belakang Terjadinya Hutang Piutang di Masyarakat Talohen Hulu	71
2. Bentuk Akad Hutang Piutang di Masyarakat Talohen Hulu ..	78
3. Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Masyarakat Talohen Hulu	85
 BAB V ANALISIS DATA.....	92
A. Latar Belakang Terjadinya Hutang Piutang di Masyarakat Talohen Hulu	92
1. Potret Ekonomi Masyarakat Talohen Hulu	92
2. Motif Hutang Piutang Masyarakat Talohen Hulu	94
B. Bentuk Akad Hutang Piutang	107
1. Transaksi Hutang Piutang Masyarakat Talohen Hulu	107
2. Bentuk Akad Hutang Piutang di Masyarakat Talohen Hulu Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam	108
C. Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang.....	127
1. Jumlah Sengketa Hutang Piutang di Masyarakat Talohen Hulu	127
2. Potensi Konflik dalam Transaksi Hutang Piutang di Masyarakat Talohen Hulu	129

3. Pola Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Masyarakat Talohen Hulu Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa.....	130
4. Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Masyarakat Talohen Hulu dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Nasabah	138

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	141
B. Saran	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PENELITIAN TERDAHULU	16
Tabel 2.	SUBJEK PENELITIAN.....	71

DAFTAR SINGKATAN

Hal = Halaman

QS = Qur'an Surah

SWT = Subhanallahuwata'ala

SAW = Salallahu'alaihiwasallam

R A = Radhiallahu'anhu

HR = Hadis Riwayat

BMT = Baitul Maal Wattamwil

KK = Kepala Keluarga

APS = Alternatif Penyelesaian Sengketa

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia

UUD = Undang-undang Dasar

UUPK = Undang-Undang Perlindungan Konsumen

DPRD = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

RT = Rukun Tetangga

BAB I

PENDAHULUAN

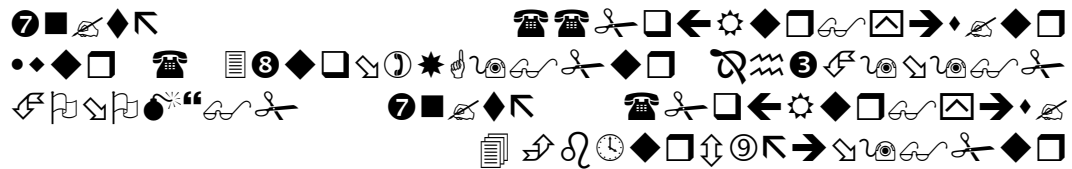
A. Latar Belakang Penelitian

Mu'āmalah dalam arti luas dapat didefinisikan yaitu aturan-aturan (Hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti sempit yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹ Sudah menjadi tabiat manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari harus bekerja dan berusaha. Namun setiap manusia pastilah mempunyai keterbatasan dalam hal demikian. Tidak serta merta manusia terus-terusan dapat memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal materi secara maksimal, dari hal demikian terbentuklah suatu masyarakat yang memiliki kekurangan dalam hartanya namun, ada juga pihak yang memiliki kelebihan dalam hartanya.

Bertolak dari kondisi demikian disinilah posisi penting dalam kehidupan bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus mempunyai sikap saling tolong menolong antar sesama, apalagi masyarakat yang berada di pedesaan yang secara sosiologis mempunyai ikatan sosial yang sangat kuat dalam hal gotong-royong maupun tolong-menolong, salah satunya dalam hal transaksi hutang-piutang. Hutang Piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian ia

¹ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 03.

akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya mengutangkan uang Rp 2.000,00, akan dibayar Rp 2.000,00 pula.² Firman Allah SWT :



Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"(Q.S al-Maidah (5):2).³

Tafsir Al-Qurthubi yang ditulis oleh Syaikh Imam Al-Qurthubi, maksud dari ayat tersebut adalah perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa ini merupakan perintah bagi seluruh manusia. Yakni, hendaklah sebagian kalian menolong sebagian yang lain. Berusahalah untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengaplikasikannya. Jauhilah apa yang Allah larang dan hindarilah. Allah juga mengeluarkan larangan-Nya, dimana Allah berfirman: "Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."Ini merupakan ketentuan yang diperuntukan bagi dosa dan ukhwan, yaitu menzalimi manusia.⁴

Menurut peneliti: Ayat tersebut sudah jelas bahwa setiap manusia harus mempunyai sikap tolong menolong terhadap sesama dalam hal apapun salah satunya adalah dengan memberikan pinjaman atau hutang kepada pihak yang membutuhkan selama hal tersebut mampu untuk dilakukan. Namun bukan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran yaitu dalam halnya hutang yang di

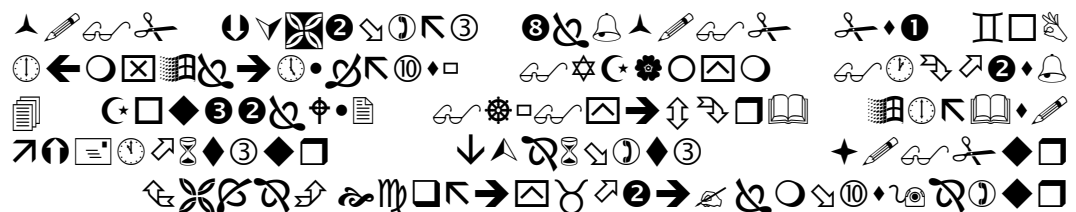
² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. XXIX, Bandung: Pt Sinar Baru Algesindo, 2006, hal. 306.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Pt Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994, hal. 157.

⁴ Syaikh Imam Al-Quthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 115.

berikan sebagai jalan untuk memperoleh kepuasan individual atau meraup keuntungan tanpa memperdulikan kondisi orang yang dipinjamkan.

Hutang piutang pada dasarnya memang diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.⁵ Adapun dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan disyariatkannya hutang piutang ialah seperti yang terdapat didalam QS. Al-Baqarah (2) : 245 :



Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."⁶

Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* yang ditulis oleh Sayyid Quthb maksud dari ayat tersebut adalah apabila mati dan hidup itu ada ditangan Allah dan kehidupan bagi seseorang itu tidak akan lenyap karena perang apabila Allah menakdirkannya masih tetap ada, maka harta pun demikian. Dia tidak akan lenyap karena diinfakkan. Infak adalah pinjaman yang baik kepada Allah. Harta itu tersimpan disisi-Nya, Dia melipatgandakannya dengan lipat ganda yang banyak. Dia melipatgandakannya di dunia berupa kekayaan, berkah, kebahagiaan, dan

⁵ Abufawaz, *Majalah Pengusaha Muslim*,
[http://www. Alquran sunnah.com/artikel/kategori/muamalah/787-adab-hutang piutang. html](http://www.Alquran_sunnah.com/artikel/kategori/muamalah/787-adab-hutang_piutang.html),
 Diakses pada tanggal 11 oktober 2015.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,...hal. 60.

kegembiraan. Dia juga melipatgandakannya di akhirat berupa nikmat, kesenangan, keridhaan, dan kedekatan kepada Allah. Kembalinya urusan tentang kaya dan miskin adalah kepada Allah, bukan kepada kerasukan dan kebakhilan. Bukan pula pada pengorbanan dan infak, Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Pada akhirnya kembalinya segala sesuatu adalah kepada Allah. Di mana saja harta dan manusia itu sendiri berada, semuanya akan kembali kepada Allah, Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Oleh karena itu, tidak perlu takut kepada mati dan kemiskinan, karena tidak ada yang dapat lolos dari kembali kepada Allah. Karena itu, hendaklah orang-orang mukmin berjihad di jalan Allah, mempertaruhkan nyawa dan harta. Hendaklah mereka yakin bahwa napasnya sudah dihitung dan rezekinya sudah ditentukan. Di antara hal yang amat baik baginya ialah hidup dengan tegar, merdeka, berani, dan terhormat. Sesudah itu, mereka pasti akan dikembalikan kepada Allah.⁷

Menurut peneliti: Apabila seseorang meminjamkan atau menginfakkan hartanya dengan baik tidak megharapkan imbalan apapun karena ketulusan dari dalam diri untuk membantu orang lain yang berada dalam kesulitan atau membutuhkan bantuan dan murni semata-mata karena Allah, maka Allah akan melapangkan dan melipatgandakannya rezeki yang tidak hanya di dunia namun juga di akhirat.

Mempiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya. Sabda Rasulullah SAW:

⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Cet.VIII, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal. 315.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ
 قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذُنَانَ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ
 فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَثَ
 أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عُتْبَةَ
 هَلُمِّي تِلْكَ الْخَرِيطَةَ الْمَخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا
 لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى
 مَا فَعَلْتَ بِي قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ
 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا
 قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Alqamah pun membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Alqamah datang kembali kepadanya dan berkata, Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktu yang telah engkau berikan kepadaku dulu. Sulaiman menjawab, "Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu." Ia pun datang dengan membawa kantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata, "Demi Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Alqamah berkata, Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" ia menjawab, Karena sesuatu yang aku dengar darimu." Ia bertanya, "Apa yang kamu dengar dariku?" ia menjawab, "Aku mendengarmu menyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku." (H.R. Ibnu Majah).⁸

⁸ Lidwa Pustaka-I software, Kitab 9 imam Bab hukum-hukum (memberi pinjaman) No 2421.

Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain sebanyak dua kali pahalanya adalah seperti orang yang bersedekah.

Akad hutang piutang memang telah diperbolehkan dalam Islam namun banyak sekali masyarakat yang salah dalam memilih tempat meminjam atau tempat berutang karena ingin yang cepat, simpel dan praktis yang tidak berpikir panjang dampak kedepannya. Banyak masyarakat yang meminjam uang kepada pihak yang suka membungakan uang atau yang sering disebut sebagai rentenir yang akibatnya menyebabkan banyak masalah. Rentenir awalnya datang sebagai dewa penolong ramah, berpenampilan empatik terhadap calon peminjamnya namun pada akhirnya kerap sekali mencekik atau menjerat para nasabah yang meminjam uang kepadanya. Memang melakukan pinjaman kepada rentenir itu persyaratannya lebih mudah, cepat, tanpa menggunakan jaminan dan tidak ada pembatasan waktu berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank, namun risikonya juga lebih berat dari pada meminjam di sebuah lembaga yang resmi. Banyak sekali tindakan kriminalitas atau kasus kekerasan oleh pihak rentenir karena masalah hutang bahkan menyebabkan pada kematian contohnya salah satu kasus yang terjadi Pada Ibu Nensi Pupilawati Ibu tiga anak ini tewas dianiaya rentenir akibat belum bisa melunasi utangnya, Ini hanya satu dari sekian banyak peristiwa arogan dan tindakan kriminal rentenir yang terekspose media.⁹ Bahkan banyak dari pihak peminjam yang mau melakukan apapun untuk

⁹ Panjimas, *Biadab rentenir bunuh ibu di bekasi saat tagih hutangrp 300 ribu*, <http://panjimas.com/news/2015/09/02/biadab-rentenir-bunuh-ibu-di-bekasi-saat-tagih-hutang-rp-300-ribu/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2016.

pihak rentenir atau lintah darat tersebut karena takut ancaman darinya hal demikian berawal dari tidak dapatnya membayar hutang dikarenakan bunga yang semakin meningkat dan bertambah.

Praktik rentenir bukan hanya dapat merugikan warga secara individu namun juga merugikan negara karena warga masyarakat lebih banyak memilih melakukan peminjaman kepada pihak rentenir. Akibatnya aksi rentenir tersebut cenderung menjadi penghalang untuk mendapatkan akses bank secara langsung. Padahal rentenir atau pihak pemodal juga berkuasa terhadap penindasan rakyat kecil. Masyarakat Indonesia sudah sangat akrab dengan istilah rentenir atau juga biasa disebut sebagai lintah darat. Biasanya rentenir gencar memberikan promosi “pinjaman tunai 1 jam cair” yang dewasa ini banyak kita jumpai kata-kata itu baik selebaran-selebaran, brosur, maupun promosi lewat media online. Faktanya, rentenir ternyata masih banyak juga diminati oleh masyarakat Indonesia dan hal itu sudah membudaya, meskipun hal ini nantinya akan sangat merugikan baik bagi negara maupun masyarakat itu sendiri.¹⁰

Memang praktik rentenir sudah terjadi dimana-mana dengan tindakan yang tidak manusiawi namun berbeda halnya dengan apa yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota dalam perjanjian hutang piutang. Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur adalah warganya yang terdiri dari 42 RT dari Kelurahan Ampah kota yang salah satunya adalah RT 28 Talohen Hulu yang terdiri dari 128 KK dan 450 Warga dan

¹⁰ Reza Karunia, *Mewaspada Lintah Darat dan Cara Pelaporan Rentenir* – Cermati, <https://www.cermati.com/artikel/mewaspada-lintah-darat-dan-cara-pelaporan-rentenir>, diakses pada tanggal 13 Juni 2016.

berprofesi sebagai petani dan juga pedagang.¹¹ Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan wawancara sekilas dengan para pemodal (kreditur) dan juga peminjam (debitur) bahwa acapkali praktik utang piutang adanya perbuatan batil. Terlihat dari persentase yang ditetapkan maupun keuntungan yang diperjanjikan. Prosedur peminjaman adalah apabila pihak debitur memerlukan uang, ia harus mendatangi ke rumah pihak kreditur dengan mengatakan keperluannya, pihak kreditur akan memenuhi keinginan dari peminjam namun ia harus mematuhi aturan yang dibuat atau diperjanjikan diawal dan pihak kreditur juga setiap minggu atau bulannya mendatangi rumah-rumah peminjam untuk menagih pembayaran angsuran dan pokok pinjaman.

Adapun kisaran hutang piutang yang dipinjamkan dari pihak pemodal dari kisaran Rp 1.000.000-20.000.000 nominal tersebut cukup terbilang besar dan kepentingan uang yang dipinjam oleh pihak debitur adalah untuk keperluan transportasi anak sekolah dan modal usaha. Suatu ketika ada dari beberapa pihak debitur melakukan *wanprestasi* tidak terbayarnya angsuran persentase maupun keuntungan yang telah diperjanjian karena ketidakmampuan dari pihak debitur menyebabkan pihak kreditur mengeluarkan perkataan yang kasar dengan pihak yang meminjam namun walaupun demikian si pihak kreditur tidak pernah menyita barang milik pihak debitur sekalipun dengan tunggakan pembayaran hutang dengan waktu yang cukup lama. Pihak kreditur hanya menagih saja agar uang yang dipinjamnya cepat dikembalikan pada akhirnya hal tersebut membuat kesadaran sendiri dari pihak debitur atau pihak meminjam untuk membayar

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak SG Ketua RT. 28 Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur (081351422347), Tanggal, 26 Januari 2016.

hutangnya dengan cara menggadaikan barang yang ia miliki. Jadi masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur pada dasarnya mempunyai khas tersendiri dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang demikian membuat penulis tertarik dan mengkaji untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG DI KALANGAN MASYARAKAT TALOHEN HULU KELURAHAN AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR"**

B. Rumusan Masalah

Gambaran latar belakang diatas, yang dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya hutang piutang di kalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur ?
2. Bagaimana bentuk akad hutang piutang itu terjadi di kalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa hutang piutang ketika terjadi wanprestasi di kalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya hutang piutang di kalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur.

2. Untuk mengetahui bentuk akad hutang piutang itu terjadi di kalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hutang piutang ketika terjadi wanprestasi di kalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur .

D. Batasan Penelitian

Permasalahan sengketa hutang piutang banyak terjadi dilembaga-lembaga keuangan baik berupa Bank maupun Non Bank namun penulis hanya mengkaji penyelesaian hutang piutang yang terjadi pada masyarakat kecil saja yaitu di kalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis buat.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat secara teoritis dan konseptual yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dan Mahasiswa Jurusan Syariah khususnya Program Studi Ekonomi Syariah dalam bidang kajian Ekonomi Syariah.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.
3. Sebagai bahan yang mungkin berguna bagi masyarakat agar memahami lebih mendalam bagaimana penyelesaian sengketa hutang piutang yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

4. Sebagai Tugas akhir untuk menyelesaikan studi program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
5. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Adapun yang menjadi sistematika penulisan penelitian terbagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Kajian pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu, deskripsi teoritik, dan kerangka pikir.
- Bab III Metode Penelitian, terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data serta teknik analisis data.
- Bab IV Pemaparan data terdiri dari selayang pandang Kabupaten Barito Timur, lingkungan alam Kabupaten Barito Timur dan gambaran umum penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat Talohen Hulu yang terdiri dari latar belakang terjadinya hutang piutang di kalangan masyarakat Talohen Hulu, bentuk akad hutang piutang di kalangan masyarakat Talohen Hulu dan penyelesaian sengketa hutang piutang di kalangan masyarakat Talohen Hulu.

Bab V Analisis Data, terdiri dari latar belakang hutang piutang di masyarakat Talohen Hulu yang terdiri dari potret ekonomi masyarakat Talohen Hulu dan motif hutang piutang di masyarakat Talohen Hulu, bentuk akad hutang piutang di masyarakat Talohen Hulu yang terdiri dari beberapa rumusan yaitu: transaksi hutang piutang di masyarakat Talohen Hulu dan Bentuk akad hutang piutang di masyarakat Talohen Hulu dalam perspektif hukum perikatan Islam. Dan penyelesaian sengketa hutang piutang di masyarakat Talohen Hulu yang terdiri dari beberapa rumusan yaitu : jumlah sengketa hutang piutang di masyarakat Talohen Hulu, potensi konflik dalam transaksi hutang piutang di masyarakat Talohen Hulu, pola penyelesaian sengketa hutang piutang di masyarakat Talohen Hulu dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa hutang piutang di masyarakat Talohen Hulu dalam perspektif perlindungan terhadap nasabah.

Bab VI Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hutang piutang merupakan salah satu kegiatan yang diperbolehkan dalam syariat Islam karena ini merupakan perwujudan sikap saling tolong menolong antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Namun dalam hal prakteknya hutang piutang seringkali terjadi permasalahan di karenakan salah satu pihak berhalangan atau tidak mampu untuk menjalankan prestasinya. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu tentang utang-piutang yaitu sebagai berikut :

Kalyisah Baharuddin Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, (2013) dengan judul ”Penerapan Prinsip Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bmt Al-Amin Makassar.” Jenis penelitian kuantitatif, Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Amin Makassar telah menerapkan prinsip kekeluargaan sesuai syariat Islam untuk menegakkan ekonomi syariah dengan menerapkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh di segala aktivitas bisnis. Dimana prinsip kekeluargaan yang peneliti temukan yaitu mencakup prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), prinsip tolong-menolong (*At-Taawun*) dan prinsip toleransi. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pihak BMT Al-Amin Makassar adalah menagih dengan cara yang baik dengan bertingkah laku baik sesuai adab dan etika Islam seperti bermusyawarah, membicarakan dengan baik kepada nasabah atau keluarganya jika nasabah yang melarikan diri untuk mencari solusi penagihan utang nasabah tersebut. Begitupun dalam penanganan

pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara memberikan tenggang waktu yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali) dimana memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Serta hapus buku atau hapus tagih dilakukan BMT Al-Amin kepada nasabah yang telah meninggal dunia jika tidak ada keluarga yang bisa bertanggungjawab menanggung segala utangnya.¹²

Raden Patria Danu Negara, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan *Mudharabah* (Studi pada Bmt Ben Taqwa),” Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode wawancara yang dilakukan kepada pengurus dan anggota BMT Ben Taqwa serta Tim Penyehatan yang merupakan mediator penyelesaian sengketa sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan dan dokumen sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus BMT Ben Taqwa tidak dapat melakukan prestasinya dikarenakan faktor likuiditas, *miss manajemen*, kesalahan kebijakan dan penyimpangan keuangan. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara *mediasi* setelah persoalan ini sempat dilaporkan kepada kepolisian. Cara *Mediasi* yang dilakukan tersebut sehingga terjadi *islah* diantara para pihak serta dapat diselenggarakannya RALB (Rapat Anggota Luar Biasa). *Mediasi* yang dilakukan

¹² Kalyisah baharuddin, *Penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bmt al-amin makassar*, [Http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4777/SKRIPSI%20%20%28KALYISA H%20BAHARUDDIN%20A31108848%29.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4777/SKRIPSI%20%20%28KALYISA%20BAHARUDDIN%20A31108848%29.pdf?sequence=1), diakses pada tanggal 12 april 2016.

untuk menyelesaikan sengketa tersebut dibagi menjadi 4 tahapan yaitu pra *islah*, *islah*, perbaikan-perbaikan dan RALB (Rapat Anggota Luar Biasa).¹³

Ikhsan Al Hakim, 2013, dengan judul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang–Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama oleh Pengadilan Agama Purbalingga)," Jenis penelitian kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah di Purbalingga telah dilaksanakan. Berdasarkan Putusan-putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah. Kesembilan kasus tersebut 5 kasus selesai dengan damai pada saat proses litigasi dilaksanakan, 4 kasus dikabulkan oleh Hakim. Faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sumber daya manusia Pengadilan Agama Purbalingga yang konsisten dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Para Hakim telah memperkaya diri dengan mengikuti pelatihan ekonomi syariah, melanjutkan belajar di perguruan tinggi, dan membaca buku. Selain itu dukungan dari lembaga peradilan di wilayah hukum kabupaten Purbalingga. Serta dari masyarakat dan lembaga perbankan syariah yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.¹⁴

¹³Raden patria danu negara, fakultas hukum universitas negeri semarang, 2015, *penyelesaian sengketa wanprestasi akad simpanan mudharabah (studi pada bmt ben taqwa)*, <http://lib.unnes.ac.id/21972/1/8111411182-s.pdf>, diakses pada tanggal 12 april 2016.

¹⁴Ikhsan Al Hakim, *penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama purbalingga (studi pelaksanaan undang–undang nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama oleh pengadilan agama purbalingga)*, <http://lib.unnes.ac.id/18443/1/8111409223.pdf>, diakses pada tanggal 12 april 2016).

Tabel.1: Perbedaan dan Persamaan Penelitian penulis Sri Dewi Nur Azizah, Praktik Utang Piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur, sebagai berikut:

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kalyisah baharuddin , Penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bmt al-amin makassar,’’ 2013, Jenis penelitian kuantitatif.	Penyelesaian sengketa hutang pada lembaga prinsip kekeluargaan	Penulis , Penyelesaian dengan prinsip kekeluargaan sesama warga masyarakat Penagihan hutang dengan cara yang kurang baik saat terjadi sengketa
2	Raden patria danu negara , penyelesaian sengketa wanprestasi akad simpanan <i>mudharabah</i> (studi pada bmt ben taqwa),2015, Jenis penelitian kualitatif. Hasil sengketa diselesaikan dengan cara <i>mediasi</i>	Penyelesaian sengketa dalam hal hutang atau pembiayaan	Penulis , Penyelesaian sengketa berprinsip kekeluargaan
3	Ikhsan Al Hakim , penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama purbalingga (studi pelaksanaan UUD no.3 tahun 2006 tentang pengadilan agama oleh pengadilan agama purbalingga),2013, penelitian kualitatif	Penyelesaian sengketa dalam hal ekonomi	Penulis , Penyelesaian sengketa berprinsip kekeluargaan

Dibuat Oleh Peneliti

B. Deskripsi Teoritik

1. Konsep Hutang Piutang

a. Pengertian Hutang Piutang dalam Islam

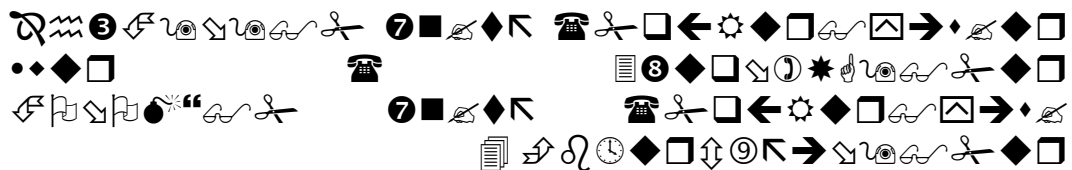
Hutang piutang atau pinjam meminjam dalam fiqih Islam telah dikenal dengan istilah *Al-Qarḍh*. Makna *Al-Qarḍh* secara etimologi (bahasa) ialah *Al-Qaṭh'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qarḍh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Sedangkan secara terminologis (istilah syar'i), makna *Al-Qarḍh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya.¹⁵

Al-Qarḍh (Jamaknya *al-qiradh*) utang-piutang adalah penyerahan harta berupa uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang empunya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, yang diserahkan itu hanya manfaatnya. Kata “berbentuk uang” mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang.

Pinjaman yang baik dikenal dengan istilah *Al-Qarḍh Al-Hasan* gabungan dari dua kata, *al-qarḍh* dan *al-hasan*. Menurut bahasa atau menurut etimologi *al-qarḍh* berasal dari kata *al-qat'u* yang berarti potongan.

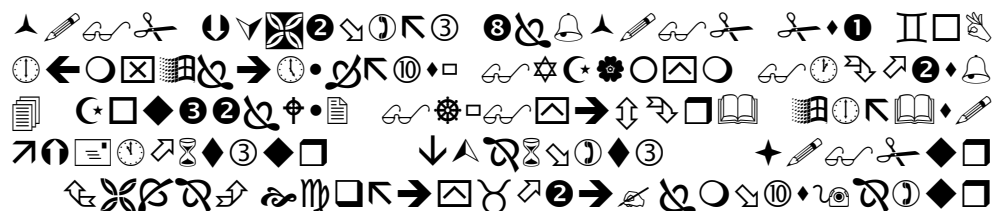
¹⁵ Abufawaz, *Majalah Pengusaha Muslim*,...diakses pada tanggal 11 oktober 2015.

Yaitu harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak *qardh*), dinamakan dengan *qardh* karena pemilik memotong sebahagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. *Al-qardh* secara bahasa juga bisa diartikan dengan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan *al-hasan* artinya baik. Apabila digabungkan *al-qardh al-hasan* berarti pinjaman yang baik. Para ahli fiqh muamalah menggunakan istilah *qardh*, karena istilah *al-qardh al-hasan* tidak ditemukan dalam literatur fiqh muamalah. Namun demikian, maka *qardh* yang dimaksudkan oleh mereka itulah *al-qardh al-hasan*.¹⁶ Terkait hal demikian memberikan pinjaman sebagai sikap tolong menolong Firman Allah Swt :



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”(Q.S al-Maidah (5):2).¹⁷

Memberi pinjaman merupakan sikap tolong-menolong. Seorang muslim yang memiliki kelebihan materi sepatutnya menolong orang lain yang kesulitan. Sebagaimana firman Allah:



¹⁶ Zahara, *Tinjauan Teoritis Tentang Mekanisme Dan Evaluasi Terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan untuk Usaha Perdagangan*, <http://hukum-islam.net/konsep-dan-dalil-qardhul-hasan-pinjaman-lunak/html>, diakses pada tanggal 10 November 2016.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,...hal. 157.

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”¹⁸
Adapun pengertian *Al-qardh* yang disampaikan beberapa pakar

hukum Islam (fuqaha) sebagai berikut;

- 1) Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi qard sebagai harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya.
- 2) Abdullah Abdul Husain at-Tariqi memberikan pengertian qardh sebagai pembayaran harta pada orang yang memanfaatkan kemudian ada ganti rugi yang dikembalikan dengan syarat harus sesuai dengan harta yang dibayarkan pertama kali kepada yang menerimanya.
- 3) Berbeda dengan pengertian-pengertian di atas, Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan utang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang di mana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu.¹⁹

Pengertian utang piutang itu sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hal.60.

¹⁹ Efendy, *Utang Piutang dalam Hukum Islam*,
<http://www.efendy-perpustakaan-cerbon.blogspot.co.id/2010/12/utang-piutang-dalam-hukum-islam.html> 1, diakses pada tanggal 18 Januari 2016.

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal.136.

Keinginan berutang timbul karena beberapa sebab, diantaranya:²¹

- a) Memang sangat diperlukan, misalnya untuk menutupi keperluan hidup, karena penghasilan tidak cukup.
- b) Karena keperluan mendadak, sedang dana tabungan tidak ada, seperti untuk keperluan pengobatan, biaya sekolah anak, kontrak rumah dan sebagainya.
- c) Keinginan menikmati kehidupan melampaui batas-batas kemampuannya, dengan kata lain lebih besar pasak dari pada tiang.
- d) Karena pola hidup yang salah, dan menggunakan uang yang tidak semestinya, seperti berjudi, mabuk dan perbuatan moral lainnya.

Kesimpulan bahwa hutang piutang merupakan penyerahan sesuatu dalam bentuk harta oleh pihak pemberi utang (kreditur) kepada orang yang membutuhkan (pengutang atau peminjam) dengan syarat pihak peminjam harus mengembalikan harta yang sepadan nilainya dengan harta yang telah dipinjam pada saat tempo waktu peminjaman berakhir.

b. Dasar Hukum Hutang-Piutang

Hutang piutang adalah salah satu kegiatan *mu'āmalah* yang diperbolehkan dalam Islam, adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah sebagai berikut:²²

- 1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

²¹ Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet. I, Bandung: Alfabeta Cv, 2009, hal. 234.

²² Ichwan Sam, dkk., *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Cet. I, Jakarta : Dewan Syariah Nasional MUI, 2012, hal. 91-93.

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘āmalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”(Q.S al-Baqarah (2):282).²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”(Q.S al-Maidah (5):1).²⁴

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.”(Q.S al-Baqarah (2):280).²⁵

2) Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا
سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحَاسِنُكُمْ
قَضَاءً

Artinya :”Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata; telah menceritakan kepada kami Syababah. (Dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail berkata, "Aku mendengar Abu Salamah bin 'Abdurrahman menceritakan dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik kalian, atau beliau mengatakan, "dari sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang."(H.R. Ibnu Majah)²⁶

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,...hal. 70.

²⁴ *Ibid*,...hal. 156.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,...hal. 70.

²⁶ Lidwa Pustaka-I software, *Kitab 9 imam Bab mencari pinjaman dan melunasi hutang*(Memberi pelunasan dengan baik) No. 2414.

c. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang

Transaksi hutang piutang akan terjadi apabila terpenuhinya rukun dan syarat hutang piutang, adapun rukun dan syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Rukun dari hutang piutang itu terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a) Lafaz (Kalimat mengutangi), seperti: “Saya utangkan ini kepada engkau.” Jawab yang berutang, “Saya mengaku berutang kepada engkau.”
- b) Orang yang berpiutang dan yang berutang

Kedua belah pihak sebagai yang berhutang dan berpiutang harus memenuhi syarat yang sama seperti para pihak dalam jual beli. Disyaratkan sama seperti dalam jual beli itu, karena walaupun sifatnya terbuka tetapi sebagai aqad diperlukan tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, ialah: Berakal, Atas kehendak sendiri (Kehendak para pihak), Bukan pemboros (mubazir) dan dewasa dalam arti baliq.²⁷

- c) Barang yang diutangkan. Tiap-tiap barang yang dapat dihitung, boleh diutangkan. Begitu pula mengutangkan hewan, maka dibayarkan dengan jenis hewan yang sama.²⁸

²⁷ Abdul Djamili, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hal. 164.

²⁸ Sulaiman Rasjid *Fiqh Islam*,...hal. 307.

2) Adapun yang menjadi syarat hutang-piutang adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Karena hutang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad) maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, sebagaimana jual-beli, dengan menggunakan lafal *qardh*, *salaf* atau yang sepadan dengannya.
- b) Harta benda yang menjadi obyeknya harus *mal-mutaqawwim*.³⁰ Mengenai jenis harta benda yang menjadi obyek utang-piutang terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanafiyah akad utang-piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*³¹ yakni harta benda yang banyak pendanaannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat*³² tidak sah dijadikan obyek utang-piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.
- c) Akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrīdh*

²⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 173.

³⁰ Harta *mutaqawwim*, ialah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta yang termasuk *mutaqawwim* ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Muhammad Isnain, *Harta dalam fiqh muamalah*, [Http://muhisnan.blogspot.co.id/2012/03/harta-dalam-fiqih-muamalah.html](http://muhisnan.blogspot.co.id/2012/03/harta-dalam-fiqih-muamalah.html). diakses pada tanggal 02 Maret 2016.

³¹ *Mitsli* adalah harta yang terdapat padanannya di pasaran, tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya, atau kesatuannya. Harta *mitsli* dapat dikategorikan menjadi 4 bagian yaitu: sesuatu yang dapat ditakar (gandum, beras), sesuatu yang dapat ditimbang (seperti besi, kapas dan tembaga), sesuatu yang dapat dihitung dan memiliki kemiripan bentuk fisik (seperti pisang, telur, apel). Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 29.

³² *Qimi* adalah harta yang tidak terdapat padanannya di pasaran, atau terdapat padanannya, akan tetapi nilai tiap satuannya berbeda atau memiliki kualitas dan fisik yang berbeda-beda seperti domba, tanah, kayu dan sebagainya. *Ibid.*, hal. 30.

(pihak yang mengutangkan). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, Fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.

d. Tempat Pengembalian *Al-Qardh* (Utang Piutang)

Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya dimana tempat akad qardh itu dilaksanakan. Boleh juga ditempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan tempat jaminan keamanan. Apabila semua itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.³³

e. Harta yang boleh dihutangkan

Boleh mengutangkan barang-barang yang bisa ditakar atau ditimbang atau barang-barang yang diperdagangkan. Boleh juga memperdagangkan roti dan *khamir* (roti yang adonannya beragi).³⁴ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. selain *qardh* dari perkara diatas yang dipandang sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap ditanah, dan lain-lain.³⁵

f. Beberapa Hukum Berkaitan dengan Utang Piutang

Memberi hutang hukumnya sunat, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat

33 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 378.

34 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*,...hal.118.

35 Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung; Cv Pustaka Setia, 2001, hal.154.

membutuhkannya. Memang tidak syak lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.³⁶ Adapun hukum berkaitan dengan utang piutang adalah sebagai berikut :³⁷

1. Akad utang piutang menetapkan peralihan kepemilikan.
2. Penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung.
3. Pihak *muqtārīdh* wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika obyek hutang adalah barang *al-mislīyyat* atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika obyek utang adalah barang *al-qimīyyat*.
4. Jika dalam akad ditentukan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqtārīdh* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.
5. Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak *muqtārīdh* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh Islam agar pihak *muqrīdh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan.

g. Melebihkan Pembayaran

Melebihkan pembayaran dari jumlah yang diterima oleh si berutang dapat dikemukakan sebagai berikut:³⁸

- 1) Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh si berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,...hal. 307.

³⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hal.173

³⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,...hal. 137-138.

tersebut (boleh) halal bagi si berpiutang dan merupakan kebaikan bagi yang berutang. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi yang artinya berbunyi sebagai berikut:³⁹

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah telah mengutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umumnya dari hewan yang beliau utang itu, dan Rasulullah SAW bersabda: Orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik.”

2) Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang. Ketentuan ini disandarkan kepada Hadis Rasulullah SAW, antara lain;⁴⁰ Hadis yang diriwayatkan Baihaqi, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba.”

Sedangkan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengemukakan, yang artinya sebagai berikut:⁴¹

“Diceritakan oleh Anas: “Seorang laki-laki telah mengutangkan suatu barang kepada temannya kemudian ia diberi hadiah oleh temannya itu, lalu ia ditanya soal ini, Maka ia berkata: Sabda Rasulullah SAW: Apabila salah seorang diantara kami mengutangkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan diatas kendaraannya, maka hendaklah jangan diterimanya hadiah itu kecuali memang diantara keduanya berlaku demikian sebelum menjadi utang piutang.”

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

h. Tata Krama Berutang

Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang tata krama yang terkait didalamnya, di antaranya sebagai berikut:⁴²

- 1) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- 2) Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan pinjaman maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
- 3) Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
- 4) Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan bila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
- 5) Pihak yang berutang bila telah mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaklah mempercepat membayar utangnya sebab

⁴² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh muamalah*,...hal. 253.

sebagaimana dijelaskan dalam hadis, melalaikan dalam membayar pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat zalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya.⁴³

- 6) Memilih sistem gadai yaitu pinjam meminjam dengan sistem gadai cenderung lebih aman. Maksudnya, jika si penerima pinjaman tidak mampu membayar, barang yang digadaikan bisa menjadi gantinya atau dilelang sehingga bisa digunakan untuk membayar pinjamannya.⁴⁴

2. Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.⁴⁵

Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010.hal. 253.

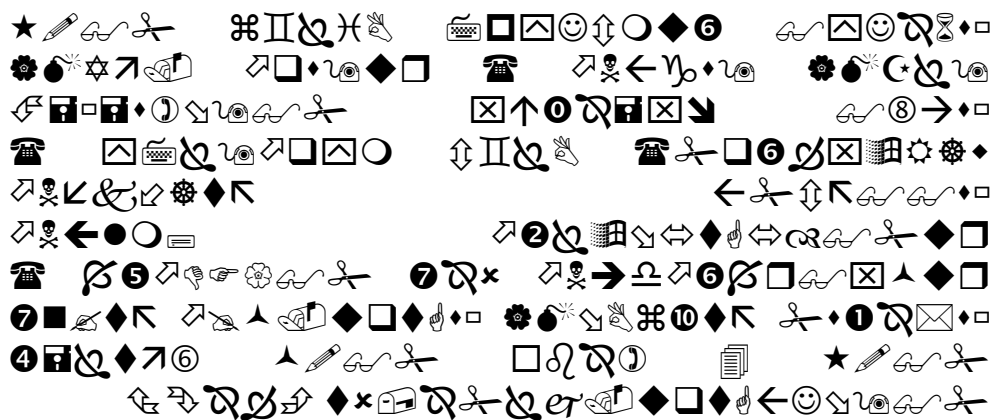
⁴⁴ Abdillah firmanzah Hasan, *Ensiklopedia Akhlak Mulia*, Cet. I, Solo: Tinta Media, 2015, hal. 355.

⁴⁵ <http://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2016.

penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.⁴⁶ Adapun Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai berikut:

a) Musyawarah

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah untuk mufakat. Dengan penyelesaian sengketa bisnis dengan musyawarah, maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi diantara para pihak yang bersengketa (berselisih), serta lebih menghemat waktu dan biaya.⁴⁷ Adapun dalil yang memerintahkan musyawarah yaitu sebagai berikut :



Artinya :”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.Sesungguhnya Allah menyukai

⁴⁶ Frans Hendra Wiranata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 15.

⁴⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: SinarGrafika, 2013, hal. 252.

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Ali-Imran (3):159).⁴⁸

b) Mediasi (*Ishlah/Shulh/Perdamaian*)

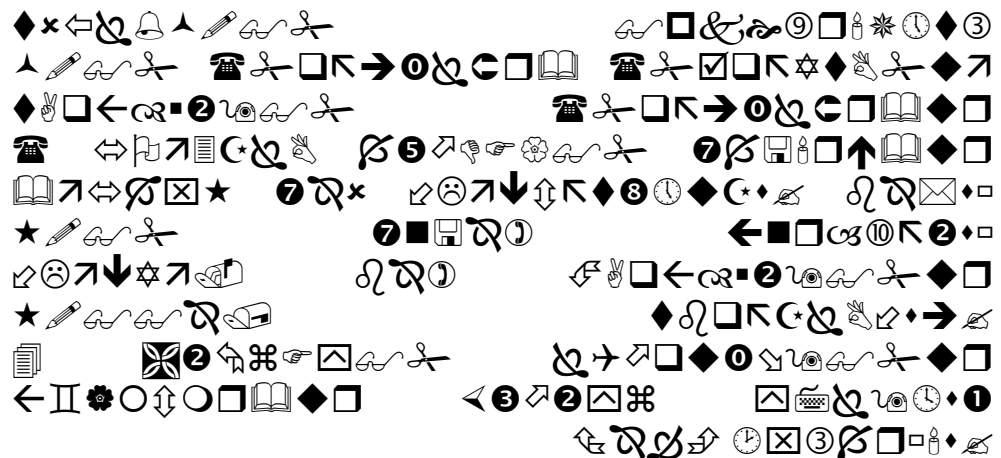
Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian memuaskan.⁴⁹

Istilah bahasa Arab mediasi itu adalah *shulh*. *Shulh* secara etimologis, berarti meredam pertikaian. Sedangkan menurut terminologi, pengertian *shulhu*, berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri. Perselisihan atau pertikaian antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Upaya damai itu biasanya dilakukan melalui pendekatan musyawarah (*syura*) di antara para pihak yang berselisih. Cakupan objek perdamaian dari *shulh* cukup luas, yaitu *shulh* dalam *mu'āmalah* ekonomi, keluarga (rumah tangga), peperangan dan perdamaian lainnya.⁵⁰ Dalil tentang perintah mediasi, di antara:

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,... hal. 103.

⁴⁹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. II, Tangerang: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2011, hal. 25.

⁵⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*,...hal. 253.



Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”Q.S An-Nisa (4):59⁵¹

c) *Tahkīm* (Arbitrase)

Perspektif Islam, kata dari “*arbitrase*” dapat dipadankan dengan istilah ”*tahkim*.” *Tahkim* sendiri berasal dari kata “*hakkama*.” Secara etimologi, *tahkīm* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkīm* memiliki pengertian yang sama dengan *arbitrase* yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*hakam*”.

Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad, pengertian *tahkīm* menurut istilah fikih adalah:

“Sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannnya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Adapun menurut Said Agil Husein al-

⁵¹ *Ibid.*, hal. 158.

Munawar, pengertian “*tahkīm*” menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Adapun pengertian “*tahkīm*” menurut hli hukum dari kelompok syafi’iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum *syara’* terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakan.”⁵²

d) Wilayah *al-Qaḍha* (Kekuasaan Kehakiman)

Alternatif penyelesaian sengketa lainnya adalah *Wilayah al-Qaḍha* yaitu kekuasaan hakim yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:⁵³

1) *Al-Hisbah*

Al-Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut al-Mawardi kewenangan lembaga *hisbah* ini tertuju kepada tiga hal yakni: *pertama*, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan; *kedua*, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditas dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluwarsa; dan *ketiga*: dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utang bagi pihak yang berutang.

2) *Al-Madzālīm*

⁵²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Cet.II, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 430.

⁵³*Ibid.*, hal.434-436.

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan *hisbah*. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali *al-Madzālīm* atau *al-Nadlir*.⁵⁴

3) *Al-Qadha* (Peradilan)

Menurut arti bahasa *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.” Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-ahwal asy-Syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).⁵⁵

Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di pengadilan disebut dengan *qadhi* (hakim). Dalam catatan sejarah Islam, seorang yang pernah menjadi *qadhi* (hakim) yang cukup lama adalah *al-Qadhi Syureih*. Beliau mengaku jabatan hakim selama dua periode sejarah,

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

yakni pada masa penghujung Pemerintah *Khulafaurrasyidin* (masa khalifah Ali Ibn Abi Thalib) dan masa awal dari pemerintah Bani Umayyah. Di samping menyelesaikan tugas-tugas perkara, para hakim pada pemeritahan Bani Umayyah juga diberi tugas tambahan yang berupa penyelesaian perkara, misalnya menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengawasan baitul maal, dan mengangkat pengawasan anak yatim.⁵⁶

Melihat ketiga wilayah *al-Qadha* (kekuasaan kehakiman) sebagaimana tersebut, bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, tampaknya dua dari tiga kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, wilayah *Al-Madzālīm* bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, wilayah *al-Qadha* bisa dipadankan dengan lembaga peradilan umum dan peradilan agama. Adapun *wilayatul al-Hisbah* secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau Kamtibmas, Satpol PP.⁵⁷

3. Konsep *Adat Badamai* Masyarakat Banjar

Adat Badamai adalah salah satu kebiasaan atau yang telah menjadi budaya masyarakat banjar dalam penyelesaian sengketa *non litigasi* (tidak melalui jalur pengadilan). Adapun lebih lanjut mengenai keterangan *Adat Badamai* sebagai berikut:

a). Pengertian *Adat Badamai*

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

Secara etimologis *adat badamai* merupakan kata majemuk yang berasal dari bentukan kata *adat* dan *badamai*. Istilah lainnya adat adalah *urf*, yang secara bahasa diartikan sebagai yang dikenal dan dianggap baik serta diterima oleh akal sehat. *Urf* juga diartikan sebagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁵⁸ Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam* adat berarti kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti hukum adat, dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut *adat saja*.⁵⁹

Kata adat juga sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sang sengkerta *a* (berarti "bukan") dan *dato* (yang artinya "sifat kebendaan") dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immateril: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan.⁶⁰

Badamai berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata *damai* yang berarti damai, tenang sejahtera. Kata *badamai* merupakan kata bentukan dari bahasa Banjar. Istilah ini berasal dari akar kata *damai* ditambah imbuhan (ber) menjadi *berdamai*, dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*

⁵⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. V, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 1999, hal. 50.

⁵⁹ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai (Penyelesaian Sengketa) Pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan*, <http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/view/414/319>, diakses pada tanggal 5 november 2016.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hal. 70.

damai sepadan dengan kata *as-sulh*, yang artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian. Pengertian yang lain ialah upaya yang dilakukan secara damai dan di dalam bahasa Banjar kata badamai dipadankan dengan kata berjalan dengan *bajalan*, bermain dengan *bamain*.⁶¹

Adat badamai merupakan kata majemuk yang berarti suatu upaya perdamaian yang dikerjakan atau dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar. Adat badamai dapat meningkat menjadi hukum adat, ketika masyarakat sudah menganggap perbuatan *badamai* itu sebagai suatu hal yang mesti berlaku pada masyarakat adat Banjar, karena itu sebagai suatu yang mesti dilakukan.⁶²

Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. *Adat badamai* dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Putusan Badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pada masyarakat Banjar jika terjadi persengketaan diantara warga atau terjadi tindak penganiayaan atau

⁶¹ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai (Penyelesaian Sengketa) Pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan...*

⁶² *Ibid.*

pelanggaran norma (adat) atau terjadi perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas, maka warga masyarakat berkecenderungan menyelesaikan secara badamai. Warga masyarakat enggan menyelesaikan sengketa itu melalui lembaga litigasi (jalur lembaga peradilan). *Adat badamai* ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam berperan menciptakan keamanan ketertiban dan perdamaian. *Adat badamai* ini lazim pula disebut dengan, *babaikan*, *baparbaik*, *bapatut* atau *mamatut*, *baakuran* dan penyelesaian dengan cara *suluh*.⁶³

b). *Adat badamai* dalam UU sultan Adam

Jika terjadi persengketaan ataupun Undang-undang Sultan Adam disebutkan dalam Pasal 21:⁶⁴

Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja ija itu tetuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mupaqat-mupaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim.

Artinya: Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (*mamatut*) dengan tetuha kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim.

Pasal 21 UUSA sebagai dasar hukum *adat badamai* sampai kini tetap menjadi landasan norma dan perilaku dalam masyarakat Banjar. Bahkan sampai sekarang masih menjadi suatu tradisi *mamatut*. Tradisi penyelesaian sengketa yang sudah melembaga untuk merukunkan kembali

⁶³ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai (Penyelesaian Sengketa) Pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan...*

⁶⁴ *Ibid.*

setiap pertikaian, sehingga tidak terjadi perasaan dendam antara kedua belah pihak.

c). *Adat Badamai* Masyarakat Banjar

Masyarakat banjar mempunyai cara yang unik dalam kehidupan sosial mereka termasuk dalam permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Mochrani membagi penyelesaian sengketa itu kepada dua hal, pertama penyelesaian dalam masalah agama yaitu dengan cara mengadakan *hujjah* dan kedua penyelesaian konflik yang bersifat fisik yang berkaitan dengan kasus penganiayaan, perkelahian, pelanggaran lalu lintas maupun sengketa pembagian harta warisan. Jika terjadi konflik atau persengketaan antara warga dan tidak dilakukan *adat badamai* diyakini akan merusak tatanan harmoni yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan tradisional.⁶⁵

Jika konflik terjadi apalagi yang berkaitan dengan peristiwa pidana, maka tokoh-tokoh masyarakat (tetuha kampung) berinisiatif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Diupayakan pertemuan (*musyawarah*) keluarga, dilanjutkan acara selamatan, dengan bermaaf-maafan dan terkadang disertai dengan perjanjian tidak akan memperpanjang sengketa dan permusuhan. Bahkan diantara kedua belah pihak diikat dalam sebuah persaudaraan yang lazim disebut sebagai *baangkat dangsanak*

⁶⁵ *Ibid.*

(dipersaudarakan) atau *baangkat kuitan* (menjadi orang tua dan anak angkat). Ciri khas yang membedakan adat badamai dengan penyelesaian damai pada masyarakat lainnya adalah : adanya nilai-nilai atau norma yang harus dipatuhi, adanya upacara yang mengiringi sebagai simbol tuntasnya sengketa atau pertikaian, adanya acara maangkat dangsanak atau maangkat kuitan (dipersaudarakan) yang sarat dengan unsur-unsur ritual yang bersifat religi semisal adanya upacara *batapung tawar*. Lengkap dengan hidangan nasi ketan dan kelapa parut yang dicampur dengan gula jawa. Hukum *Adat Badamai* pada masyarakat Banjar terdiri atas 3 unsur, yaitu:⁶⁶

- 1). Unsur-unsur yang tidak tertulis, berupa kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek pergaulan hidup dalam masyarakat. Ini mencakup segala apa saja yang sudah terbiasa dianggap baik oleh masyarakat dan akan menimbulkan reaksi dari berbagai lapisan masyarakat kalau hal tersebut dilanggar. Tegasnya pelanggaran akan mendapatkan sanksi minimal berupa celaan dari masyarakat. Kebiasaan demikian dalam masyarakat Banjar berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya terutama dilihat dari besar kecilnya pengaruh pendidikan dan modernisasi serta kegiatan pembangunan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- 2). Unsur-unsur yang berasal dari hukum Islam, yaitu mencakup segala ketentuan syariat islam dan hukum-hukum fiqh yang dipertahankan dan dianut oleh masyarakat sebagai bagian besar dari ajaran agamanya.

⁶⁶ *Ibid.*

Berkenaan dengan ini penentuan apa yang merupakan ajaran agama adalah tergantung pada persepsi warga masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama di daerah ini sejak zaman dahulu. Penentuan sesuatu adalah wajib, sunat, mubah, makruh dan haram pada dasarnya ditentukan dari para ulama dan tetap dipegang terus sebagai kriteria penilaian ketika seseorang menghadapi fakta tertentu yang memerlukan penilaian.

- 3). Unsur-unsur yang berasal dari zaman kerajaan Banjar, untuk hal ini tidak ditentukan suatu ketentuanpun selain dari apa yang dinamakan Undang-undang Sultan Adam (1835) seorang Sultan yang terkenal alim dan dihormati oleh rakyatnya. Undang-undang yang terdiri dari atas beberapa pasal ini kelihatannya pelaksanaannya sangat tergantung pada Sultan, sehingga sepeninggal Sultan Adam lebih-lebih lagi setelah meninggalnya Sultan Adam kurang banyak mendapat perhatian kecuali dalam bidang hukum pertanahan yang masih ditaati oleh masyarakat.

4. Teori Hukum Perikatan

a. Pengertian Perikatan

Istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Verbintenis*. Perikatan atau perutangan merupakan terjemah dari *verbintenis* atau *verbiden*, yang artinya mengikat. *Verbintenis* berasal dari kata kerja *verbiden*, yang artinya mengikat. Istilah *verbintenis* menunjuk pada adanya “ikatan” atau “hubungan” sehingga istilah *verbintenis* diartikan sebagai suatu

hubungan hukum. Oleh karena itu, istilah *verbinten* lebih tepat diartikan sebagai istilah perikatan dan dalam ilmu hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sebagai para pihak yang melakukan ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.⁶⁷

Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh mu'amalah dapat disebut dengan akad. kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti antara lain:⁶⁸

- 1) mengikat (*al-rabith*), yaitu: “Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.”
- 2) Sambungan (*al-'aqd*), yaitu: “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”
- 3) Janji (*al-'ahd*)

Secara istilah (terminologi) ada beberapa definisi (pengertian) akad, pengertian tersebut ada yang bersifat umum dan bersifat khusus.⁶⁹

- 1) Pengertian akad secara umum

“Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal

15. ⁶⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Cet I, Bandung: Pustaka Setia 2011, hal.

⁶⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, Yogyakarta: Teras, 2011, hal. 25-26.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 26-27.

wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam jual beli, ijarah.”

2) Pengertian akad secara khusus adalah:

”Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”

Menurut Pendapat Subekti terkait perikatan adalah:

“pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan hal itu, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”⁷⁰

b. Macam-macam Hukum Perikatan Syariah

Hukum perikatan syariah itu terbagi menjadi beberapa macam yaitu :Menurut Syamsul Anwar, hukum perikatan syariah dilihat dari segi kaitan dengan objeknya, maka secara garis besar dibagi kepada (4) empat macam, yaitu:

1. Perikatan Utang

Perikatan utang ialah suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah sejumlah benda *missal* (*misli*). Kunci untuk memahami konsep utang dalam hukum Islam bahwa utang itu dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam *dzimmah* (tanggungan seseorang).⁷¹

2. Perikatan Benda

Perikatan benda adalah suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikan, baik bendanya sendiri

⁷⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*,...hal. 06.

⁷¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet.II, Jakarta: Pt RajaGrafindo persada, 2010, hal. 53.

atau manfaatnya, atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain, seperti menjual tanah tertentu kepada seseorang, atau menyewakan gedung untuk diambil manfaatnya, atau menyerahkan, atau menitipkan barang tertentu.⁷²

3. Perikatan Kerja atau Melakukan Sesuatu

Perikatan kerja yaitu suatu hubungan anatar dua pihak untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah akad *Istishna*⁷³ dan *ijarah*⁷⁴. Perjanjian kerja lebih dikenal dengan perjanjian perburuhan. Secara umum, perjanjian kerja adalah perjanjian yang didasarkan oleh dua orang atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁷⁵

4. Perikatan Menjamin

Perikatan menjamin yaitu suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung (menjamin) suatu perikatan. Maksudnya, pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak ke dua terhadap pihak pertama. Misalnya, A bersedia menjadi penanggung utang B kepada C. Jadi perikatan A untuk menanggung utang B terhadap

⁷² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*,...hal. 40.

⁷³ *Istishna* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dengan pihak penjual.

⁷⁴ *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

⁷⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*,...hal. 41.

C adalah perikatan menjamin. Sumber perikatan ini adalah akad *kafalah*⁷⁶ (Penanggungan).⁷⁷

c. Asas-Asas Perikatan dalam Islam

Hukum islam terdapat asas - asas untuk pelaksanaan akad. Asas – asas tersebut akan memberikan pengaruh pada satu akad. Artinya, bilamana asas ini tidak terpenuhi maka akan berakibat pada ketidaksempurnaan akad, bahkan lebih jauh akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Adapun asas tersebut sebagai berikut :⁷⁸

1) Asas *Al-īlahiyyah* (Ketuhanan)

Asas *Al-īlahiyyah* yaitu asas ke-Tuhanan. Yaitu semua perbuatan manusia adalah ketentuan Allah SWT, dan segala sesuatu adalah milik Allah SWT.

2) Asas *Nubuwwah* (Kenabian)

Asas *Nubuwwah* adalah Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi umatnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal *muamalah* dan dalam melakukan kontrak syariah.

3) Asas Ibadah

Asas Ibadah yaitu melakukan kontrak syariah diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Karena tujuan utama manusia diciptakan Allah adalah untuk ibadah.

4) Asas *Ibāhah* (Boleh)

⁷⁶ *Kafalah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau penjamin.

⁷⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*,...hal. 42.

⁷⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*,...hal. 20-30.

Asas *Ibāhah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Sebagaimana kaidah fiqh ”*Al-aṣḥlu fī al-muāmalah al-ibāhah illa maa dalla “ala tahrīmihi*”(hukum asal bidang muamalah adalah *ibāhah* (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya).

5) Asas *Hūrīyyah* (kebebasan)

Asas *hūrīyyah*, yaitu asas kebebasan maksudnya para pihak yang melakukan akad syariah harus mempunyai kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*), tidak ada paksaan (*al-ikrah*), tetapi harus dilakukan dengan penuh kesadaran.

6) Asas *Musawwah* (Kesamaan/Equality)

Asas *musawwah* yaitu, asas kesamaan atau kesederajatan para pihak yang melakukan akad/kontrak syariah.

7) Asas’*Adalah* (Keadilan)

Asas’*Adalah* yaitu asas keadilan, di mana para pihak yang melakukan kontrak syariah, tidak boleh ada yang terzalimi.

8) Asas *Kitabah* (Tertulis)

Asas *Kitabah* yaitu asas yang tertulis, ialah suatu akad atau perikatan hendaknya dilakukan secara tertulis atau dinotariskan.

9) Asas *Shiddīqah* (Kejujuran)

Asas *Shiddīqah*, yaitu asas kejujuran. Yaitu para pihak yang melakukan kontrak syariah wajib bersikap jujur, tidak ada unsur penipuan, dan manipulasi.

10) Asas *Ar- Riḍhā’iyāh* (Kerelaan atau konsensualisme)

Asas *Riḍhā'iyāh*, yaitu asas kerelaan atau keridhaan. Maksudnya para pihak yang melakukan kontrak syariah harus mengandung unsur kerelaan di antara mereka.

11) Asas Halal

Asas halal adalah objek barang yang diakadkan dalam kontrak syariah adalah barang yang dihalalkan.

12) Asas *Amānah*

Asas *Amānah*, yaitu asas kepercayaan. Maksudnya, para pihak yang melakukan kontrak syariah harus menjunjung tinggi amanah dan tidak khianat (*wanprestasi*).

Sumber lain, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab II tentang Asas Akad, dinyatakan bahwa terdapat 13 asas dari pelaksanaan akad dalam hukum Islam antara lain :⁷⁹

1) *Ikhtiyāri* (Sukarela)

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

2) *Amānah* (Menepati janji)

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

3) *Ikhtiyāti* (Kehati-hatian)

⁷⁹*Ibid*,..hal.31-32.

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

4) *Luzum* (Tidak berubah)

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

5) Saling Menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

6) *Tāswiyah* (kesetaraan)

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

7) Transparansi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

8) Kemampuan

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9) *Taisir* (Kemudahan)

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

10) Itikad Baik

Akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

11) Sebab Yang Halal

Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

d. Prestasi, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa

Hukum perikatan ada beberapa istilah yang harus dipahami di dalamnya dari perjanjian yang dibuat, Adapun istilah tersebut sebagai berikut :⁸⁰

1) Prestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur.

2) Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:⁸¹

⁸⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi hukum perikatan dalam Islam)*, Cet. I, Bandung: Cv Pustakka Setia, 2011, hal. 103-107.

⁸¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi hukum perikatan dalam Islam)*,...hal.103-105.

- a) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian
- b) Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya diluar kemampuan debitur.

Dengan kata lain wanprestasi terjadi karena:

- a) Debitur yang sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b) Debitur terlambat memenuhi perikatan.
- c) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, ia wajib mengganti kerugian atau disebut dengan kerugian atau disebut dengan ganti rugi.

Selain mengganti kerugian, kreditur dapat pula membatalkan perikatan.

Dari dua hal tersebut terdapat dua akibat berikut:

- a) Melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian;
- b) Membatalkan perikatan dan mengganti kerugian.

Menentukan seseorang debitur melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan sesungguhnya yang dialami oleh debitur, apakah debitur sengaja melakukan ingkar janji atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan debitur yang dapat dikatakan *wanprestasi*:

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Agar debitur tidak melakukan kelalaian dalam pelaksanaan prestasinya, pihak kreditur dapat melakukan hak-hak berikut:

- a) Memberitahukan jatuh tempo pembayaran melalui telepon, pesan pendek, surat, dan email.
- b) Memberi peringatan keterlambatan dan jumlah denda yang harus dibayarkan.
- c) Menetapkan batas akhir pembayaran disebabkan telah melampaui batas toleransi.
- d) Memberikan toleransi pembayaran minimum tanpa bunga dan denda.
- e) Memberitahukan akan dilakukan penyitaan jaminan dan batas waktu pengambilan harta kekayaan apabila debitur menghendakinya setelah seluruh utangnya dilunasi.
- f) Melelang harta kekayaan debitur setelah melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

3) Overmacht (Keadaan Memaksa)

Overmacht atau keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada di luar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya, misalnya karena terjadi gempa bumi, banjir, kebakaran dahsyat. Karena peristiwa yang dialami oleh debitur, prestasinya tidak dapat dipenuhi.

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi;
- b) Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;
- c) Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dipertanggungjawabkan kepada debitur.

5. Teori Perlindungan Terhadap Konsumen

a. Pengertian Perlindungan terhadap Konsumen

Mengatur dan melindungi konsumen di Indonesia terhadap kejahatan bisnis seperti penipuan, iklan produk yang menyesatkan dan agar konsumen dapat dilayani dengan baik, maka dibuatlah Undang-Undang No.8 Tahun 1999, Pasal 1 butir 1:

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999, Pasal 1 butir 1:

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. “Definisi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”⁸²

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen diatur dalam undang-undang maupun peraturan sebagai berikut:⁸³ Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999, tentang

Asas Perlindungan Konsumen:

“Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Sedangkan menurut Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999, tentang Tujuan Perlindungan Konsumen.

1) Perlindungan konsumen bertujuan untuk:⁸⁴

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

⁸² Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, Cet. I, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011, hal.56.

⁸³ *Ibid.*, hal.56-58.

⁸⁴ *Ibid.*

- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/ atau jasa;
 - c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
 - f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- 2) Adapun asas perlindungan konsumen antara lain:⁸⁵
- a) Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
 - b) Asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁸⁵ *Ibid.*

- c) Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik dalam materiil ataupun spiritual.
- d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas Kepastian Hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah:⁸⁶

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.

⁸⁶Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*,... hal. 58.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan lainnya.

UU ini tentunya tidak hanya bicara hak, seperti pada pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat kewajiban konsumen, antara lain:⁸⁷

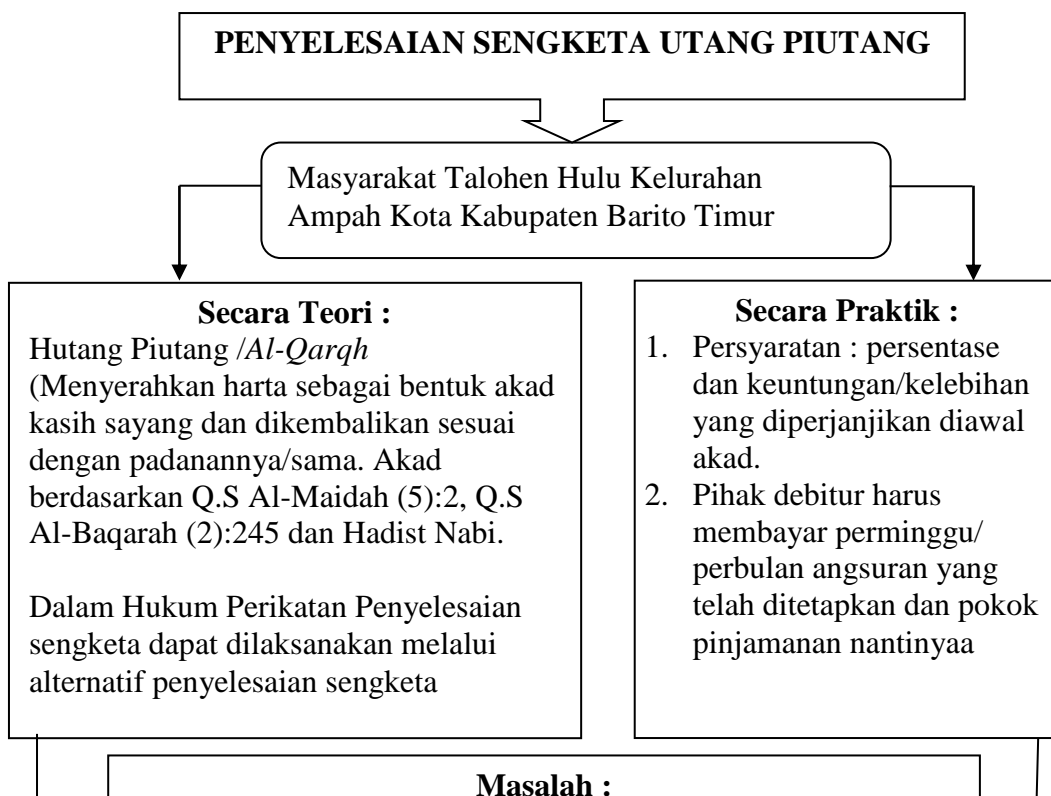
- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Kerangka Berpikir

⁸⁷*Ibid.*

Hukum *qardh* (Utang Piutang) sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi yang meminjam. Akad hutang piutang merupakan akad tolong menolong antara sesama warga yang mengalami kesusahan terkhusus dalam hal ini berupa materi (uang) namun bukan berarti akad tersebut sebagai jalan untuk memperoleh keuntungan diatas kesulitan orang lain seperti apa yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur dalam perjanjian hutang piutang tersebut adanya penetapan persentase dan keuntungan yang di tetapkan diawal perjanjian.

Perjanjian tersebut juga tidak dapat terlaksana dengan baik karena salah satu pihak tidak dapat melakukan *wanprestasi* (tidak terpenuhinya janji) karena alasan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran utangnya baik dari segi persentase maupun keuntungan yang diperjanjikan. Namun dari pihak kreditur tidak peduli atas kondisi sulit dari pihak debitia terus mendesak agar uangnya dapat dikembalikan yang pada akhirnya menyebabkan sengketa diantara pihak yang berakad. Adapun kerangka berpikir yang dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian tentang''Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur'' ini adalah selama 2 bulan berlaku saat surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini cukup memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian, dengan metode melihat langsung penyelesaian sengketa hutang piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur.

B. Lokasi/Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur. Peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan subjek yang terlibat dalam hal hutang piutang di kalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur

C. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Penelitian yang sebenarnya menunjukkan dan menekankan pada proses, dan berarti tidak diteliti secara ketat dan terukur, dilihat dari kualitas, jumlah intensitas atau frekuensi. Penelitian kualitatif memiliki tahapan penelitian, adapun tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah yang akan diteliti

2. Mulai mengenal dan terlibat dengan proses konteks dari sumber informasi. Melakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber yang memungkinkan dari informasi yang dicari.
3. Mulai terlibat dengan beberapa contoh dokumen yang relevan.
4. Mengoleksi data dari beberapa dokumen.
5. Melakukan revisi terhadap data yang ada menyeleksi beberapa kasus tambahan.⁸⁸

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dengan lugas, rinci ataupun secara detail mengenai bagaimana penyelesaian hutang piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur.

D. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik utang piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu. Dengan menggunakan teknik *purposive Sampling*, yaitu memilih responden untuk dijadikan bahan informasi atau informan utama dalam pengambilan data lapangan. Adapun kriterianya kreditur yang masih aktif dalam memberikan pinjaman sebanyak 3 orang dan 4 orang debitur yang mempunyai alasan khusus yaitu untuk kebutuhan transportasi anak sekolah dan untuk modal usaha jumlah keseluruhan 7 orang dan 2 orang informan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai penyelesaian sengketa hutang piutang di kalangan masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur.

⁸⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVIII, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 03.

E. Jenis atau Sumber Data

Menurut lofland dalam buku Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang dimaksud dengan kata-kata dan tindakan di sini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang di amati atau di wawancarai merupakan sumber data utama (primer). Sedangkan untuk sumber data lainnya bisa berupa sumber data tertulis (sekunder) dan dokumentasi seperti foto.⁸⁹

1) Primer

Sumber data utama (primer) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek yang berakad dalam hutang piutang terkait sengketa hutang piutang yang terjadi di kalangan masyarakat Talohen Hulu.

2) Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, koran, surat kabar dan lain-lain. Peneliti memperoleh data dari buku-buku sebagai bahan referensi terkait penelitian penyelesaian sengketa hutang piutang di kalangan masyarakat Talohen Hulu.

3) Tersier

Sumber data tertulis merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi

⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... hal. 157.

dokumen atau arsip didapatkan dari berbagai sumber, maupun foto yang dihasilkan sendiri, serta data yang terkait dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data, dokumen dan foto yang diperoleh dari lokasi penelitian terkait penelitian penyelesaian sengketa hutang piutang di kalangan masyarakat Talohen Hulu.

F. Teknik Pengumpulan data

Penelitian kualitatif ada beberapa macam teknik dari pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.⁹⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung lapangan yaitu:

- a. Mencatat setiap peristiwa yang diteliti terkait sengketa hutang piutang dan penyelesaiannya di kalangan masyarakat tersebut.
- b. Bukti-bukti yang dapat memperkuat hasil dari penelitian seperti dokumen dan sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan

⁹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 115.

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹¹Peneliti menggunakan teknik wawancara yang bersifat tidak terstruktur, artinya wawancara yang dilakukan bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁹²

Wawancara ini secara garis besar bertujuan untuk memperoleh data seperti:

- a. Latar belakang terjadinya hutang piutang.
- b. Bentuk akad hutang piutang tersebut.
- c. Penyelesaian sengketa hutang piutang ketika terjadi wanprestasi.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.⁹³ Adapun dokumen yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah:

- a. Peta Kabupaten Barito Timur
- b. Peta Demografi Masyarakat Talohen Hulu
- c. Visi dan Misi Kabupaten Barito Timur

⁹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...., hal. 135.

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XVIII, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 84.

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,...hal. 241.

G. Pengabsahan Data

Keabsahan data adalah mampu menjamin semua data yang diteliti sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Pihak-pihak yang berada di Desa Talohen Hulu adalah pihak yang berperan penting dalam penentuan keabsahan data. Keabsahan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai perbandingan. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Triangulasi sumber*. Menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Maleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* mengatakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan :⁹⁴

1. Membandingkan hasil pengamatan dan hasil wawancara yaitu membandingkan hasil observasi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan para subjeknya yaitu pihak kreditur dan debitur yang melakukan transaksi utang piutang.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen apabila hal tersebut saling berkaitan atau diperlukan.

⁹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... hal. 178.

H. Analisis Data

Semua teknis analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara ataupun *focus group discussion*. Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya pula menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data.⁹⁵

Bogdan Menyatakan bahwa:

“Data Analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others” Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹⁶

Menganalisis data ada beberapa langkah yang akan ditempuh:

1. *Collections* atau pengumpulan data adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. *Reduksi* data atau pengurangan data merupakan analisa data dengan cara menggolongkan, menajamkan, memilih data mana yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembahasan.
3. *Display* data atau penyajian data ialah data yang sudah direduksi tersebut disajikan kedalam bentuk laporan.

⁹⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*,...hal. 78.

⁹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*...,hal. 244.

4. *Verifikasi* atau penarikan kesimpulan, dimana setelah data semuanya diperoleh kemudian mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.⁹⁷

⁹⁷ Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* terjemah Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, hal. 15-21.

BAB IV PEMAPARAN DATA

A. Selayang Pandang Kabupaten Barito timur

Barito Timur adalah nama secara resmi ditetapkan bagi daerah ini setelah terbentuk menjadi daerah kabupaten otonom sejak tahun 2002. Sebelumnya, daerah ini masih bergabung dengan Kabupaten Barito Selatan. Seiring dengan semangat otonomi daerah, maka masyarakat Barito Timur mengusulkan dibentuknya kembali Kabupaten Barito Timur. Sebelumnya, Barito Selatan dikenal dengan nama Barito Hilir dengan luas wilayah 8.287,57 km² sepanjang kiri kanan aliran sungai Barito, dan Barito Timur dengan luas 3.013 km² meliputi daratan sebelah timur sungai Barito. Berdasarkan pembagian wilayah Administratif Pemerintah pada waktu itu, wilayah Barito Hilir dan Barito Timur adalah wilayah Kewedanaan dari Kabupaten Barito yang pusat pemerintahannya berkedudukan di Muara Teweh. Kedua wilayah kewedanaan tersebut adalah :⁹⁸

1. Kewedanaan Barito Hilir, ibukotanya : Buntok.
2. Kewedanaan Barito Timur, ibukotanya : Tamiang Layang.

Tuntutan masyarakat dari kedua Kewedanaan ini agar Kabupaten Barito dipisahkan menjadi dua kabupaten, akhirnya mendapat dukungan DPRD Barito pada tahun 1956 dalam bentuk mosi tanggal 30 Januari 1956 No. 1/MS/DPRD/56 dan tanggal 21 September 1956 No. 2/MS/DPRD/56. Selain itu tuntutan masyarakat ini dituangkan pula dalam surat dukungan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito, dengan suratnya tanggal 23 April 1958 No. 675/UP-IV-4.

⁹⁸ Website, *Barito Timur*, [Http://www.baritotimurkab.go.id/hal-Geografis.html](http://www.baritotimurkab.go.id/hal-Geografis.html). diakses pada tanggal 25 juni 2016.

Sambil menunggu ketetapan dari Pemerintah Pusat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan (SK) tanggal 10 Juni 1958 no. 28/Des-1-4/58 ditunjuk Wedana Barito Hilir disamping tugasnya untuk mengadakan persiapan-persiapan seperlunya.⁹⁹

Realisasi dari SK ini, maka pada tanggal 5 September 1958 dengan resmi terbentuknya Kantor Persiapan Kabupaten yang berkedudukan di Buntok. Tahun 1959 keluarlah Undang-undang No.27 tahun 1959 yang berlaku sejak tanggal 4 Juli 1959, Dalam Undang-undang ini ditetapkan antara lain Kewedanaan Barito Hilir dan Kewedanaan Barito Timur dijadikan Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Barito, dengan nama Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Buntok. Secara formal Kabupaten Barito Timur terbentuk bersama-sama dengan beberapa Kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah pada tahun 2002 dengan nama Kabupaten Barito Timur dengan Ibukota Tamiang Layang.¹⁰⁰

Kabupaten Barito Timur yang beribukota di Tamiang Layang terletak antara 1° 2' Lintang Utara dan 2° 5' Lintang Selatan, 114° dan 115° Bujur Timur yang diapit oleh kabupaten tetangga yaitu Sebelah Utara dengan Wilayah Kabupaten Barito Selatan, disebelah Timur dengan sebagian Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, di Sebelah Selatan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan serta di Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

⁹⁹ [Http://www.barito-timur.kab.go.id/hal-sejarah.html](http://www.barito-timur.kab.go.id/hal-sejarah.html), diakses pada tanggal 25 juni 2016.

¹⁰⁰ *Ibid.*

Luas Wilayah Kabupaten Barito Timur tercatat seluas 3.834 km² yang meliputi sepuluh (10) kecamatan. Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Paju Epat merupakan kecamatan terluas, masing-masing 867,70 km² dan 664,30 km² atau luas kedua kecamatan tersebut mencapai 40,15 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Barito Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Timur adalah merupakan dataran rendah yang ketinggiannya berkisar antara 50 s/d 100 meter dari permukaan laut, kecuali sebagian Wilayah Kecamatan Awang dan Kecamatan Patangkep Tutui yang merupakan daerah perbukitan. Dengan tidak adanya sungai besar dan banyaknya sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Barito Timur.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Timur beriklim tropis dengan rata-rata mendapat penyinaran matahari lebih dari 50% sepanjang tahun. Udaranya relatif panas yaitu pada siang hari bisa mencapai 34,6°C dan pada malam hari mencapai 21,0°C, sedangkan rata-rata curah hujan pertahunnya relatif tinggi yaitu mencapai 228,9 mm.¹⁰¹

Kabupaten Barito timur Ibu kota tamiang Layang terdiri dari 10 kecamatan, 3 kelurahan dan 150 desa salah satunya adalah kecamatan Dusun Tengah yang terdiri dari 9 kelurahan/desa yaitu:¹⁰² Saing, Rodok, Ampah Dua, Putai, Netampin, Muara Awang, Sumber Garunggung dan Dambung dan salah satunya adalah Kelurahan/Desa Ampah kota yaitu berjarak 276 km di sebelah

¹⁰¹ [Http://www.barito timur kab.go.id/hal-Letak-Geografik.html](http://www.barito-timur.kab.go.id/hal-Letak-Geografik.html), diakses pada tanggal 25 juni 2016.

¹⁰² Dokumentasi data Penduduk dan Luas Wilayah Kecamatan dusun tengah

utara Kota Banjarmasin dan 47 km dari Tamiang Layang.¹⁰³ Ampah kota merupakan nama ibu Kota Kecamatan Dusun Tengah, juga terkenal sebagai pusat perekonomian di wilayah Kabupaten Barito Timur. hal ini dikarenakan Kecamatan Dusun Tengah merupakan sentra pertanian, sentra lintasan yang dikenal sebagai segitiga emas Ampah serta pusat perdagangan.¹⁰⁴ Asal muasal kota Ampah Kata “Ampah” itu di ambil dari Puluhan Batang-batang kayu yang larut dan menumpuk pada hilir Sungai. dari *fenomena* alam itu diambilah oleh penduduk Kata “Ampah” yang berarti Air yang mengalirkan sebuah batang kayu yang besar adalah sebagai perbauran Hidup, dan batang kayu yang besar tersebut disimbolkan sebagai “Pemerintahan yang Kokoh”. itulah sebabnya kata Ampah itu di ambil Pemerintah sebagai nama Sebuah Kota. Hingga sekarang tetap menjulang dan semakin berkembang yakni yang dikenal sebagai “Kota Ampah”¹⁰⁵ Adapun yang menjadi Visi dan Misi kabupaten Barito Timur yaitu sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Visi

Visi adalah gambaran mengenai kondisi ideal yang diinginkan *stakeholders* pada masa yang akan datang. Dengan Visi yang jelas, akan menjadi petunjuk bagi setiap jajaran (*stakeholders*) di Kabupaten Lamandau dalam menyongsong masa depan. Visi akan menentukan arah “akan dibawa kemana” Kabupaten Barito Timur dalam akhir perencanaan pembangunan.

¹⁰³https://id.wikipedia.org/wiki/Ampah_Kota,_Dusun_Tengah,_Barito_Timur diakses pada tanggal 11 Mei 2016.

¹⁰⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Dusun_Tengah,_Barito_Timur, diakses pada tanggal 11 Mei 2016.

¹⁰⁵ Briyudistira, *ampah kota*, <https://briyudistira.wordpress.com/2010/10/23/ampah-kota/>

¹⁰⁶ <http://www.baritotimurkab.go.id/hal-visi-dan-misi.html>, diakses pada tanggal 25 juii 2016.

Visi Kabupaten Barito Timur tidak lepas dari Visi yang dirumuskan secara Nasional dalam RPJM-N Tahun 2009 - 2014 yaitu : “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan.”

Selanjutnya disinkronkan dengan Visi Provinsi Kalimantan Tengah seperti tertuang dalam RPJM-D Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 yaitu : “Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

Berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta prakiraan akan tantangan dan peluang di masa depan, maka Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 - 2018, adalah : “Terwujudnya Barito Timur yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Berwibawa dengan Berorientasi Ekonomi Kerakyatan.”

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi daerah tersebut diatas, ditempuh melalui misi daerah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggungjawab.
- b. Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan Jembatan untuk menunjang Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan, serta Percepatan Pembangunan Desa melalui

Konsep Mandiri Pedesaan (*Ngamuan Tumpuk*) dengan pola Transparan dan Aspiratif.

- c. Meningkatkan Penataan Kesehatan Masyarakat, meliputi Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar, Peningkatan Kualitas/Kuantitas Tenaga Kesehatan.
- d. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, melalui Peningkatan Mutu Pendidikan (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, buku pelajaran dan kualitas tenaga pengajar).
- e. Pengembangan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kearifan Lokal Masyarakat dengan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.
- f. Pemberdayaan Masyarakat melalui Konsep Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi UMKM.
- g. Pembinaan Umat Beragama, Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya.

B. Lingkungan Alam Lokasi Penelitian RT 28 Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota

Ampah kota terdiri dari 42 RT.¹⁰⁷ Salah satunya adalah RT 28 Talohen Hulu adalah kampung terpencil yang terdiri dari 128 KK dan 450 Warga.¹⁰⁸ Keadaan alam dengan daratan yang tinggi dan disebut sebagai daerah perbukitan. Keadaan alam yang seperti ini mendukung kehidupan masyarakat disana dengan cara bertani dan juga berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat.

¹⁰⁷ Dokumentasi dari data kelurahan Ampah Kota.

¹⁰⁸ Hasil wawancara langsung dengan ketua Rt 28 Talohen Hulu, Pada tanggal 26 Januari 2016.

Masyarakat disana kebanyakan bertani padi yang panen 2 kali dalam setahun dan berkebun tumbuhan karet sebagai sumber utama pendapatan masyarakat. Penduduknyapun mayoritas muslim, namun pendidikan masyarakat disana masih kurang. Walaupun demikian sikap kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat disana tergolong tinggi.

C. Gambaran Tentang Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang yaitu pihak kreditur (Pihak yang menghutangkan) dan pihak debitur (Pihak yang berutang) di Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota. Berikut peneliti uraikan subjek tersebut :

Identitas Subjek dari pihak kreditur:

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Lamanya sebagai kreditur
1	KR	42	Petani	2 tahun
2	DR	45	Pedagang	1 Tahun
3	LH	62	Petani	1 Tahun

Sumber: Diolah oleh peneliti

Identitas Subjek dari pihak Debitur :

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Motif Berutang
1	RM	48 Tahun	Petani	Keperluan Fasilitas Anak Sekolah
2	SR	33 Tahun	Pedagang	Modal Usaha
3	RA	31 Tahun	Pedagang	Modal Usaha
4	JT	42 Tahun	Petani	Keperluan Fasilitas Anak Sekolah

Sumber: Diolah oleh peneliti

D. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Masyarakat Talohen Hulu

1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Hutang Piutang

Hutang piutang adalah kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam sebagai perwujudan sikap saling tolong menolong antar sesama warga. Sering

kali berutang adalah salah satu cara yang cepat untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan dalam kehidupan tiap individual bahkan berutang bisa dilakukan dengan cara berulang-ulang kali. Adapun yang menjadi alasan berutang masyarakat Talohen Hulu, berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu RM yang berusia 48 tahun dan berprofesi sebagai petani sekaligus kepala rumah tangga mengatakan bahwa:

“Samalam sakali lah bahutang ya Rp 3.000.000 jutalah, aku jadi bahutang lawan si anu ya kapepet jua samalam tu sagan mambayar kreditan sapida motor anaku sakulah ulih jauh kan jua inya handak basepeda motor jua.”¹⁰⁹ (Kemarin satu kali berutang sebesar Rp 3.000.000, saya alasan berutang dengan itu ya terdesak juga kemarin itu untuk membayar kredit sepeda motor anak sekolah karena jauh dia ingin bersepeda motor juga).

Pernyataan Ibu RM, dapat dipahami bahwa beliau pernah melakukan utang atau peminjaman satu kali sebesar Rp 3.000.000, alasan berutang karena kebutuhan yang mendesak atau kepepet untuk membayar kreditan sepeda motor anaknya yang sekolah karena jarak antara rumah dan sekolahnya juga jauh oleh sebab itu anaknya berkeinginan untuk menggunakan sepeda motor.

Alasan yang serupa juga dinyatakan oleh Ibu JT yang berusia 42 tahun dan berprofesi sebagai petani bahwa beliau mempunyai alasan tersendiri untuk lebih memilih berutang, berikut keterangan ibu JT:

“Suah sakali bahutang lawan DR samalam aku bahutang Rp 1.000.000 haja pang, aku jadi bahutang kasitu ya mandasak samalam gasan kaparluan anak ku sakulah sagan inya manukar sapida tinjak napa nang pas itu aku lagi kadada baduit manukar akan. Sakulah ngalih mun kadada sapida, sapidanya nang ada sudah rusak.”¹¹⁰ (Pernah sekali berutang dengan DR kemarin saya berutang Rp 1.000.000 saja, saya jadi berutang ke tempat itu karena mendadak kemarin untuk keperluan

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu RM, Pada tanggal 13 Mei 2016.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu JT, Pada tanggal 14 Mei 2016.

anak saya sekolah untuk membeli sepeda karena waktu itu saya tidak mempunyai uang untuk membelikan. Sekolah sulit kalau tidak menggunakan sepeda karena sepeda yang telah ada sudah tidak bisa digunakan).

Pernyataan Ibu JT, dapat dipahami bahwa beliau pernah meminjam uang satu kali dengan bapak DR sebesar Rp 1.000.000 alasan berutang adalah untuk keperluan mendadak anaknya sekolah membeli sepeda karena waktu itu beliau tidak ada uang untuk membelikannya. Namun selain dari alasan tersebut adapula alasan lain masyarakat Talohen Hulu melakukan hutang piutang berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu SR yang berusia 33 tahun sebagai pedagang mengatakan bahwa:

Suah bahutang sakali lawan KR tu Rp 20.000.000 lah sagan manambah modal bausaha gatah sagan badagang.”¹¹¹ (Pernah berutang dengan KR Rp 20.000.000 untuk menambah modal usaha karet untuk berdagang).

Pernyataan Ibu SR, dapat dipahami bahwa pernah melakukan utang piutang satu kali dengan nominal Rp 20.000.000 yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk menambah modal usaha berdagang karet. Alasan yang sama juga dinyatakan oleh Ibu RA yang berusia 31 tahun dan berprofesi sebagai petani berikut keterangan dari Ibu RA:

“Suah babarapa kali bahutang lain-lain urangnya lah mun lawan anu tu ngalih pang manyambat ngarannya lah bahutang Rp 8.000.000 juta gasan nang bausaha batukar gatah.”¹¹² (Pernah berutang beberapa kali beda-beda orang jika dengan dia sulit menyebutkan namanya berutang sebesar Rp 8.000.000 juta untuk usaha membeli karet).

Pernyataan Ibu RA, dapat dipahami bahwa pernah beberapa kali melakukan utang piutang dan tempat peminjaman tersebut beda-beda, beliau

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu SR, Pada tanggal 15 Mei 2016.

¹¹² Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 17 Mei 2016.

berutang dengan salah satu kreditur sebesar Rp 8.000.000 untuk modal usaha membeli karet. Kemudian biasanya kebanyakan dari orang lebih memilih berutang ke tempat yang lebih praktis dan cepat dalam artian prosesnya cepat dan persyaratannya tidak sulit apalagi jika dalam kondisi yang segera atau ingin cepat, berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu RM mengatakan bahwa:

“ya kada ku tahu jua oleh kapepet samalam handak capat jua amun bahutang ka bank lah kada tapi tahu jua samalam kayapa di bank tu mana lawas jua urusannya amun ngini kan sasama dikampung jua nyaman urusannya.”¹¹³ (Iya tidak tahu karena mendesak kemarin ingin cepat jika berutang ke bank tidak terlalu mengetahui kemarin bagaimana di bank juga lama prosesnya kalau yang ini oleh karena sesama di kampung juga jadi prosesnya lebih mudah).

Pernyataan dari Ibu RM, dapat dipahami bahwa alasan berutang kepada Ibu KR karena kebutuhan yang mendesak untuk membayarkan kredit fasilitas sekolah anaknya memerlukan uang yang cepat, jika sesama kampung prosesnya lebih mudah sementara untuk meminjam di bank belum terlalu mengetahui tentang bank dan prosesnya juga lama. Hal demikian juga dikatakan oleh Ibu JT bahwa:

“Ya ulihnya mandasak tadi pang tapaksa ai kasitu, amunnya ka bank kan urusannya lain lagi tangalih syaratnya mana lambat kami handak capat jua makai duitnya.”¹¹⁴ (Karena mendesak kemudian terpaksa ke tempat itu, jika ke bank urusannya berbeda lagi sulit syaratnya juga lama kami ingin cepat juga menggunakan uangnya).

Pernyataan dari Ibu JT, dapat dipahami bahwa alasan meminjam uang ketempat tersebut karena kebutuhan yang mendesak, Sementara meminjam

¹¹³ Hasil wawancara dengan Ibu RM, Pada tanggal 13 mei 2016.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu JT, Pada tanggal 14 Mei 2016.

uang di perbankan itu urusannya berbeda lagi cukup sulit dan prosesnya lama.

Hal serupa turut didukung oleh Ibu RA yang mengatakan bahwa:

“Ya kanapakah sumalam amun lawan sasama urang kampung ni nyaman ja pang urusannya lakas haja kaluar duitnya, amun di bank tangalih uyuh lagi urusannya.”¹¹⁵ (Ya kenapa tidak tau juga kemarin jika dengan sesama warga kampung urusannya lebih mudah, kalau di bank sulit lagi urusannya)

Pernyataan Ibu RA, dapat dipahami bahwa jika meminjam uang dengan orang dikampung urusannya lebih mudah dan uangnya cepat sementara kalau meminjam di perbankan perlu waktu dan urusannya sedikit sulit. Kemudian selain hal tersebut ada faktor lain yang menyebabkan seseorang lebih memilih berutang berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu JT yang mengatakan bahwa:

“Oleh kan kadada baduit pas itu tabungan kadada jua awak saurang jua gawian petani saapa ada ah, paksa ai bahutang.”¹¹⁶ (Karena kan tidak ada uang waktu itu tabungan tidak ada saya juga bekerja sebagai petani tidak seberapa penghasilan, terpaksa untuk berutang).

Pernyataan Ibu JT, dapat dipahami bahwa tidak ada cara lain selain berutang alasannya karena tidak mempunyai tabungan dan pekerjaan hanya sebagai petani penghasilan yang tidak seberapa terpaksa memutuskan untuk berutang. Kemudian lanjut Ibu JT mengatakan tentang penghasilannya bahwa:

“Aku saminggu lah paling Rp 300.000 oleh gawian manurih tadi gatah murah Rp 6.000/kg dapat saminggunya 40-50kg ja. Balum lagi gasan kaparluan lainnya, kurang.”¹¹⁷ (Saya perminggu Rp 300.000 karena pekerjaan petani karet, harga karet murah Rp 6.000/kg mendapatkan satu minggu 40-50 kg saja. Belum untuk keperluan yang lainnya).”

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 17 Mei 2016.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu JT, Pada tanggal 14 Mei 2016.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu JT, Pada tanggal 13 Oktober 2016.

Pernyataan Ibu JT, dapat dipahami bahwa penghasilan dalam satu minggu hanya Rp 300.000 karena pekerjaan hanya sebagai petani karet, belum untuk keperluan yang lainnya dan penghasilan tersebut terbilang kurang.

Kemudian biasanya seorang berani berutang karena uang yang dipinjam untuk kebutuhan konsumtif segera tidak ada cara lain dan untuk kegiatan produktif yang hanya melihat dari segi *profit* saja tanpa ada *planning* ke depan cara manajemen keuangan jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya *prestasi*. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu JT mengatakan bahwa:

“Kadada ai ah mamikirkan, ulih nang handak lakas tadi gasan anak sekolah kayapa kah mambayarnya kaina urusan kaina.”¹¹⁸ (Tidak ada memikirkan karena ingin cepat untuk keperluan anak sekolah bagaimana membayar itu urusan nanti).”

Pernyataan dari Ibu JT, dapat dipahami bahwa Ibu JT tidak memikirkan bagaimana resiko kedepan membayar utangnya itu urusan nanti yang terpenting keperluan anaknya sekolah sudah terpenuhi. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu RA yang mengatakan bahwa:

“Kadada ai ah oleh dikira tadi nyaman ja usaha tadi tu sakalinya ngini kadada lagi pamasukan gara-gara badagang gatah tadi murah harganya.”¹¹⁹ (Tidak ada karena memperkirakan mudah saja usaha tadi ternyata ini tidak ada lagi pendapatan penyebabnya berusaha karet tadi harga murah).

Pernyataan Ibu RA, dapat dipahami bahwa beliau tidak ada memikirkan bagaimana resiko kedepan membayar utangnya karena tidak ada memprediksi kalau usaha yang beliau jalankan akan mengalami hambatan yang

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu JT, Pada tanggal 14 Mei 2016.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 17 Mei 2016.

menyebabkan tidak adanya pendapatan lagi atau mengalami kebangkrutan. Terkait masalah penghasilan berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu JT berprofesi sebagai petani mengatakan bahwa:

“Aku saminggu lah paling Rp 300.000 oleh gawian manurih tadi gatah murah Rp 6.000/kg dapat samingguanya 40-50 kg ja. Balum lagi gasan kaparluan lainnya, kurang.”¹²⁰ (Saya perminggu Rp 300.000 penghasilan pekerja petani karet, harga karet murah Rp 6.000/kg mendapatkan satu minggu 40-50 kg saja. Belum untuk keperluan yang lainnya).”

Pernyataan Ibu JT, dapat dipahami bahwa penghasilan beliau Rp 300.000/perminggu sebagai petani dan penghasilan tersebut belum cukup sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu RA sebagai berikut:

“Oleh gawian bawarung ni paling saminggu tu pamasukan sekitar Rp 200.000-300.000 bersihnya. Ngintu gin kada cukup nah gasan kaparluan nang banyak ngini.”¹²¹ (Karena pekerjaan berdagang paling satu minggu pendapatan sekitar Rp 200.000-300.000 pendapatan bersih. Itu juga tidak cukup untuk keperluan yang banyak ini).

Pernyataan Ibu RA, dapat dipahami bahwa pendapatan bersih selama satu minggu sekitar sekitar Rp 200.000-300.000 dan itu belum cukup memenuhi keperluan beliau yang banyak. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak pemberi pinjaman terkait pemberian hutang Ibu KR yang berusia 47 tahun dan berprofesi sebagai petani sekaligus kreditur mengatakan bahwa:

“Ada kalo nang handak mainjam Rp 20.000.000 gasan bausaha jadi ujar urang tu kaina mambari Rp 1.000.000 perbulannya nah jadi hakun aku mainjami tu tadi. Oleh kada ku hakun jua mainjami kaitu wara.”¹²² (Ada kan yang ingin meminjam Rp 20.000.000 untuk usaha jadi kata orang itu nanti saya memberi Rp Rp 1.000.000/perbulan jadi saya membolehkan meminjamkan. Karena tidak mau saya meminjamkan begitu saja).

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu JT, Pada tanggal 13 Oktober 2016.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 14 Oktober 2016.

¹²² Hasil wawancara dengan Ibu KR, Pada tanggal 18 mei 2016.

Pernyataan Ibu KR, dapat dipahami bahwa beliau mau meminjamkan uang alasannya karena diberikan kompensasi dari pihak debitur (penerima pinjaman) sebesar Rp 1.000.000 perbulannya.

2. Bentuk Akad Hutang Piutang

Akad dalam sebuah perjanjian perikatan sangat diperlukan agar perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik kalau tidak ada akad perjanjian kemungkinan tidak sah. Adapun bentuk dari akad hutang piutang di kalangan masyarakat Talohen Hulu berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu KR yang berusia 47 tahun dan berprofesi sebagai petani mengatakan bahwa:

“Amun yang datang kasini tu lah bapadah lawan aku cil adakah duit jar. Ujar ku ada ai. Kanapa jar ku handak bahutang ai jar kawa kah jar. Kawa ai jar ku.”¹²³ (Kalau yang datang ke tempat ini berbicara dengan saya apakah ada uang. Kata saya ada, kenapa ? kata orang tersebut ingin meminjam. Kata saya boleh saja).”

Pernyataan Ibu KR, dapat dipahami bahwa ketika ingin meminjam ada perkataan ingin berutang dan pihak meminjam mau meminjamkan. Hal demikian turut disampaikan oleh Ibu SR yang mengatakan bahwa:

“Sebelumnya aku batakun dahulu”ada duitlah cil ujar ku” ujar sidin gasan apa ? Handak bahutang ai ah jar ku. Ada ai jar sidin. Ih kawa ai ujar.”¹²⁴ (Sebelumnya saya bertanya terlebih dahulu”apakah ada uang kata saya kepada yang memberikan pinjaman ?” Kata beliau untuk apa? Ingin berutang kata saya. Ada kata beliau. Bisa saja berutang).

Pernyataan Ibu SR, dapat dipahami bahwa sebelumnya ada perkataan berutang dari saya dan mengutangi dari pihak kreditur sebelum melakukan

¹²³ Hasil wawancara dengan Ibu KR, Pada tanggal 18 mei 2016.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu SR, Pada tanggal 15 mei 2016.

perjanjian utang piutang. Kemudian biasanya hutang piutang menentukan persyaratan tertentu yang dimuat dalam perjanjian berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu LH yang berusia 62 tahun dan berprofesi sebagai petani mengatakan bahwa:

“Aku mahutang urang tapi syaratnya perbulan 10% amun bajaminan kadada pang lah kada bajanji waktu itu oleh istilah kita percaya haja pang lawan urang mana nang mainjam sasama kaluarga jua.”¹²⁵ (Saya menghutangkan orang tetapi persyaratannya 10 % perbulannya namun jaminan tidak ada karena tidak ada perjanjian waktu itu karena percaya saja dengan orang apalagi yang meminjam sesama keluarga juga).

Pernyataan dari Ibu LH, dapat dipahami bahwa beliau memberikan pinjaman dengan syarat angsuran perbulan sebesar 10 % masalah jaminan itu tidak ada terserah saja karena tidak ada melakukan perjanjian jaminan waktu itu karena hanya bermodal percaya saja sebab yang meminjam termasuk keluarga juga. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu RA mengatakan bahwa:

“Bayar kita lawan urang 10% han perbulan tu jaka kita lah mainjam 2 juta han 200 sabulannya jar urang tulah pandernya sakian buhan kam mambari aku ayu ai ah jar kami ngaran saurang parlu duit ju tulah han bisa ja kalo kam mahitungnya.”¹²⁶ (Membayar dengan orang 10% perbulan seperti kita meminjam Rp 2.000.000 kan Rp 200.000 satu bulan kata orang berbicara sekian kalian memberi saya, iya kata kami karena kami juga perlu uang tersebut kamu bisa saja kan menghitungnya).

Pernyataan Ibu RA, dapat dipahami bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut adanya perjanjian tertentu yaitu bunga sebesar 10% perbulannya dengan berkata segini kalian harus memberi saya perbulan dan dari pihak Ibu RA mengiyakan karena memerlukan uang tersebut. Kemudian

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu LH, Pada tanggal 16 Mei 2016.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 17 Mei 2016.

hal demikian juga turut didukung oleh Bapak DR yang berusia 45 tahun dan berprofesi sebagai pedagang mengatakan bahwa:

“Hi ih ada, ada kan nang mainjam Rp 1.000.000 sumalam itu saminggunya inya harus mambari Rp 25.000, oleh kan jadi mainjami urang bacari kahujungan jua.”¹²⁷ (Iya ada, ada yang meminjam Rp 1.000.000 kemarin itu satu minggu dia harus memberi Rp 25.000, alasan meminjamkan orang karena untuk mencari keuntungan).

Pernyataan dari Bapak DR, dapat dipahami bahwa beliau meminjamkan uang kepada debitur pernah sebesar Rp 1.000.000 dengan syarat pihak peminjam harus memberikan imbalan perminggunya Rp 25.000 tujuan beliau meminjamkan uang adalah untuk memperoleh keuntungan. Terkait hal demikian kreditur lain yaitu Ibu KR juga mengatakan bahwa :

“kadada ai yah cuman pander urang mambari aku sabulan 1.000.000 lain bunga amun si SR tu bahutang samalam 20.000.000 juta pang kadada ai basarat-sarat tu tapilah kada ku hakun jua ah mahutangi urang kaya itu wara.”¹²⁸ (Tidak ada hanya bicara orang memberi saya satu bulan RP 1.000.000 bukan bunga jika Ibu SR berutang kemarin Rp 20.000.000 tidak ada syarat apa-apa tetapi saya tidak mau meminjamkan orang begitu saja).

Pernyataan Ibu KR, dapat dipahami bahwa dalam perjanjian utang piutang tidak ada persyaratan tertentu namun waktu itu ada orang berutang Rp 20.000.000 setelah itu debitur tersebut berkata Rp 1.000.000 memberi pihak kreditur tersebut karena dari pihak debitur juga mengatakan tidak mau meminjamkan begitu saja. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibu JT bahwa:

“Saminggunya kita ada bayar Rp 25.000 pang dari nang kita injam Rp 1.000.000 tadi.”¹²⁹ (Satu minggu sekali membayar Rp 25.000 dari pinjaman pokok Rp 1.000.000).

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak DR, Pada tanggal 19 Mei 2016.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu KR, Pada tanggal 18 Mei 2016.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu JT, pada tanggal 14 Mei 2016.

Pernyataan Ibu JT, dapat dipahami bahwa adanya persyaratan tertentu dalam akad yaitu pembayaran perminggu dari pokok pinjaman. Kemudian keterangan dari Ibu RM bahwa:

“Ada aku mainjam 3 jutalah saminggunya tu kita mambari urang 75.000 ribu kada kawa kada sabarataan tu sama haja amun kada kaya itu kada hakun urang mainjami lawan jua urang tu nang manyambat harus mambari sekian-sekian.”¹³⁰ (Ada saya meminjam Rp 3.000.000 satu minggunya memberi orang Rp 75.000 ribu tidak bisa tidak semua sama saja kalau tidak seperti itu tidak mau orang meminjamkan dengan juga orang tersebut berkata harus memberi sekian-sekian).

Pernyataan Ibu RM, dapat dipahami bahwa persyaratan utang piutang itu ada seperti beliau yang meminjam uang Rp 3.000.000 namun perminggunya harus membayar Rp 75.000 tidak bisa tidak karena semua sama sistemnya kalau tidak seperti itu dari pihak kreditur tidak mau meminjamkan uangnya. Kemudian selain hal tersebut terkait masalah pencatatan dan jaminan, berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu LH mengatakan bahwa:

“Samalam itu pang bacatat pakai kwitansi haja siapa nang mainjam lawan barapa hutangnya matrai sudah. Masalah jaminan kadada jua. Oleh percaya ja kan kadada ai ah nang lain han parcaya ja tadikan.”¹³¹ (Kemarin itu ditulis menggunakan kwitansi siapa nama berutang, berapa nominal hutang dan materai. Masalah jaminan tidak ada karena percaya saja tidak ada yang lain percaya saja tadi itu).

Pernyataan Ibu LH, dapat dipahami bahwa bentuk akad utang piutang tersebut dalam bentuk tertulis yaitu dicatat menggunakan kwitansi siapa nama pengutang, nominal hutang dan materai. Masalah jaminan juga tidak ada

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu RM, Pada tanggal 13 Mei 2016.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Ibu LH , Pada tanggal 16 Mei 2016.

karena percaya saja dengan orang yang berutang. Juga didukung oleh debitur lainnya Ibu RA yang mengatakan:

“Ampun orang bacatat samalam tu pakai kwitansi amun kada kaya itu kada mau urang kadada bajaminan pang bisa haja tapikan kita harus bayar bunganya 10 % tadi kada kawa pang kita ngarannya bahutang lah amun kada kaya itu bisa kada mau urang mahutangi.”¹³² (Kepunyaan orang dicatat kemarin jika tidak seperti itu orang tidak mau, tidak ada jaminan tetapi kita harus bayar bunganya 10% tadi tidak bisa kita namanya berutang kalau tidak seperti itu kemungkinan orang tidak mau meminjamkan).

Pernyataan Ibu RA, dapat dipahami bahwa akad atau perjanjian utang piutang tersebut dicatat menggunakan kwitansi sebab jika tidak seperti itu pihak dari yang meminjamkan tidak mau dan tidak menggunakan jaminan bisa namun harus membayar bunganya perbulan sesuai yang diminta oleh pihak pemberi pinjaman (kreditur). Kemudian didukung juga oleh Ibu RM yang mengatakan bahwa:

“Bacatatat ampun urang pakai kwitansi han ngalih banar ai ah amun kada pakai ngintu.”¹³³ (Dicatat kepunyaan orang menggunakan kwitansi sulit kalau tidak menggunakan itu)

Pernyataan Ibu RM, dapat dipahami bahwa akad utang piutang tersebut dicatat menggunakan kwitansi kalau tidak seperti itu urusannya akan sulit. Selain hal demikian ada yang menggunakan jaminan sebagai formalitas saja. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu KR yang mengatakan bahwa:

“Bacatatat ba kwitansi nama nang bahutang, barapa hutang urang. Batulis gadai karet di kwitansinya jua tapi dari pada haja pang. Amun urang bamasalah nang kada kawa bayar kada suah pang aku manggugatnya tulisan gadai tu. Oleh parcaya ja ah sasama urang

¹³² Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 17 Mei 2016.

¹³³ Hasil wawancara dengan Ibu RM, Pada tanggal 13 Mei 2016.

kampung jua.”¹³⁴ (Ditulis menggunakan kwitansi nama yang berutang, berapa nominal hutang. Ditulis gadai karet juga namun formalitas saja. Jika orang bermasalah yang tidak bayar tidak pernah saya gugat penulisan barang gadai, karena percaya saja sesama orang kampung juga).

Pernyataan dari Ibu KR, dapat dipahami bahwa bentuk akadnya ditulis menggunakan kwitansi siapa nama pengutang, berapa nominal hutang peminjam dan adanya barang gadai namun hanya formalitas tidak untuk diambil/gugat ketika terjadi masalah pembayaran. Dan percaya saja karena yang meminjam sesama warga kampung juga bukan orang jauh. Namun dalam perjanjian tersebut ada saja yang hanya lewat lisan saja berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak DR :

“Pander haja, amun masalah bajaminan kadada pang. Olehkan sasama urang kita haja tadi kadada nang jauh jadi percaya haja, orangnya nang mainjam dapat dipercaya haja ulih lawas kenal jua kan patuhan haja tu”¹³⁵ (Lisan saja, kalau masalah jaminan tidak ada. Karena orang sesama kita juga tidak ada yang jauh jadi percaya saja. Orang yang meminjam dapat dipercaya saja karena lama kenal juga kan tidak asing).

Pernyataan dari bapak DR, dapat dipahami bahwa akad utang piutang tersebut lisan saja dan masalah jaminan tidak ada dimuat dalam perjanjian karena percaya saja dengan orang yang meminjam. Hal demikian juga turut didukung oleh Ibu JT yang mengatakan bahwa:

“Samalam tu pander haja pang. amun masalah jaminan kadada jua.”¹³⁶ (Kemarin lewat lisan saja. Jika masalah jaminan tidak ada).

Pernyataan Ibu JT, dapat dipahami bahwa akad tersebut hanya berbentuk lisan dan masalah jaminan tidak dimuat dalam akad. Kemudian

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu KR , Pada tanggal 18 Mei 2016.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak DR, Pada tanggal 19 Mei 2016.

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu JT, pada tanggal 14 Mei 2016.

mengenai masalah waktu tempo pembayaran berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu LH yang mengatakan bahwa:

“kadada bajanji waktu han amun anu urang bayar sabulan kan catat kami tiap bulan tu pang bayar kaya itu ai ah kadada sagala bajanji sa’apa waktunya tasarah haja kan asal sabulannya tadi bayar.”¹³⁷ (Tidak ada berjanji waktu jika orang membayar satu bulan ditulis kami setiap bulan itu seperti itu tidak ada perjanjian kapan waktu bebas saja namun perbulan yang di tetapkan harus di bayar).

Pernyataan Ibu LH, dapat dipahami bahwa perjanjian utang piutang tersebut tidak menggunakan batas waktu tempo pembayaran, karena berdasarkan asas kepercayaan saja dan yang terpenting persentase yang telah ditetapkan perbulan terbayarkan. Hal yang sama juga dikatakan oleh debitur Ibu RA :

“Nah kadada pang bawaktu cumankan lawas banar sudah bahutang satahunan labih hinggananya tu ya bayar parbulan tadi pang dicatat urang.”¹³⁸ (Tidak ada menggunakan batas waktu hanya lama sudah meminjam 1 tahun lebih hanya yang ada bayar perbulan kemudian dicatat orang).

Pernyataan Ibu RA, dapat dipahami bahwa tidak ada menggunakan batas waktu tempo namun sudah lama meminjam sekitar setahunan lebih namun ada pembayaran perbulan kemudian pembayaran tersebut dicatat. Hal tersebut juga disampaikan oleh debitur RM mengatakan bahwa:

“Kadada pang lah tasarah kita haja cuman kan kita harus bayar nang perminggu tadi catat urangkan bila sudah bayar tu urangnya batagihan karumah.”¹³⁹ (Tidak ada terserah kita saja hanya kita harus membayar yang perminggu tadi dicatat apabila sudah bayar orangnya menagih kerumah datang setiap minggunya).

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu LH , Pada tanggal 16 Mei 2016.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 17 Mei 2016.

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu RM, Pada tanggal 13 Mei 2016.

Pernyataa Ibu RM, dapat dipahami bahwa tidak ada menggunakan batas waktu tempo dalam pembayaran pinjaman namun setiap minggunya harus bayar bunga dan setiap minggu dari pihak pemberi pinjaman datang kerumah untuk menagih uang yang ia pinjamkan. Hal serupa juga didukung oleh kreditur Bapak DR yang mengatakan bahwa:

“kadada kada bawaktu-waktuan tasarah urang haja asalkan inya bayar nang perminggu tadi pang sudah ai ah.”¹⁴⁰(tidak ada berwaktu terserah saja asal dia membayar yang perminggu sudah).

Pernyataan dari bapak DR, dapat dipahami bahwa peminjaman tidak menggunakan batas waktu pembayaran terserah kepada debitur saja namun debitur harus membayar angsuran tambahan perminggunya yaitu Rp 25.000 dari pinjaman pokok Rp 1.000.000.

3. Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Ketika Terjadi Wanprestasi

Perjanjian utang piutang tidak dapat selalu berjalan dengan lancar adakalanya salah satu pihak melakukan pelanggaran tidak memenuhi prestasinya atau biasa disebut dengan *wanprestasi* sehingga menyebabkan terjadinya persengketaan antar pihak yang berserikat. Terkait perihal sengketa dikarenakan adanya penyebab tertentu sehingga melakukan *wanprestasi*. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu RA yang mengatakan bahwa:

“Suah lawas kada kawa bayar satahunan labih ya usaha gatah waktu itu kan larang jadi bahutang gasan modal pas kada lawas harga gatah murah lalu di stok urang balalu kada kawa bayar bunganya batambah tarus jadinya.”¹⁴¹(Pernah lama tidak bisa membayar sekitar satu tahun

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak DR, Pada tanggal 19 mei 2016.

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 21 Mei 2016.

lebih ya usaha karet waktu itu mahal jadi berutang untuk modal ketika tidak dapat membayar bunga bertambah terus akibatnya).”

Pernyataan Ibu RA, dapat dipahami bahwa beliau pernah tidak dapat membayar angsuran hutangnya selama satu tahun lebih dikarenakan usaha karet yang Ibu RA jalankan sedikit terhambat bahkan bangkrut karena harga karet nya murah dan banyak warga yang tidak mau menjual di stok menunggu harga mahal akhirnya utang beliau terus bertambah karena bunga tidak dapat dibayar. Hal demikian juga disampaikan oleh Ibu SR yang mengatakan bahwa :

“Suah 6 bulan aku kada kawa bayar gara-gara usaha ku waktu itu bangkrut oleh harga gatah murah balalu kadada lagi pamasukan kada kawa ku ma ada akannya amun kadada.”¹⁴²(Pernah 6 bulan tidak dapat membayar karena usaha saya waktu itu bangkrut karena harga karet murah kemudian tidak ada lagi pendapatan tidak bisa mengadakannya kalau tidak ada).

Pernyataan Ibu SR, dapat dipahami bahwa beliau pernah tidak dapat membayar angsuran utangnya selama 6 bulan dikarenakan usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan dan menyebabkan tidak adanya pemasukan jadi tidak dapat memaksakan untuk membayar hutangnya. Kemudian hal tersebut membuat pihak kreditur (orang yang memberikan pinjaman) emosi dan merasa dirugikan. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu SR mengatakan bahwa:

“Bah kada kisah ai kam sarik-sarik bahamuk manyumpah-nyumpah aku sagala di muka rumah tu sidin oleh sidin batagih pang karumah ni sating bulan kada tahu di bangkrut sagala apa kada paduli pang sidin pokoknya jar sidin buliki duit ku kayaitu pandernya.”¹⁴³(Tidak cerita ya marah-marah mengamuk mengata katakan saya segala di muka rumah itu beliau oleh beliau menagih kerumah ini setiap bulan

¹⁴² Hasil wawancara dengan Ibu SR, Pada tanggal 20 Mei 2016

¹⁴³ *Ibid.*

tidak peduli di bangkrut segala apa pokoknya kata beliau kembalikan uang saya seperti itu bicaranya).

Pernyataan Ibu SR, dapat dipahami bahwa ketika beliau tidak dapat membayar hutangnya membuat pihak kreditur marah-marah mengatakan beliau macam-macam karena pihak kreditur menagih datang kerumah setiap bulannya tidak peduli pihak debitur bangkrut atau tidak yang terpenting baginya adalah uangnya harus kembali beserta tunggakan perbulannya. Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu RA bahwa:

“Sarik-sarik urang datang karumah ni ada nang pamanderan tu kasar lah kada nyaman di dengar cuma ngalih ai lah nang ngaran hutang tu, bapander ai awak saurang pada nang kadada tu bulik ai sidin cuma itu tadi pang bunganya batambah tarus.”¹⁴⁴(Marah-marah orang datang ke rumah ini ada yang berkata itu kasar tidak enak di dengar hanya sulit ya yang namanya hutang itu, berbicara saya kalau tidak ada pulang beliau hanya itu bunganya bertambah terus).

Pernyataan dari Ibu RA, dapat dipahami bahwa ketika Ibu RA tidak dapat membayar utangnya pihak kreditur datang menagih kerumah dan marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kurang enak di dengar sementara Ibu RA tidak bisa berbuat apa-apa tidak dapat membayar utangnya karena usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan akhirnya dari pihak kreditur pulang namun hutang yang ditanggung Ibu RA terus bertambah karena tidak dapat membayar bunganya. Setelah hal demikian terjadi akhirnya sengketa tersebut diselesaikan dengan prinsip kekeluargaan antara pihak yang melakukan perjanjian. Berdasarkan keterangan dari Ibu RA yang mengatakan bahwa:

”Oleh urang batagih tarus lah awak saurang kada kawa lagi malabuh gatah han bunga batambah hutang batambah kan indungny kada kawa mambayar balalu kami bapander lawan sidin biar kada habut lagi kabun

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 21 mei 2016.

gatah kami disanda akan lawan urang nang bahutang tadi.”¹⁴⁵(Karena orang menagih terus saya tidak dapat lagi membeli karet bunga bertambah hutang bertambah pinjaman pokoknya tidak dapat membayar kemudian kami berbicara dengan pihak kreditur agar tidak ribut lagi kebun karet digadaikan dengan orang tempat berutang tadi).

Pernyataan Ibu RA, dapat dipahami bahwa ketika terjadi sengketa tidak dapat terpenuhinya janji sementara pihak kreditur menagih uangnya terus sementara usaha tidak dapat dijalankan lagi utang dan bunga terus bertambah dan pinjaman pokoknya tidak dapat terbayarkan akhirnya agar tidak ribut dan pihak kreditur tidak marah-marah lagi akhirnya berdiskusi dengan pihak kreditur dan menyerahkan kebun karet beliau untuk digadaikan sebagai pengganti utangnya. Kemudian lebih lanjut Ibu RA mengatakan bahwa:

“Kabun gatah nang disanda akan 2 hektaran sekitar 30-50 juta mun dijual tu. Disanda akan tu kada bawaktu-waktu an saapa lawan dimana kita kawa mambayar hutang tu ai kaina.”¹⁴⁶(Kebun karet yang digadaikan 2 hektar dengan harga sekitar 30-50 juta jika dijual. Digadaikan tidak berwaktu kapan kita mampu membayar hutang nantinya).”

Pernyataan Ibu RA, dapat dipahami bahwa kisaran harga kebun karet yang digadaikan sekitar 30-50 juta. Kebun karet yang digadaikan tidak ada pembatasan waktu kecuali Ibu RA dapat membayar hutangnya. Hal serupa juga turut di dukung oleh Ibu SR yang mengatakan bahwa:

“Ulih aku kada bayar kan sidin sarik-sarik kalo tadi nah lalu jar ku biar kada kicuh penyelesaiannya duit pian kada hilang kuandak kepondasi sarang walet usaha ku, sudah habis ranai sakalinya ada nang bapadah pada aku baputik hasil walet padahalnya walet tu balum ada hasilnya lagi amun kada manunggu satahun balalu sidin sarik-sarik lagi basumpah-sumpah tarus. Kaya apa jar ku amun kadada lagi kayapa aku ma ada akannya, balalu pander sidin pokoknya bulan 8 ni duitku harus dibuliki lawan nang perbulannya. Nah aku ni rancananya mun ada tu

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 19 Mei 2016.

¹⁴⁶ *Ibid.*

handak anu pang ku bayar sisa indungna nang Rp. 17.000.000, 3 jutanya sudah samalam olehkan minjamnya Rp 20.000.000 amun nang 6 bulan tu kada kubayar ulih kadada penghasilan ku lagi usaha tadi bangkrut sarang walet balum ada lagi hasilnya hanyar haja pang, ulih salama aku badagang gatah kadada maakali urang pang mun kuhitung Rp 23.000.000 aku sudah bayar nang perbulan tu hitungannya labih sudah. amun sidin hamuk lagi handak kubawai ai keatasan kapolisian sana tapi aku mambawa Rt pang dahulu, oleh syukur-syukur aku bayar indungna amun kaatasan sana lain lagi urusannya.”¹⁴⁷ (Karena tidak bayar tadi beliau marah-marah kemudian kata saya biar tidak ribut penyelesaiannya uang kamu tidak hilang saya taruh di pondasi sarang walet usaha saya, selesai setelah itu tenang kemudian ada yang menyampaikan kalau saya memungut hasil walet padahal walet belum ada hasil nya lagi kalau tidak menunggu satu tahun kemudian beliau marah-marah lagi. Gimana kata saya kalau memang tidak ada lagi gimana saya menyediakannya, kemudian kata beliau pokoknya bulan 8 ini uang saya harus di kembalikan beserta dengan perbulannya. Nah saya ini rencananya kalau ada mau saya bayar sisa pinjaman pokoknya saja Rp. 17.000.000, 3 juta sudah kemarin kaena ya total pinjaman Rp 20.000.000 kalau yang 6 bulan tidak saya bayar oleh tidak ada penghasilan lagi usaha tadi bangkrut usaha walet belum ada penghasilannya lagi baru saja , karena selama saya berdagang karet tidak ada membohongi orang kalau saya hitung totalnya Rp 23.000.000 saya sudah bayar yang perbulan itu totalnya lebih sudah. Kalau beliau marah-marah lagi ingin saya bawa keatasan pihak kepolisian tetapi saya membawa RT dulu, Karena syukur saya mau membayar pokoknya saja kalau keatasan sana beda lagi urusannya.

Pernyataan dari Ibu SR, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa utang ketika beliau tidak memenuhi prestasi adalah pihak kreditur marah-marah akhirnya diselesaikan secara baik-baik yaitu hutang dari Ibu SR dipindahkan ke usaha sarang walet beliau jika membuahkan hasil selama satu tahun karena akan dibagikan hasil keuntungannya. Awalnya perelisihan itu reda namun setelah ada pengaruh lain bahwa beliau sudah memanen hasil usaha walet nyatanya belum akhirnya terjadi pertikaian kembali dan pihak kreditur marah-marah bersikeras agar uangnya dikembalikan pada bulan

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu SR, Pada tanggal 20 Mei 2016.

agustus. Pada waktu terjadinya sengketa tidak adanya pihak ketiga yang berperan sebagai wasit ditengah pertikaian yang terjadi. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu SR yang mengatakan bahwa:

“Kada pang lah hinggan kami nang badua ja kadada urang lain umpat campur hinggan nya barancana ja tadi aku malapor akan lawan RT bila sidin kada hakun nang ku bayar sisa indung hutangnya ja tadi.”¹⁴⁸ (Tidak ada hanya kami yang berdua saja, tidak ada orang lain ikut campur hanya saja berencana saya melapor dengan RT jika beliau tidak mau yang saya bayar sisa utang pokoknya saja).

Pernyataan dari Ibu SR, dapat dipahami bahwa tidak adanya pihak ketiga sebagai penengah dari sengketa yang terjadi hanya saja berencana untuk melapor jika pihak kreditur tidak mau dibayar sisa utang pokoknya saja. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibu RA bahwa:

“Kadada pang ulih kawa diselesaikan urang kita nang bahutang lawan mahutangi ja. Supan jua awak mun urang lain umpat campur ngaran hutang tu.”¹⁴⁹ (Tidak ada karena dapat diselesaikan orang kita yang berutang dengan pemberi utang saja. Malu juga saya jika orang lain ikut campur yang namanya hutang).

Pernyataan Ibu RA dapat dipahami bahwa tidak adanya pihak ketiga sebagai penengah penyelesaian permasalahan dalam akad hutang piutang tersebut. Seiring berjalannya waktu tepatnya pada bulan agustus kasus Ibu SR dapat terselesaikan beliau mengatakan bahwa:

“Pas itu kalo batamu ai kami nah ujar ku sainsi ja cil kawa bayar sisa hutang indungnya ja Rp 17.000.000 amun salabihnya janji nang perbulan tadi tunggakannya kada kawa lagi mambayar, ulih usaha ku sudah bangkrut jua ngini gin ngalih bacari duitnya. Hakun ai sidin, oleh nang lakinya bapender “sudah ai tu kada kawa di paksa akan amun bujur kadada.” Ada ai sidin manawari lagi amun handak bahutang jar.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 21 Mei 2016.

Kada jar ku kena ja.”¹⁵⁰(Ketika itu bertemu kami kata saya”seini saja bisa membayar sisa hutang pokoknya Rp 17.000.000 kalau selebihnya janji yang perbulan tadi tunggakan tidak dapat lagi membayar, karena usaha saya sudah bangkrut yang ini saja sulit mencari uangnya. Mau saja beliau, karena yang suami berbicara”Sudah saja tidak bisa dipaksakan kalau uangnya memang tidak ada.”Ada lagi beliau menawarkan lagi jika ingin berutang lagi. Tidak kata saya nanti saja).

Pernyataan dari Ibu SR, dapat dipahami bahwa Ibu SR dapat menyelesaikan permasalahan dengan pihak kreditur yaitu dengan membayar sisa pinjaman pokoknya dan tidak untuk tunggakan angsuran keuntungan perbulan yang diperjanjikan karena usaha yang dijalankan sudah bangkrut dan pihak pemberi pinjaman akhirnya menyetujui hal tersebut. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan kreditur terkait orang yang tidak bayar dalam hutang Ibu KR mengatakan bahwa:

“Ada lah nang kada bayar tusuah ya pokoknya ku tagih tu pang sampai inya bayar. Ulih aku batagih karumah pang satinggu atau bulanan tu. Munnya kada bayar ku sariki tu pang.”¹⁵¹ (Ada yang tidak bayar pernah pokoknya saya tagih sampai dia bayar. Karena saya menagih kerumah perminggu atau bulanan. Jika tidak bayar saya marahi).

Pernyataan Ibu KR, dapat dipahami bahwa pernah debiturnya tidak dapat memabayar hutang dan Ibu KR menagih sampai orang tersebut membayar hutangnya baik secara perminggu maupun perbulannya.

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu KR, Pada tanggal, Pada tanggal 14 september 2016.

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu SR, Pada tanggal 18 Mei 2016.

BAB V

ANALISIS DATA

A. Latar Belakang Terjadinya Hutang Piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu

1. Potret Ekonomi Masyarakat Talohen Hulu

Keadaan ekonomi masyarakat Talohen Hulu masih belum memadai karena berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan penduduknya terdiri dari 128 KK dan 450 warga. Kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai petani. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari seorang informan Ketua RT Bapak SG yang mengatakan bahwa:

“Hampir 99% nan bebuan disini bagawi manyadap karet ai kadada nang lain dari subuh sampai siang. Kaitu ai kegiatan perhari. Amun pandapatan ni lah kada menetap oleh harga karet bisa turun naik. Tapi amunnya musim penghujan lah bisa kadada tu pang penghasilan olehnya karetnya kada mau jadi.”¹⁵²(Hampir 90% warga disini bekerja sebagai petani karet tidak ada yang lain dari pagi hingga siang. Seperti itu kegiatan perhari. Kalau pendapatan tidak menetap karena harga karet turun naik. Tetapi jika musim penghujan kemungkinan tidak ada penghasilan karena karet tersebut tidak membeku).”

Pernyataan Ketua RT Bapak SG, dapat dipahami bahwa hampir 99% warga masyarakat Talohen Hulu berprofesi sebagai petani karet dan penghasilan mereka berfluktuasi kadang naik dan turun tergantung harga karet. Lebih lanjut Bapak RT SG menerangkan terkait perihal penghasilan rata-rata masyarakat disana sebagai berikut:

“Masalah penghasilanlah kalau petani karet perminggu pang lah sekitar Rp 200.000-500.000 itu kalau harinya baik. Kalau musim penghujan atau kemarau bisa kurang dari pada itu. Mun serabutan lawan pedagang kecil-kecilan juga kurang lebih juga ah sekitar segitu juga Rp 200.000

¹⁵²Hasil wawancara dengan Ketua RT Bapak SG, Pada tanggal 09 Oktober 2016.

atau 300.000 san saminggunya.”¹⁵³(Masalah penghasilan jika petani karet perminggu ya sekitar Rp 200.000-500.000 itu jika hari baik. Jika musim penghujan atau kemarau mungkin kurang dari pada itu. Kalau kerja serabutan dengan pedagang kecil-kecilan juga kurang lebih juga sekitar demikian juga Rp 200.000 atau 300.000 perminggu).

Pernyataan Ketua RT Bapak SG, dapat dipahami bahwa penghasilan petani karet sekitar Rp 200.000-500.000/perminggu jika harinya tidak musim kemarau maupun penghujan. Hal yang serupa disampaikan oleh subjek Ibu JT dalam pemaparan data kesimpulannya bahwa Penghasilan Ibu JT Rp 300.000/perminggu sebagai petani karet penghasilan tersebut belum cukup memenuhi kebutuhan hidup.¹⁵⁴ Keterangan Ibu JT yang demikian juga didukung oleh keterangan Ibu RA sebagai pedagang yang mengatakan bahwa kalau penghasilannya kurang lebih demikian Rp 200.000-300-000 dalam waktu seminggu.¹⁵⁵

Berdasarkan keterangan subjek Ibu RA, JT dan Informan Ketua RT Bapak SG tersebut bahwa memang benar adanya masyarakat disana 99% masyarakat Talohen Hulu kehidupan sehari-harinya hanya sebagai petani karet yang mana penghasilan berfluktuasi tergantung dari faktor internal (kondisi pohon karet) maupun dari faktor eksternal yaitu kondisi alam dan perubahan harga. Penghasilan rata-rata mereka pun sekitar Rp 200.000-500.000/perminggu jika kondisi faktor internal dan eksternalnya mendukung.

Terkait hal ekonomi pendidikan juga berpengaruh berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ketua RT Bapak SG yang mengatakan bahwa:

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Ketua RT Bapak SG, Pada tanggal 15 Oktober 2016.

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu JT, Pada tanggal 13 Oktober 2016.

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 13 Oktober 2016.

“Disini nah banyak nang kada sekolah makanya sulit mencari gawian lain apa kadada ijasah segala, jadinya yang itu-itu ai gawian nyadap karet.”¹⁵⁶(Disini banyak yang tidak sekolah makanya sulit mencari pekerjaan lain apa tidak ada ijasah segala macam, maka dari itu pekerjaan yang itu-itu saja menyadap karet).

Pernyataan Ketua RT Bapak SG, dapat dipahami bahwa pendidikan yang kurang juga berpengaruh untuk memperoleh pekerjaan lain yang lebih baik.

Kesimpulannya bahwa potret ekonomi masyarakat Talohen Hulu masih belum memadai karena kebanyakan masyarakat berprofesi hanya sebagai petani yang penghasilannya berfluktuasi dengan rata-rata penghasilan dari Rp 200.000-5000.000 tergantung dari faktor internal dan eksternal. Kemudian masalah pendidikan yang kurang juga berpengaruh untuk memperoleh pekerjaan yang lebih memungkinkan.

2. Motif Hutang Piutang Masyarakat Talohen Hulu

Deskripsi sebelumnya bahwa masyarakat Talohen Hulu ekonominya masih belum memadai dikarenakan kebanyakan dari mereka hanya bekerja sebagai petani yang penghasilannya berfluktuasi dengan rata-rata Rp 200.000-500.000 perminggu, pendidikan yang kurang berpengaruh pada perolehan pekerjaan lain. Hal ini menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan yang lain. Kondisi yang demikian membutuhkan orang lain untuk membantu ekonominya yaitu dengan cara berutang.

Merupakan hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat berutang adalah cara alternatif agar dapat memenuhi kebutuhan hidup

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ketua RT Bapak SG, Pada tanggal 15 Oktober 2016.

seseorang. Praktik hutang piutang bukan hanya terjadi di lembaga namun juga banyak terjadi antara sesama masyarakat seperti yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu. Seseorang biasanya mempunyai motif ataupun alasan tertentu dalam melakukan akad hutang piutang. Terkait hal demikian, bahwa alasan masyarakat Talohen Hulu berutang adalah sebagai berikut:

a) Keperluan transportasi anak sekolah

Seseorang melakukan hutang atau pinjaman mempunyai alasan tertentu kenapa lebih memilih berutang salah satunya untuk transportasi anak sekolah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu RM selaku debitur yang berusia 48 tahun berprofesi sebagai petani sekaligus kepala rumah tangga mengatakan bahwa :

“Samalam sakali lah bahutang ya Rp 3.000.000 jutalah aku jadi bahutang lawan si anu ya kapepet jua samalam tu sagan mambayar kreditan sapida motor anakku sakulah ulih jauh kan jua inya handak basepeda motor jua.”¹⁵⁷ (Kemarin satu kali berutang sebesar Rp 3.000.000, saya jadi berutang dengan Ibu tersebut ya terdesak kemarin itu untuk membayar kredit sepeda motor anak sekolah karena sekolahannya jauh dan juga dia berkeinginan untuk bersepeda motor).

Alasan yang sama juga di jelaskan oleh Ibu JT berdasarkan pemaparan data yang telah peneliti sampaikan sebelumnya bahwa beliau berutang untuk keperluan anak sekolah yaitu untuk membelikan sepeda anaknya.

Berdasarkan keterangan dari kedua subjek RM dan JT bahwa berutang untuk keperluan transportasi anak sekolah merupakan kebutuhan yang segera untuk dipenuhi juga berdasarkan deskripsi sebelumnya bahwa

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu RM, Pada tanggal 13 Mei 2016.

pekerjaan mereka hanya sebagai petani dan penghasilan mereka berfluktuasi tidak cukup memenuhi kebutuhan lainnya. Alasan demikian diperbolehkan dalam Islam karena tujuan berutang untuk hal yang baik, niat yang baik dan sesuai dalam konsep hutang piutang alasan berutang karena termasuk dalam keperluan mendadak atau kebutuhan yang tiba-tiba muncul yang semestinya dipenuhi.

Kondisi yang demikian seharusnya dari pihak yang berkemampuan lebih dalam hartanya mempunyai sikap empati terhadap warganya yang kekurangan dalam harta dan membutuhkan bantuan uluran tangan terhadap warga tersebut. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak kreditur (pemberi hutang atau pinjaman) Ibu KR yang berusia 47 tahun dan berprofesi sebagai petani sekaligus kreditur mengatakan bahwa:

“Ada kalo nang handak mainjam Rp 20.000.000 gasan bausaha jadi ujar urang tu kaina mambari Rp 1.000.000 perbulannya nah jadi hakun aku mainjami tu tadi. Oleh kada ku hakun jua mainjami kaitu wara.”¹⁵⁸ (Ada kan yang mau meminjam Rp 20.000.000 untuk usaha jadi kata orang itu nanti saya memberi Rp Rp 1.000.000/perbulan nah jadi mau saya meminjamkan. Karena tidak mau saya meminjamkan begitu saja).

Alasan yang demikian juga dikatakan oleh Ibu LH selaku kreditur (pemberi pinjaman) bahwa meminjamkan dengan syarat 10 % perbulan. Bapak DR berkata juga demikian meminjamkan orang untuk mencari keuntungan.¹⁵⁹

Berdasarkan keterangan dari ketiga subjek Ibu LH, KR dan Bapak DR tersebut bahwa mereka memberikan bantuan pertolongan pinjaman

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu KR, Pada tanggal 18 mei 2016.

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu LH dan Bapak DR, Pada tanggal 16 dan 19 Mei 2016.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”¹⁶⁰

Maksud dari ayat tersebut adalah sebagai makhluk sosial di anjurkan untuk tolong-menolong dan bantu membantu antar sesama dalam berbuat kebaikan dan takwa artinya adalah dalam bentuk apapun salah satunya memberikan pinjaman terhadap orang yang membutuhkan bantuan dan

¹⁶¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Cet.VIII, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal.168-169.

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran yaitu tidak menzalimi orang yang sedang berada dalam kesulitan seperti memanfaatkan kesempatan diatas kesulitan orang lain hanya untuk kepentingan individual dalam hal menjadikan hutang sebagai lahan bisnis tanpa memperdulikan kondisi yang meminjam uang tersebut atau eksploitasi terhadap tenaga kerja orang yang lemah.

Menurut Ibnu Khuwaizimandad berkata dalam *Ahkam*-nya,”Tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dapat dilakukan dengan berbagai cara adalah suatu hal yang wajib bagi seorang alim untuk menolong manusia dengan ilmunya, sehingga dia mau mengajarkan mereka. Sedangkan orang yang kaya wajib menolong mereka dengan hartanya. Adapun seseorang yang pemberani, (dia wajib memberikan pertolongan) di jalan Allah dengan keberaniannya. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya kaum muslim itu saling membantu, layaknya tangan yang satu, *Kaum muslimin itu setara darahnya, orang-orang yang lemah (di antara) mereka berjalan di bawah perlindungan mereka (orang yang kuat) dan mereka adalah penolong bagi selain mereka*. Hal selanjutnya menerangkan bahwa mereka wajib berpaling dari orang yang sewenang-wenang, tidak menolongnya, dan mengembalikan apa yang menjadi kewajibannya (kepada orang yang berhak menerimanya).¹⁶²

Maksud dari Ibnu Khuwaizimandad bahwa tolong menolong dalam mengerjakan takwa dan kebaikan bisa dalam bentuk apapun selama itu

¹⁶² Syaikh Imam Al-Quthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*,...hal. 115.

mampu dilakukan baik dalam berbagi ilmu, bagi pemberani dapat menolong orang yang lemah dan termasuk bagi orang yang berkelebihan dalam hartanya hendaknya didistribusikan kepada orang yang membutuhkan dan juga wajib berpaling dari orang yang sewenang-wenang dan tidak mau menolong orang lain. Perintah untuk tolong-menolong bersifat universal termasuk dalam hal pemberian pinjaman yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Talohen Hulu.

Secara eksplisit ayat tersebut menjelaskan bahwa anjuran untuk tolong menolong terhadap sesama dan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Talohen Hulu terkhusus pihak kreditur (pemberi pinjaman) kepada yang membutuhkan. Namun sambungan dari ayat tersebut juga dilaksanakan oleh masyarakat Talohen Hulu yaitu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran yang merupakan larangan-Nya terbukti dari pernyataan keempat subjek Ibu LH, Bapak DR, Ibu JT, dan Ibu RM sebelumnya yaitu adanya penetapan persyaratan berupa keuntungan maupun kompensasi yang diberikan di awal perjanjian. Hal ini sudah tidak sesuai dengan konsep hutang piutang dalam Islam karena termasuk dalam kelebihan yang diperjanjikan baik dari pihak yang berutang maupun berpiutang adalah tidak boleh dan haram untuk diambil. Pada dasarnya pihak kreditur tersebut telah memakan harta yang haram.

Hal demikian juga tidak sesuai dengan teori hukum perikatan dalam Islam berdasarkan asas-asasnya yaitu : asas Ibadah yaitu melakukan kontrak diniatkan kepada Allah namun tidak terjadi pada masyarakat Talohen Hulu

karena berdasarkan keterangan subjek sebelumnya Bapak DR memberi pinjaman untuk memperoleh keuntungan. Ini sudah jelas bukan semata mata karena Allah namun ada sesuatu yang lain diharapkan yaitu kompensasi.

Asas lainnya asas'*Adalah* yaitu keadilan tidak boleh ada yang terzalimi namun kenyataannya yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu terzalimi karena pihak kreditur mengambil keuntungan diatas kondisi sulit terdesaknya pihak debitur berupa pemenuhan fasilitas anak sekolah karena tidak mempunyai uang.

Tidak sesuai juga dengan asas halal, karena dari objeknya uang yang digandakan menjadi tumbuh dan berkembang tidak berdasarkan kuantitas awal sehingga menyebabkan haram bagi yang mengambilnya. Lebih lanjut debitur (pihak peminjam) Ibu JT dalam pemaparan data kesimpulannya mengatakan bahwa berutang karena mendadak dan terpaksa meminjam ketempat kreditur di kampung.¹⁶³

Hal tersebut adalah tidak adanya asas *Ikhtiyari* atau sukarela dalam Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah* yaitu terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak. Penetapan persentase menjadi beban bagi pihak debitur (peminjam) dan karena keadaan yang mendesak pihak debitur jadi meminjam ketempat tersebut.

Kesimpulannya bahwa latar belakang terjadinya hutang piutang salah satunya adalah karena untuk memenuhi transportasi anak sekolah ini tidak melanggar *syariat* islam karena berutang memang diperbolehkan dan

¹⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu JT, Pada tanggal 14 Mei 2016.

ini termasuk dalam konsep hutang piutang yaitu alasan berutang yang dibolehkan. Pihak peminjam juga mau menolong dengan memberikan pinjaman karena adanya kompensasi baik perkataan dari pihak peminjam maupun yang diminta oleh pemberi pinjaman ini sudah tidak sesuai dengan konsep hutang piutang yaitu termasuk dalam kelebihan yang diperjanjikan dan telah melanggar asas-asas dalam teori hukum perikatan.

b) Modal Usaha

Alasan kedua dari praktik terjadinya hutang piutang adalah untuk modal usaha. Modal dalam kamus pintar bahasa Indonesia adalah uang pokok.¹⁶⁴ Usaha adalah kegiatan yang mengarahkan tenaga.¹⁶⁵ Jadi modal usaha adalah sejumlah asset yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan yang produktif tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Menjalankan suatu usaha tentunya memerlukan modal yang tidak sedikit maka dari itu membutuhkan orang lain dalam memberikan modal untuk usaha yang akan dijalankan salah satunya dengan cara berutang. Berikut wawancara peneliti lakukan yang memperkuat pernyataan tersebut:

Keterangan dari Ibu RA yang berusia 31 tahun berprofesi sebagai pedagang sebagai berikut:

“Suah bahutang sakali lawan KR tu Rp 20.000.000 lah sagan manambah modal bausaha gatah sagan badagang.”¹⁶⁶ (Pernah berutang dengan KR Rp 20.000.000 untuk menambah modal usaha karet untuk berdagang).”

¹⁶⁴ Hamid, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Dua, hal. 296.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal. 443.

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu SR, Pada tanggal 15 Mei 2016.

Alasan yang demikian juga turut dijelaskan oleh debitur Ibu SR bahwa alasan beliau berutang adalah untuk menambah modal usaha berdagang. Berdasarkan keterangan dari debitur Ibu RA tersebut bahwa motif berutang adalah untuk modal usaha berdagang dan Ibu SR juga menyatakan demikian bahwa tujuannya meminjam uang adalah untuk menambah modal usaha berdagangnya.

Hutang atau pinjaman itu ada yang konsumtif namun juga ada yang produktif. Hutang yang produktif yaitu menggunakan uang pinjaman untuk usaha. Alasan kedua dari praktik hutang piutang yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu untuk usaha hal tersebut adalah wajar karena uang yang dipinjam digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Ini sesuai dengan teori hukum perikatan berdasarkan asas *Ibahah* (boleh) karena selama tidak ada ayat yang melarang kegiatan tersebut maka diperbolehkan. Berdasarkan kaidah fiqih dalam muamalah:¹⁶⁷

لَا ضَلَّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

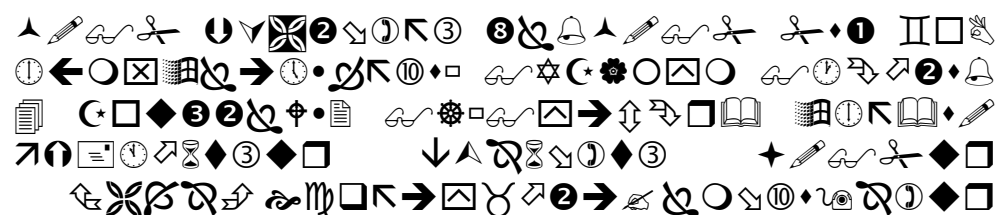
Alasan masyarakat Talohen Hulu berutang untuk modal usaha berdagang adalah diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada ayat yang melarangnya. Usaha yang dijalankan oleh masyarakat Talohen Hulu khususnya pihak debitur (pihak peminjam) berdasarkan keterangan Ibu SR di pemaparan data yang telah peneliti paparkan bahwa berutang untuk

¹⁶⁷ Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, cet. I, Intimedia, 2014, hal. 67.

modal usaha berdagang pembelian karet.¹⁶⁸ Usaha demikian tidak haram dari zatnya maupun bentuknya.

Hal tersebut sesuai juga dengan teori hukum perikatan syariah bahwa termasuk dalam asas halal yaitu objek barang yang dijadikan barang yang diakadkan dalam kontrak syariah adalah barang yang dihalalkan dan juga pada hakikatnya usaha adalah suatu kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup karena setiap orang pastinya mempunyai standar kebutuhan yang berbeda-beda jadi menurut peneliti tidak ada larangan dalam hal demikian.

Kondisi keperluan modal memberikan kesadaran kepada pihak yang mempunyai kelebihan dalam hartanya untuk membantu sesama warganya yang membutuhkan dalam hal pemberian pinjaman. Memberikan pinjaman memang sudah diaplikasikan oleh masyarakat Talohen Hulu berdasarkan keterangan dan deskripsi sebelumnya berutang untuk keperluan transportasi anak sekolah. Ini juga sudah sesuai dengan konsep hutang piutang yaitu anjuran untuk memberikan pinjaman berdasarkan firman Allah SWT :



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah (2): 245).¹⁶⁹

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu SR, Pada tanggal 15 mei 2016.

¹⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,...hal. 60.

Tafsir Fi Zhilalil Qur'an yang ditulis oleh Sayyid Quthb maksud dari ayat tersebut adalah apabila mati dan hidup itu ada ditangan Allah dan kehidupan bagi seseorang itu tidak akan lenyap karena perang apabila Allah menakdirkannya masih tetap ada, maka harta pun demikian. Dia tidak akan lenyap karena diinfakkan. Infak adalah pinjaman yang baik kepada Allah. Harta itu tersimpan disisi-Nya, Dia melipatgandakannya dengan lipat ganda yang banyak. Dia melipatgandakannya di dunia berupa kekayaan, berkah, kebahagiaan, dan kegembiraan. Dia juga melipatgandakannya di akhirat berupa nikmat, kesenangan, keridhaan, dan kedekatan kepada Allah. Kembalinya urusan tentang kaya dan miskin adalah kepada Allah, bukan kepada kerasukan dan kebakhilan. Bukan pula pada pengorbanan dan infak, "Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki)." Pada akhirnya kembalinya segala sesuatu adalah kepada Allah. Di mana saja harta dan manusia itu sendiri berada, semuanya akan kembali kepada Allah," Kepada-Nyalah kamu dikembalikan." Oleh karena itu, tidak perlu takut kepada mati dan kemiskinan, karena tidak ada yang dapat lolos dari kembali kepada Allah. Karena itu, hendaklah orang-orang mukmin berjihad dijalan Allah, mempertaruhkan nyawa dan harta. Hendaklah mereka yakin bahwa napasnya sudah dihitung dan rezekinya sudah ditentukan. Di antara hal yang amat baik baginya ialah hidup dengan tegar, merdeka, berani, dan terhormat. Sesudah itu, mereka pasti akan dikembalikan kepada Allah.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an...*, hal. 315.

Ayat tersebut pada dasarnya ditunjukkan untuk pihak kreditur (Orang yang memberikan pinjaman atau hutang) kepada orang yang membutuhkan karena pahalanya sangat besar. Memberikan pinjaman baik untuk usaha maupun kebutuhan yang mendadak adalah hal yang memang dianjurkan dan hukumnya sunat bahkan dapat menjadi wajib misalnya mengutang orang yang terlantar karena termasuk dalam pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah). Kemudian tidak perlu takut pada harta yang dihutangkan itu akan berkurang atau habis karena Allah akan mengganti harta tersebut dengan berlipat ganda apabila Allah berkehendak, karena memberikan pinjaman yang baik terhadap orang yang memerlukan pinjaman tersebut maka Allah akan menyempitkan dan melapangkan (rezeki) seseorang. Jadi tidak perlu takut untuk mati dan miskin karena bahwa napas dan rezeki itu sudah ditentukan oleh-Nya.

Memberikan pinjaman memang sudah dipraktikkan pada masyarakat Talohen Hulu namun dibalik hal tersebut adanya imbalan tertentu yang diharapkan dari pinjaman yang diberikan yaitu berupa keuntungan yang diperjanjikan diawal akad baik itu pemberian dari pihak debitur maupun yang diminta dari pihak kreditur. Hal demikian berdasarkan pernyataan dari subjek Ibu RA, SR, KR, LH, dan Bapak DR berdasarkan pemaparan data yang telah peneliti paparkan bahwa adanya penetapan persentase dari pihak kreditur maupun keuntungan yang diberikan oleh pihak debitur setiap minggu maupun perbulannya. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan Islam berdasarkan ayat yang disampaikan bahwa berikan pinjaman yang baik

bukan sebaliknya jika yang demikian dilakukan berarti tidak ada keikhlasan dan ketulusan karena ada motif tertentu didalamnya dan hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pinjaman yang baik.

Pemberian pinjaman juga tidak sesuai dengan teori hukum perikatan berdasarkan asas-asasnya yaitu Asas Ibadah artinya semata-mata karena Allah namun karena adanya sesuatu yang lain berupa kompensasi atau keuntungan yang diperjanjikan bukan karena keikhlasan mengharap ridho Allah, asas' *Adalah atau* keadilan penetapan persentasi yang diperjanjikan membuat tidak adanya keadilan berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu RA dan SR bahwa usaha mereka mengalami kebangkrutan namun kelebihan atau keuntungan yang diperjanjikan tetap ditagih oleh pihak pemberi pinjaman.¹⁷¹ Ini juga menyebabkan tidak terlaksananya asas *Ikhtiyāri* atau sukarela karena pada kondisi yang bangkrut berdasarkan keterangan Ibu RA dan SR tersebut tetap ditagih oleh pihak peminjam agar membayar hutang ini adalah tekanan dan beban bagi pihak peminjam mengakibatkan tidak adanya kesukarelaan antara pihak yang berakad.

Kesimpulan dari peneliti bahwa latar belakang terjadinya hutang piutang pada masyarakat Talohen Hulu karena dua alasan yaitu untuk transportasi anak sekolah dan modal usaha kedua kategori tersebut termasuk dalam alasan kebutuhan yang mendadak sesuai dengan konsep hutang piutang dalam Islam tidak ada larangan. Namun alasan memberikan pinjaman oleh pihak kreditur adalah untuk memperoleh kompensasi ini

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu RA dan Ibu SR, Pada tanggal 20 dan 21 Mei 2016.

sudah tidak sesuai dengan konsep hutang piutang dalam Islam bahwa hal tersebut adalah haram dan tidak boleh, juga tidak sesuai dengan asas-asas dalam teori hukum perikatan seperti asas Ibadah, asas *'adalah*, asas *Ikhtiyāri* dan asas halal.

B. Bentuk Akad Hutang Piutang

1. Transaksi Hutang Piutang di Masyarakat Talohen Hulu

Transaksi hutang piutang dilakukan dirumah pihak kreditur yang mana ketika warga yang memerlukan uang mendatangi kerumah orang yang dapat memberikannya pinjaman kemudian mengatakan keinginannya dan pihak kreditur mengabulkan permintaan dari pihak yang memerlukan uang dengan mematuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu RA yang mengatakan bahwa

“Waktu itu lah perlu duit gasan modal batukar gatah tadi datang ai ah awak karumah urang nang kawa mainjami bapadah ai awak kaparluan apa urang tu hakun mainjami dengan catatan ikam mambari aku saini saini jar urang. Hi’ih ai jar awak jua han ngaran saurang parlu duit jua yu kada kawa ai manuruti apa jar urang ai ah.”¹⁷² (Waktu itu perlu uang untuk modal usaha pembelian karet mendatangi kerumah pihak yang bisa memberikan pinjaman

Berdasarkan keterangan dari Ibu RA tersebut bahwa transaksi hutang piutang terjadi dirumah kreditur (pihak yang memberikan hutang atau pinjaman) yaitu pihak yang memerlukan uang mendatangi kerumah pemberi pinjaman dan pihak pemberi pinjaman mempunyai persyaratan tertentu yang harus ditaati oleh peminjam. Jadi pada dasarnya transaksi akan terjadi jika

¹⁷² Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 10 Oktober 2016.

pihak debitur (penerima pinjaman) mampu memenuhi persyaratan tersebut yaitu dapat memberikan kompensasi yang telah di perjanjikan atau yang diinginkan oleh pihak kreditur (pihak pemberi pinjaman).

Transaksi hutang piutang akan terjadi di rumah pihak kreditur (pemberi pinjaman) dengan cara bagi warga yang memerlukan uang mendatangi kerumah pihak yang bisa memberikannya pinjaman mengatakan keperluannya dan pihak pemberi pinjaman menentukan persyaratan yang harus dipenuhi apabila pihak peminjam menyanggupi syarat tersebut maka terjadilah transaksi hutang piutang.

2. Bentuk Akad Hutang Piutang

Akad menurut bahasa artinya perikatan, perjanjian, atau pemufakatan. Secara terminologi fiqh, akad ialah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Kata lain akad ialah kesepakatan dua belah pihak yang mengharuskan masing-masing yang bersepakat untuk melaksanakan sesuatu kesepakatan yang telah disepakatinya.¹⁷³

Transaksi sebelumnya sudah di deskripsikan yaitu terjadi di rumah pihak kreditur dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak kreditur dan pihak debitur mengikuti atau mematuhi. Adapun rukun dan persyaratan tersebut yaitu berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

¹⁷³ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013, hal. 11.

a. Adanya Lafaz Utang Piutang

Akad utang piutang adanya *Lafaz* berdasarkan pernyataan dari subjek Ibu KR mengatakan bahwa:

“Amun yang datang kasini tu lah bapadah lawan aku cil adakah duit jar. Jar ku ada ai, kanapa? Handak bahutang ai jar kawa kah. Kawa ai jar ku.”¹⁷⁴(kalau yang datang kesini berbicara kepada saya apakah ada uang katanya. Kata saya ada saja, kenapa? Ingin berutang bisa tidak katanya. Bisa kata saya).”

Maksud pernyataan Ibu KR adalah bahwa sebelum melakukan utang piutang adanya lafaz kalimat seperti “saya berutang kepada engkau.” Jawab yang menghutangi “saya mau menghutangi.” Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu SR berdasarkan pemaparan data sebelumnya kesimpulannya bahwa adanya kata meminjam dan mau meminjamkan¹⁷⁵

Berdasarkan keterangan dari kedua subjek tersebut bahwa sebelum melakukan perjanjian adanya *lafaz* hutang dan menghutangi yang diungkapkan sebelum menerima objek barang yang dihutang.

Hal tersebut sudah sesuai dengan konsep hutang piutang yaitu rukun dari hutang piutang adanya lafaz¹⁷⁶. *Lafaz* (Kalimat menghutangi), “Saya utangkan ini kepada engkau.” Jawab yang berutang, “Saya mengaku berutang kepada engkau.” Perkataan dari pihak debitur (Pihak yang berutang) yaitu ingin berutang dan kreditur menjawab ada uangnya bisa saja

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu KR, Pada tanggal 18 Mei 2016.

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu SR, Pada tanggal 15 Mei 2016.

¹⁷⁶ Lafaz adalah sebutan atau ucapan yang baik dari kata dan perkataan. Hamid, *Kamus pintar bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka dua, hal. 259.

berutang ini menunjukkan *lafaz* bahwa terjadinya akad diantara kedua belah pihak.

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, "berikanlah saya utang sekian" lalu dia meminjamnya atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu ia mengiri sejumlah utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *qardh* tersebut sah. Menurut al-Adzra'i, ijma ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.

Jadi praktik utang piutang yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu adanya *lafaz* yang demikian adalah sah menurut ulama Syafi'iyah dan sudah sesuai dengan konsep hutang piutang dalam Islam karena telah melaksanakan rukun dari hutang piutang. *Lafaz* tersebut menyatakan bahwa telah terjadinya perikatan antar kedua belah pihak yang mana dalam teori hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai para pihak yang melakukan ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Jadi dengan adanya perikatan tersebut masyarakat Talohen Hulu mempunyai hak sebagai pemberi utang dan kewajiban sebagai pihak pengutang atas suatu ikatan hukum.

- b. Penetapan pembayaran persentase maupun keuntungan yang diperjanjikan baik secara perbulan maupun perminggunya.

Pembayaran persentase merupakan penetapan tambahan dari pokok pinjaman yang telah di pinjam baik itu dibayar secara perminggu maupun perbulan. Jadi akad perjanjian utang piutang tersebut menetapkan adanya

persentase sebagai timbal balik dari hutang yang diberikan. Hal demikian berdasarkan penjelasan dari Ibu LH yang berusia 62 tahun dan berprofesi sebagai petani menjelaskan bahwa:

“Aku mahutangi urang tapi syaratnya perbulan 10% amun bajaminan kadada pang lah kada bajanji waktu itu oleh istilah kita percaya haja pang lawan urang mana nang mainjam sasama kaluarga jua.”¹⁷⁷(Saya menghutangkan orang tetapi persyaratannya 10 % perbulannya namun jaminan tidak ada karena tidak ada perjanjian waktu itu karena percaya saja dengan orang apalagi yang meminjam sesama keluarga juga).

Penetapan persentase maupun nominal dalam akad hutang piutang juga turut di jelaskan oleh bapak DR selaku kreditur bahwa ada angsuran tambahan seminggu sekali yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam atau debitur yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan keterangan dari kreditur LH tersebut bahwa akad hutang piutang menentukan persyaratan tertentu yaitu berupa penarikan persentase sebesar 10% perbulan dengan pembayaran perbulan kemudian hal demikian juga dinyatakan oleh kreditur DR menarik nominal dari pokok pinjaman sebagai angsuran perminggu. Hal yang serupa juga dinyatakan oleh debitur RA, RM, dan KR. Ibu RA pada dasarnya membenarkan bahwa persyaratan akad utang penetapan sebesar 10%, kemudian dari Ibu RM bahwa harus memberi angsuran dari pokok yang dipinjam untuk setiap minggunya sementara Ibu KR selaku kreditur menyatakan bahwa: “kadada ai yah cuman pander urang mambari aku sabulan 1.000.000 lain bunga

¹⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu LH , Pada tanggal 16 Mei 2016.

amun si SR tu bahutang samalam 20.000.000 juta pang kadada ai basarat-sarat tu tapilah kada ku hakun jua ah mahutangi urang kaya itu wara.”¹⁷⁸

Berdasarkan keterangan dari subjek tersebut yaitu Ibu RA, RM, LH dan Bapak DR bahwa dalam perjanjian akad utang piutang mereka menetapkan persyaratan tertentu diawal akad baik itu berupa tambahan pembayaran dalam bentuk persentase maupun berupa nominal langsung yang diminta oleh pihak kreditur. Kemudian keterangan dari Ibu KR perjanjian keuntungan ditetapkan diawal yang diberikan oleh pihak debitur.

Kedua hal yang demikian adalah persyaratan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan konsep dalam hutang piutang bahwa syarat hutang piutang tidak boleh diluar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangkan). Keuntungan yang ditarik berupa persentase maupun yang dijanjikan oleh pihak debitur yang terjadi di masyarakat Talohen Hulu berdasarkan kelima subjek Ibu KR, RM, LH, RA dan bapak DR tersebut sudah melanggar hukum Islam. Akad yang seperti ini juga dalam konsep hutang piutang termasuk dalam kelebihan yang diperjanjikan baik dari pihak yang berutang maupun di dasarkan pada perjanjian yang telah disepakati adalah tidak boleh dan haram bagi pihak berpiutang untuk mengambilnya.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat para ulama bahwa penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh *muqtārīdh* (Pihak yang berutang), menurut ulama Syafi’iyah pihak yang menghutangi makruh

¹⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu KR, Pada tanggal 18 Mei 2016.

menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang menghutangi dibolehkan menerimanya.¹⁷⁹ Sementara mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih) menyatakan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.¹⁸⁰ Para ulama Malikiyyah juga berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba.¹⁸¹ Pendapat dari informan Bapak Ustadz BT bahwa utang piutang yang menggunakan persentase adalah haram dan keuntungan yang dikatakan diawal peminjaman oleh pihak peminjaman adalah riba karena mengandung unsur harapan dari pihak pemberi pinjaman. Kata beliau sudah sering melakukan ceramah mengenai riba tidak direspon oleh warga kampung sekitar dan malahan yang memberikan ceramah diabaikan.¹⁸² Hal ini merupakan sifat buruk dari masyarakat Talohen Hulu dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka.

Sudah jelas haram namun tetap dilakukan hal ini juga tidak sesuai dengan teori hukum perikatan berdasarkan asa-asnya yaitu: Asas *Al-Ilahiyyah* (Ketuhanan) yaitu Pihak kreditur (pemberi pinjaman) yang berkelebihan dalam hartanya tersebut tidak menyadari bahwa itu hanyalah berupa titipan dari Allah dan tidak menempatkannya sesuai pada tempatnya maksudnya harusnya harta tersebut dipergunakan untuk kebaikan bukan pada kebatilan yang hanya memandang *profit* dunia secara individual dan

¹⁷⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,...hal. 174.

¹⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,...hal. 379.

¹⁸¹ *Ibid.*, hal. 380.

¹⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Ustadz BT, pada tanggal 09 Oktober 2016.

kurang memperhatikan bahwa setiap tingkah laku baik maupun buruk akan dilihat oleh Allah SWT.

Selain itu juga tidak sesuai dengan asas Ibadah bahwa melakukan kontrak syariah diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Karena tujuan utama manusia diciptakan Allah adalah untuk ibadah. Jika dengan adanya persentase atau keuntungan yang diperjanjikan berdasarkan subjek RA, DR, LH, KR dan RM berarti adanya sesuatu yang diharapkan bukan berdasarkan ibadah semata karena Allah namun ada sesuatu yang sifatnya ingin menguntungkan kehidupan individual di dunia.

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Ibu RM bahwa berutang karena keperluan cepat jadi berutang ketempat kreditur.¹⁸³ Berdasarkan keterangan Ibu RM alasannya berutang karena keperluan cepat sementara persentase tetap dimuat dalam perjanjian hutang seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Hal demikian berarti tidak melaksanakan asas '*Adalah* yaitu asas keadilan dimana para pihak yang melakukan kontrak *syariah* tidak boleh ada yang terzalimi. Kondisi yang terdesak yang terjadi pada Ibu RM bukannya ditolong malahan menjadi peluang bagi pihak kreditur untuk memperoleh keuntungan. Sehingga utang yang terus bertambah menjadi beban bagi mereka.

Tidak sesuai juga dengan asas *riḍhā'iyāh* yaitu asas kerelaan atau keridhaan juga tidak terdapat dalam akad yang menetapkan persentase

¹⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu RM, Pada tanggal 13 mei 2016.

keuntungan yang diperjanjikan diawal pada masyarakat Talohen Hulu berdasarkan keterangan dari subjek JT bahwa:

“Ya ulihnya mandasak tadi pang tapaksa ai kasitu, amunnya ka bank kan urusannya lain lagi tangalih syaratnya mana lambat kami handak capat jua makai duitnya.”¹⁸⁴ (Karena mendesak kemudian terpaksa ke tempat itu, kalau ke bank urusannya beda lagi sulit syaratnya juga lama kami mau cepat juga menggunakan uangnya).

Berdasarkan keterangan Ibu JT tersebut jika bukan dalam keadaan terpaksa beliau tidak meminjam ketempat tersebut karena adanya penetapan persentase yang telah ditetapkan berdasarkan keterangan yang telah disampaikan sebelumnya. Ini menyatakan bahwa tidak ada kerelaan dan keridhaan dari akad yang dilakukan karena memberatkan salah satu pihak. Akad dengan persyaratan yang demikian adalah perbuatan yang batil berdasarkan dalil tentang asas *Ridhā'iyāh* ini; berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa (4):29).¹⁸⁵

¹⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu JT, Pada tanggal 14 Mei 2016.

¹⁸⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,...hal.122.

Al-Qur'an dan Tafsir Kementerian Agama RI ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.

Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- 1) Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
- 2) Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya digunakan untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- 3) Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukan dari golongan-golongan yang menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Selanjutnya Allah melarang bunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum *qishash*. Dilarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah. Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang

orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.¹⁸⁶

Secara eksplisit ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang hamba-Nya untuk mencari ataupun memperoleh kekayaan dengan cara yang batil (misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya) yang dapat merugikan orang lain dan menjadi beban bagi orang salah satu pihak, kecuali dengan perniagaan dengan unsur suka sama suka artinya tidak terdapat keterpaksaan di dalamnya dan tidak memberatkan salah satu pihak. Namun apa yang telah menjadi larangan-Nya dilakukan oleh masyarakat Talohen Hulu khususnya pihak kreditur (Pihak yang menghutangi) dan ini telah menjadi kebiasaan dari masyarakat Talohen Hulu yang sulit untuk dihilangkan.

Kesimpulan dari peneliti bahwa bentuk akad utang piutang yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu salah satunya adalah adanya penetapan pembayaran persentase maupun keuntungan yang telah diperjanjikan diawal baik itu yang diminta dari pihak kreditur maupun yang diberikan oleh pihak debitur. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam berdasarkan konsep hutang piutang dan melanggar asas-asas dari teori hukum perikatan.

¹⁸⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*,...hal. 154.

- c. Perjanjian utang piutang tersebut dilakukan secara lisan, pencatatan dalam bentuk kwitansi

Hutang piutang ada yang tertulis dalam bentuk kwitansi namun ada pula hanya dengan lisan. Hal demikian berdasarkan penjelasan dari kreditur Ibu LH mengatakan bahwa:

“Samalam itu pang bacatat pakai kwitansi haja siapa nang mainjam lawan barapa hutangnya matrai sudah. Masalah jaminan kadada jua. Oleh percaya ja kan kadada ai ah nang lain han parcaya ja tadikan.”¹⁸⁷(Kemarin itu ditulis menggunakan kwitansi siapa nama berutang, berapa nominal hutang dan materai. Masalah jaminan tidak ada karena percaya saja tidak ada yang lain percaya saja tadi itu).

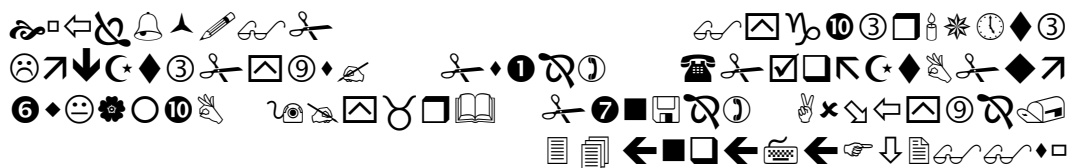
Pernyataan demikian juga dijelaskan oleh Ibu RM bahwa akad utang piutang tersebut dicatat dalam bentuk kwitansi. Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu KR, RA, dan keterangan dari Bapak DR yang telah peneliti paparkan di pemaparan data bahwa akad tersebut hanya berbentuk lisan saja. Hal demikian turut dibenarkan oleh kreditur Ibu JT yaitu hanya berbentuk lisan saja tidak ada pencatatan.

Berdasarkan pernyataan dari kelima subjek tersebut bahwa akad hutang piutang ada yang menggunakan pencatatan dalam bentuk kwitansi yang berisi nominal uang yang dipinjam dan juga ada yang tidak melakukan pencatatan hanya sebatas lisan saja. Ini sudah tidak sesuai dengan anjuran dalam Islam karena dalam konsep hutang piutang ada tata krama dalam berutang yaitu demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Pencatatan dalam bentuk kwitansi hanya bentuk tulisan nama

¹⁸⁷Hasil wawancara dengan Ibu LH , Pada tanggal 16 Mei 2016.

dan nominal hutang yang telah dipraktikan masyarakat Talohen Hulu tentunya belumlah cukup karena pencatatan pengertiannya luas. Pencatatan yang dimaksud disini adalah lengkap dan jelas yang dapat menjadi pegangan bagi kedua belah pihak yang berakad jika perlu mendatangkan saksi.

Tidak adanya pencatatan yang lengkap dan jelas berarti tidak melaksanakan konsep dari hukum perikatan syariah yaitu asas *kitabah* merupakan asas yang tertulis, ialah suatu akad atau perikatan hendaknya dilakukan secara tertulis atau dinotariskan. Dalil tentang asas ini yaitu, berdasarkan firman Allah SWT :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘āmalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S al-Baqarah (2):282)’’¹⁸⁸

Tafsir Al-Mishbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab maksud dari ayat tersebut adalah perintah ayat ini secara redaksional ditunjukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditur tidak memintanya. Kata *tadāyantum*, diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata *dain* Kata ini

¹⁸⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,...hal. 70.

memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni *dal*, *ya'* dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain). Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan, ketaatan dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermu'*āmalah*. Mu'*āmalah* yang dimaksud adalah mu'*āmalah* yang tidak secara tunai, yakni hutang-piutang.¹⁸⁹

Ayat tersebut diatas diperuntukan untuk orang-orang yang melakukan perjanjian utang piutang bahwa setiap utang piutang yang dilakukan secara tidak tunai maka harus dicatat untuk menghindari sifat lupa juga sebagai bukti bahwa telah terjadinya perikatan antara pihak debitur dan kreditur. Namun yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu tidaklah demikian memang akad hutang piutang tersebut adanya pencatatan namun hanya dalam bentuk kwitansi siapa yang meminjam dan jumlah uang yang dipinjam saja hal demikian tentunya belumlah cukup sebagai pegangan antara kedua belah pihak yang berakad dan sepenuhnya memberikan ketenangan bagi yang melakukan perjanjian terutama bagi pihak peminjam.

Imam Syafi'i juga berkata,"Aku cenderung pada pelaksanaan pencatatan dan persaksian, karena ini petunjuk dari Allah sekaligus pedoman bagi penjual dan pembeli. Orang yang tidak melakukan pencatatan dan persaksian berarti telah meninggalkan kebijaksanaan dan aturan di mana

¹⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an: Volume 1)*, Cet.I, Ciputat: Lentera Hati, 2000, hal. 563-564.

aku cenderung tidak mengabaikannya, meskipun aku tidak mengklaim bahwa perbuatan itu haram baginya.¹⁹⁰

Maksud dari Imam Syafi'i bahwa beliau cenderung kepada pelaksanaan pencatatan dan juga saksi dalam muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Baginya orang yang tidak melakukan pencatatan dan persaksian berarti telah meninggalkan kebijaksanaan dan aturan yang seharusnya tidak diabaikan meskipun beliau tidak mengklaim bahwa perbuatan itu haram. Karena tidak adanya pencatatan dalam bermu'āmalah tidak secara tunai pada masyarakat Talohen Hulu hanya berarti telah meninggalkan kebijakan dan aturan dalam syariat Islam menurut pandangan imam Syafi'i.

Kesimpulannya bahwa bentuk akad hutang piutang pada masyarakat Talohen Hulu tidak adanya pencatatan atau penulisan yang lengkap dan jelas. Walaupun ada hanya dalam bentuk kwitansi nama pengutang, nominal dan barang gadai namun ada pula yang hanya nama pengutang dan nominal uang yang dihutang atau pinjam. Hal ini sudah tidak sesuai dengan konsep hutang piutang dan tidak menerapkan asas-asas dalam hukum perikatan.

d. menggunakan jaminan dan ada yang tidak menggunakan jaminan.

Pengertian gadai menurut ulama Syafi'iyah adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika

¹⁹⁰ Syaikh Ahmad, *Tafsir Imam Syafi'i*, Cet. I, Jakarta: Almahera, 2008, hal. 504.

berhalangan dalam membayar utang.¹⁹¹ Jadi gadai merupakan barang yang dapat dijadikan jaminan atas uang yang telah dipinjam.

Jaminan atau gadai tidak ada dimuat dalam akad perjanjian hutang piutang. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu LH yang mengatakan bahwa:

“Masalah jaminan kadada jua. Oleh percaya ja kan kadada ai ah nang lain han parcaya ja tadikan.”¹⁹²(Kemarin itu ditulis menggunakan kwitansi siapa nama berutang, berapa nominal hutang dan materai. Masalah jaminan tidak ada karena percaya saja tidak ada yang lain percaya saja tadi itu).

Hal demikian didukung oleh subjek lain Ibu RA dan Bapak DR kalau perjanjian utang piutang tersebut tidak memuat jaminan dan percaya saja.

Berdasarkan keterangan subjek RA dan DR bahwa hutang piutang yang terjadi tidak memuat sistem gadai namun ada juga yang memuatnya dalam akad hutang piutang berdasarkan keterangan Ibu KR. Pada dasarnya memilih sistem gadai atau tidak menjadi masalah dalam akad hutang piutang.

Tidak adanya sistem gadai berdasarkan keterangan subjek RA dan DR karena percaya dengan orang yang berutang. Ini sesuai dengan konsep hukum perikatan yaitu asas hukum perikatan seperti: asas *Amanah* yaitu asas kepercayaan. Selama keduanya saling mempercayai dan tidak khianat maka hal tersebut tidak mengapa. Kepercayaan yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu pada akad hutang piutang sudah tidak asing lagi

¹⁹¹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalat*,...hal. 160.

¹⁹² Hasil wawancara dengan Ibu LH , Pada tanggal 16 Mei 2016.

karena bagi mereka yang meminjam adalah warga sekitar dan tidak perlu takut.

Ada pula yang menerapkan sistem gadai dalam perjanjian hutang piutang sebagai formalitas berdasarkan keterangan dari Ibu KR yang menjelaskan bahwa:

“Bacatatat ba kwitansi nama nang bahutang, barapa hutang urang. Batulis gadai karet di kwitansinya jua tapi dari pada haja pang. Amun urang bamasalah nang kada kawa bayar kada suah pang aku manggugatnya tulisan gadai tu. Oleh parcaya ja ah sasama urang kampung jua.”¹⁹³ (Ditulis menggunakan kwitansi nama yang berutang, berapa nominal hutang. Ditulis gadai karet juga namun hanya sekedarnya saja. Jika orang bermasalah yang tidak bayar tidak pernah saya gugat penulisan barang gadai, karena percaya saja sesama orang kampung juga).

Berdasarkan keterangan dari Ibu KR dengan memuat adanya jaminan dalam akad hutang piutang ini sesuai dengan konsep hutang piutang yaitu tata krama berutang yang memilih sistem gadai yaitu pinjam meminjam dengan sistem gadai cenderung lebih aman. Maksudnya, jika si penerima pinjaman tidak mampu membayar, barang yang digadaikan bisa menjadi gantinya atau dilelang sehingga bisa digunakan untuk membayar pinjamannya.

Menurut para ulama sepakat bahwa gadai dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.¹⁹⁴ Akad yang dipraktikan pada masyarakat Talohen Hulu ada yang memilih sistem gadai namun ada pula yang tidak kedua hal tersebut tidak menjadi masalah karena gadai memang tidak

¹⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu KR , Pada tanggal 18 Mei 2016.

¹⁹⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*,... hal. 266.

diwajibkan dalam akad. Hanya saja mengarah pada potensi kepercayaan dan rasa aman atau obat penenang hati terhadap hutang yang diberikan.

- e. Akad tersebut tidak ada menetapkan batas waktu tempo pembayaran.

Waktu tempo merupakan waktu dimana batas peminjaman uang pokok harus di kembalikan berdasarkan tanggal yang telah disepakati. Penetapan waktu tempo tujuannya adalah agar pengembalian pinjaman dapat terlaksana tepat waktu. Namun apa yang terjadi di pada masyarakat Talohen Hulu tidak menggunakan batas waktu tempo karena percaya saja orang yang meminjam warga dekat yang dikenal. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu LH yang berusia 62 tahun dan berprofesi sebagai petani menjelaskan bahwa:

“kadada bajanji waktu han amun anu urang bayar sabulan kan catat kami tiap bulan tu pang bayar kaya itu ai ah kadada sagala bajanji sa'apa waktunya tasarah haja kan asal sabulannya tadi bayar.”¹⁹⁵(Tidak ada berjanji waktu kalau orang bayar satu bulan ditulis kami setiap bulan itu seperti itu tidak ada perjanjian kapan waktunya bebas saja namun perbulan yang di tetapkan harus di bayar).

Hal demikian juga dinyatakan oleh subjek yang lain seperti Ibu RM, RA, KR dan bapak DR yang menyatakan bahwa tidak ada penggunaan batas waktu tempo dalam akad perjanjian utang piutang karena percaya saja alasannya karena yang meminjam warga sekitar kampung bukan orang jauh. Namun pembayaran perminggu maupun perbulan saja yang terpenting.

Berdasarkan keterangan dari keempat subjek tersebut bahwa tidak adanya penetapan waktu tempo pengembalian hutang. Hutang akan berakhir

¹⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu LH, Pada tanggal 16 mei 2016.

jika si penerima pinjaman mengembalikan pinjaman atau hutangnya. Hal ini sesuai dengan pendapat para Fuqaha Malikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat hutang-piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba *muqtaridh* wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak *muqtaridh* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

Jumhur Ulama juga ada yang tidak memperbolehkan penggunaan batas waktu tempo sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasiah*.¹⁹⁶ Memang pada masyarakat Talohen Hulu dalam praktik hutang piutangnya tidak ada penetapan batas waktu tempo sesuai dengan pendapat para ulama karena akan ditakutkan menjadi riba. Tidak ada penetapan waktu tempo malah membuat kondisi berbanding terbalik dengan yang ditakutkan terlihat dari adanya penetapan angsuran perminggu maupun perbulan berupa persentase maupun keuntungan yang diperjanjikan diawal baik itu yang diminta oleh pihak kreditur maupun dari debitur. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak DR, Ibu LH, RA dan RM berdasarkan dipemaparan data yang

¹⁹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,...hal.375.

mengatakan bahwa tidak ada penetapan waktu namun adanya pembayaran perminggu atau bulanan yang telah diperjanjikan diawal. Hal ini sudah tidak sesuai dengan syariat Islam karena berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa ini dalam konsep hutang piutang termasuk termasuk dalam kelebihan yang diperjanjikan adalah tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang.

Ini juga tidak sesuai dengan teori hukum perikatan berdasarkan deskripsi sebelumnya salah satunya asas' *Adalah* (keadilan) dimana para pihak yang melakukan kontrak *syariah*, yang melakukan kontrak *syariah*, tidak boleh ada yang terzalimi. Penetapan persentase oleh masyarakat Talohen Hulu khususnya pihak kreditur hanya menguntungkan secara individual tanpa memperhatikan kondisi kesulitan orang lain.

Meskipun demikian rukun dan syarat hutang piutang yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota masih belum tercover secara baik namun akad ini berbentuk akad *qardhul hasan* yaitu pinjaman yang baik senada dengan konsep hutang piutang, hal ini terlihat dari toleransi yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu KR selaku kreditur dalam pemaparan data kesimpulannya bahwa hutang menggunakan jaminan dengan menuliskan gadai karet namun ketika pihak peminjam mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang, barang gadaian tersebut tidak pernah disita maupun diambil oleh pihak kreditur.¹⁹⁷ Begitupula dengan pihak

¹⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu KR, Pada tanggal 18 Mei 2016.

kreditur yang lain yang tidak menggunakan jaminan dalam akad hutang piutang ketika terjadi *wanprestasi* dari pihak peminjam mereka hanya memarahi dan menagih uangnya agar dikembalikan tidak sampai mengambil ataupun menyita barang dari pihak peminjam.

Kesimpulannya bahwa rukun dan syarat dari hutang piutang pada masyarakat Talohen Hulu ada yang sesuai dengan syariat Islam namun ada juga yang belum sesuai. Akad ini adalah berbentuk akad *qardhul hasan* karena masih ada sikap toleransi yang baik dari pihak pemberi pinjaman yaitu ketika pihak peminjamnya mengalami kesulitan dalam pembayaran pihak kreditur tersebut tidak pernah menyita maupun mengambil barang-barang dari pihak debitur hanya menagih saja agar uangnya dikembalikan.

C. Penyelesaian sengketa hutang piutang ketika terjadi wanprestasi

1. Jumlah Sengketa Hutang Piutang di Masyarakat Talohen Hulu

Sengketa dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pertengkaran atau pertentangan.¹⁹⁸ Sementara *wanprestasi* artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.¹⁹⁹

Jumlah sengketa yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu berdasarkan observasi peneliti dan wawancara dengan kreditur yang masih aktif DR, KR dan LH dan yang sudah tidak aktif keseluruhan berjumlah sebanyak 14 orang akibat dari *wanprestasi* atau tidak terpenuhinya janji dari

¹⁹⁸ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo Lestari, 1997, hal. 557.

¹⁹⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam)*,...hal. 103.

pihak debitur (pihak yang berutang), namun yang masalahnya berkepanjangan dan kesulitan dalam penyelesaian permasalahan ada 2 orang saja di kreditur yang masih aktif. Sengketa terjadi diakibatkan salah satu pihak *wanprestasi* atau tidak terpenuhinya janji karena adanya alasan-alasan tertentu. Berdasarkan keterangan dari subjek Ibu SR mengatakan:

“Suah 6 bulan aku kada kawa bayar gara-gara usaha ku waktu itu bangkrut oleh harga gatah murah balalu kadada lagi pamasukan kada kawa ku ma ada akannya amun kadada.”²⁰⁰(Pernah 6 bulan tidak dapat membayar karena usaha saya waktu itu bangkrut karena harga karet murah kemudian tidak ada lagi pemasukan tidak bisa mengadakannya kalau tidak ada).

Pernyataan dari Ibu SR, dapat dipahami bahwa beliau pernah tidak dapat membayar angsuran keuntungan utang yang diperjanjikan selama 6 bulan dikarenakan usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan dan menyebabkan tidak adanya pemasukan tidak dapat memaksakan karena memang benar-benar tidak ada. Hal demikian turut dikatakan oleh debitur RA bahwa tidak dapat membayar hutang karena usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan keterangan dari kedua subjek Ibu SR dan RA tersebut bahwa ketika terjadinya *wanprestasi* yaitu tidak terbayarnya angsuran keuntungan perbulan yang telah diperjanjikan diawal akad mengakibatkan terjadinya sengketa antara pihak kreditur (pihak yang memberikan hutang atau pinjaman) dengan pihak debitur (Pihak yang berutang).

Kesimpulannya bahwa jumlah sengketa yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu adalah sebanyak 14 orang, tetapi hanya 2 orang yang menjadi

²⁰⁰Hasil wawancara dengan Ibu SR, Pada tanggal 20 Mei 2016

subjek penelitian karena sengketa yang berkepanjangan yang berawal dari terjadinya *wanprestasi* atau tidak terpenuhinya janji dari pihak debitur (pihak yang berutang) karena alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan sengketa bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang.

2. Potensi Konflik Dalam Transaksi Hutang Piutang di Masyarakat

Konflik dalam kamus pintar bahasa Indonesia diartikan sebagai pertentangan atau percekocokan.²⁰¹ Jadi konflik adalah suatu pertentangan maupun perselisihan antara pihak yang berakad atau yang melakukan perjanjian.

Terjadinya *Wanprestasi* atau tidak terpenuhinya janji dari pihak debitur (pihak peminjam) membuat pihak kreditur (pemberi pinjaman) marah yang menyebabkan terjadinya konflik. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu SR dalam pemaparan data kesimpulannya bahwa ketika tidak dapat membayar hutang membuat pihak kreditur marah-marah mengatakan beliau macam-macam dan pihak kreditur menagih datang kerumah setiap bulannya tidak peduli pihak debitur bangkrut atau tidak yang terpenting baginya adalah uangnya harus kembali beserta tunggakan perbulannya.²⁰² Hal serupa juga dikatakan oleh debitur RA bahwa ketika tidak dapat membayar hutang pihak kreditur marah-marah dengan ucapan yang kasar saat menagih hutang mendatangi kerumah perbulannya.²⁰³ Ibu KR selaku kreditur juga mengatakan hal yang serupa bahwa jika ada orang yang berutang tidak

²⁰¹ Hamid, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*,...hal. 250.

²⁰² Hasil wawancara dengan Ibu SR, Pada tanggal 20 Mei 2016.

²⁰³ Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 19 Mei 2016.

membayar hutangnya beliau menagih dan memarahinya agar uangnya dikembalikan.²⁰⁴

Berdasarkan keterangan dari kedua subjek Ibu SR dan RA tersebut bahwa ketika terjadinya *wanprestasi* atau tidak terpenuhinya janji dari pihak debitur (orang yang berutang) yaitu Ibu SR dan RA membuat emosi dari pihak kreditur (pihak pemberi hutang) meningkat dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, mencaci maki dan menghina pihak yang meminjam uang kepadanya. Pihak pemberi pinjaman bersikeras mengatakan bahwa uangnya harus dikembalikan tidak memperdulikan keadaan dari pihak debiturnya. Hal tersebut juga membuat kedua belah pihak tidak bertegur sapa antara kedua belah pihak ketika bertemu hal tersebut disampaikan oleh Ibu SR.

Kesimpulannya bahwa ketika terjadi *wanprestasi* dari pihak debitur (pihak yang berutang) karena usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan menyebabkan emosi pihak kreditur (pemberi hutang atau pinjaman) meningkat dengan mencaci maki, menghina dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada si pihak peminjam bersikeras agar uangnya dikembalikan.

3. Pola Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Masyarakat Talohen Hulu Dalam konteks Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sikap kreditur yang marah-marah demikian pada deskripsi sebelumnya membuat hubungan warga menjadi kurang baik, namun seiring berjalannya waktu karena si pihak debitur RA tidak dapat membayar hutangnya lagi selama setahun lebih dan Ibu SR selama 6 bulan, akhirnya masalah tersebut diselesaikan baik-baik atau musyawarah antara kedua belah pihak dengan

²⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu KR, Pada tanggal 18 Mei 2016.

berprinsip kekeluargaan. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ibu RA yang berusia 31 tahun dan berprofesi sebagai pedagang sebagai berikut:

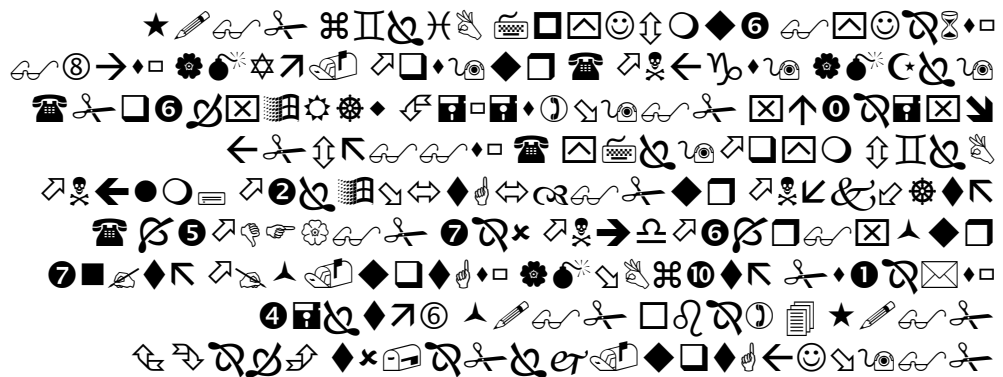
“Oleh urang batagih tarus lah awak saurang kada kawa lagi malabuh gatah han bunga batambah hutang batambah kan indungnya kada kawa mambayar balalu kami bapander lawan sidin biar kada habut lagi kabun gatah kami disanda akan lawan urang nang bahutang tadi.”²⁰⁵ (Karena orang menagih terus saya tidak dapat lagi membeli karet bunga bertambah hutang bertambah pinjaman pokoknya tidak dapat membayar kemudian kami berbicara dengan pihak kreditur agar tidak ribut lagi kebun karet digadaikan dengan orang tempat berutang tadi).

Penyelesaian hutang piutang dengan bermusyawarah berdasarkan prinsip kekeluargaan juga disampaikan oleh debitur Ibu SR agar tidak terjadi keributan diantara kedua belah pihak dengan cara memindahkan uang pokok yang beliau pinjam ke pondasi sarang walet jika ada hasil nanti akan dibagikan.

Berdasarkan keterangan dari kedua subjek Ibu SR dan RA bahwa hutang piutang ketika terjadi sengketa yaitu diselesaikan dengan prinsip kekeluargaan dengan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan solusi atau keputusan akhir atas kesadaran dari pihak yang berutang.

Pola penyelesaian sengketa dengan jalan bermusyawarah berdasarkan prinsip kekeluargaan ini sesuai dengan konsep alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu musyawarah merupakan penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Anjuran untuk bermusyawarah berdasarkan firman Allah SWT :

²⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 19 Mei 2016.



Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S Ali-Imran (3):159).”

Tafsir Al-Mishbah maksud dari ayat tersebut adalah berupa tuntunan yang diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud. Sebenarnya, cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahan lembut Nabi SAW. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan untuk berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka, walau beliau sendiri kurang berkenan; beliau tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain.²⁰⁶

Kata musyawarah terambil dari akar kata *syawara* yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian

²⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah (Volume 2)*,....hal. 309.

berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah, pada dasarnya, hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar diatas. Madu bukan saja manis, tetapi ia adalah obat bagi penyakit, sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Itulah yang dicari di manapun dan siapapun yang menemukannya. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerja samanya mengagumkan, makanannya sari kembang, hasilnya madu, di mana pun ia hinggap tidak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, sengatanpun obat. Itulah permusyawaratan dan demikian itu sifat yang melakukannya. Tidak heran jika Nabi SAW. Menyamakan seseorang mukmin dengan lebah.²⁰⁷

Secara eksplisit bahwa ayat tersebut memang pada dasarnya ditunjukan untuk orang-orang yang bersengketa dalam perjanjian atau perikatan yang telah mereka buat, hendaklah mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum ke ranah hukum yang lebih tinggi karena musyawarah memang dianjurkan dalam Islam dan merupakan sifat yang terpuji baik dalam kehidupan individu, masyarakat dan sebagainya. Apalagi masyarakat yang berada dilingkungan pedesaan maupun perkampungan yang harusnya mempunyai sikap *solidaritas* terhadap sesama. Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah telah dipraktikan pada masyarakat Talohen Hulu ketika terjadi permasalahan dicari solusi bersama dengan prinsip kekeluargaan agar

²⁰⁷ *Ibid.*

tidak terjadi keributan yang berkelanjutan dan tidak berlanjut sengketa pada pelaporan keranah hukum yang lebih tinggi. Cara penyelesaian sengketa dengan musyawarah tersebut untuk kasus Ibu RA dapat ditemukan solusi atas dasar kesadaran diri dari pihak peminjam berdasarkan pemaparan data yang telah peneliti paparkan bahwa kebun karet tersebut digadaikan kepada pihak pemberi pinjaman hutang sebagai pengganti hutang yang tidak dapat terbayarkan.²⁰⁸

Kasus yang terjadi pada Ibu SR berdasarkan dipemaparan data bahwa hutang tersebut dipindahkan ke usaha yang lain yaitu pondasi sarang walet nanti apabila membuahakan hasil akan dibagikan keuntungannya awalnya pihak kreditur menyetujui hal demikian.²⁰⁹ Berdasarkan keterangan Ibu SR tersebut bahwa sengketa juga diselesaikan dengan jalan musyawarah berprinsip kekeluargaan yaitu dibicarakan baik-baik. Ini sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu musyawarah. Namun setelah berlalunya waktu berdasarkan pernyataan Ibu SR kesimpulannya bahwa ada pengaruh dari orang lain bahwa Ibu SR sudah memanen hasil usaha sarang walet namun kenyataannya belum. Ini menyebabkan pihak kreditur marah-marah kembali karena terpengaruh dan merasa dibohongi oleh Ibu SR. Pihak kreditur meminta kembali agar uangnya cepat dikembalikan pada bulan agustus terakhir.²¹⁰

²⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 9 Mei 2016.

²⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu SR, Pada tanggal 20 Mei 2016.

²¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu SR, Pada tanggal 20 Mei 2016.

Berdasarkan keterangan dari Ibu SR tersebut bahwa awalnya perselisihan sudah selesai karena sudah berdiskusi sebelumnya namun setelahnya ada pengaruh dari pihak lain kalau usaha yang dijalankan sudah membuahkan hasil nyatanya belum sehingga menyebabkan pihak kreditur (pihak yang meminjam) emosinya tambah meningkat dan marah-marah kembali dengan perkataan yang kasar, pada saat hal itu terjadi tidak ada orang lain ataupun pihak ketiga yang membantu meredam perselisihan demikian hal ini berdasarkan keterangan dari Ibu SR pada pemaparan data sebelumnya kesimpulannya bahwa tidak adanya peran pihak ketiga yang ikut campur dalam masalah hutang piutang. Hanya saja ada rencana jika permasalahan sudah tidak dapat diselesaikan kedua belah pihak yang berakad.²¹¹ Hal demikian juga turut dikatakan oleh Ibu RA bahwa tidak adanya pihak ketiga dalam sengketa yang terjadi. Berdasarkan informan Ketua RT Bapak SG juga mengatakan bahwa:

“Yang ngarannya hutang disini tu lah babunga kaya itu pang, amun ada yang bamasalah kadada pang nang malapor. Habut ai buhannya tapi ngintu jua lain urusanku kada mau umpat campur ngalih kaina oleh ngarannya hutang tu. Kecuali orang malapor atau main fisik kah bisa ai.”²¹² (Yang namanya hutang disini berbunga kaya gitu, Kalau ada yang bermasalah tidak ada yang melapor. Ribut mereka tapi itu bukan urusan saya tidak mau ikut campur sulit nanti karena hutang itu. Kecuali orang yang melapor atau main fisik bisa saya bergerak.

Berdasarkan keterangan dari kedua subjek Ibu SR dan RA bahwa tidak ada peran pihak ketiga dalam sengketa yang terjadi saat itu juga berdasarkan informan ketua RT Bapak SG bahwa beliau tidak mau sembarangan ikut campur dalam permasalahan hutang piutang kecuali pihak yang berakad

²¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu SR, Pada tanggal 20 Mei 2016.

²¹² Hasil wawancara dengan ketua RT Bapak SG, Pada tanggal 09 oktober 2016.

melapor. Namun seiring berlalunya waktu bertepatan pada bulan agustus sesuai keinginan dari pihak kreditur (pemberi pinjaman) bahwa uangnya harus dikembalikan.. Akhirnya Ibu SR dan pihak pemberi pinjaman melakukan pertemuan untuk mendiskusikan masalah sisa hutang yang belum terbayarkan.

Berdasarkan keterangan dari Ibu SR bahwa:

“Pas itu kalo batamu ai kami nah ujar ku sainsi ja cil kawa bayar sisa hutang indungnya ja Rp 17.000.000 amun salabihnya janji nang perbulan tadi tunggakannya kada kawa lagi mambayar, ulih usaha ku sudah bangkrut jua ngini gin ngalih bacari duitnya. Hakun ai sidin, oleh nang lakinya bapender “sudah ai tu kada kawa di paksa akan amun bujur kadada.” Ada ai sidin manawari lagi amun handak bahutang jar. Kada jar ku kena ja.”²¹³(Ketika itu bertemu kami kata saya”sejini saja bisa membayar sisa hutang pokoknya Rp 17.000.000 kalau selebihnya janji yang perbulan tadi tunggakan tidak dapat lagi membayar, karena usaha saya sudah bangkrut yang ini saja sulit mencari uangnya. Mau saja sidin, karena yang suami berbicara”Sudah saja tidak bisa dipaksakan kalau uangnya memang tidak ada.”Ada lagi beliau menawarkan lagi jika ingin berutang lagi. Tidak kata saya nanti saja).

Berdasarkan pernyataan dari Ibu SR bahwa sengketa hutang beliau dapat terselesaikan setelah bicara baik-baik kepada kreditur (pemberi pinjaman) bahwa beliau tidak dapat membayar angsuran keuntungan yang diperjanjikan dan hanya membayar sisa hutang pokoknya saja dan pihak kreditur (pemberi pinjaman) menyetujui hal demikian karena memang tidak bisa dipaksakan lagi kalau memang sudah tidak ada pernyataan dari pihak krediturnya.

Cara penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah dengan prinsip kekeluargaan yang telah terjadi pada masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota dikenal dengan istilah unik yaitu *Adat Badamai* yang terkenal

²¹³ Hasil wawancara dengan Ibu KR, Pada tanggal, Pada tanggal 14 september 2016.

dalam istilah orang banjar. Sesuai dengan konsep *Adat Badamai* bahwa ini merupakan alternatif dalam penyelesaian sengketa jalur *non litigasi* (di luar pengadilan) atau merupakan hukum yang tidak tertulis. Pada masyarakat Talohen Hulu karena warganya mayoritas pendatang yaitu orang banjar jadi dalam penyelesaian sengketa hutang piutang itu mempunyai cara internal atau mempunyai cara tersendiri yaitu musyawarah kedua belah pihak dan solusi atas kesadaran tersendiri dari pihak peminjam dengan cara menyerahkan harta atau menggadaikan barangnya sebagai pengganti hutang yang tidak terbayarkan tanpa diminta maupun disita oleh pihak pemberi pinjaman seperti yang telah di deskripsikan sebelumnya karena hutang adalah perkara yang harus dipertanggung jawabkan kemudian setelah itu diiringi dengan saling berjabat tangan saling bermaapan satu sama lain antara pihak yang berakad.

Adat badamai pada masyarakat Talohen Hulu terkenal dengan istilah kata “*babaikan, bapatut, bamaapan, baakuran dan baampihan.*”Ini sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarakat Talohen Hulu jika terjadi sengketa khususnya pada akad hutang piutang hanya antara kedua belah pihak yang berakad saja tidak memuat adanya pihak ketiga sebagai *mediator* karena masih mampu diselesaikan secara baik-baik antara kedua belah pihak.

Menurut Peneliti : Penyelesaian sengketa dengan cara *adat berdamai* merupakan solusi terbaik dan budaya warisan luhur yang patut untuk dicontoh dan menjadi lambang dasar orang banjar karena dengan cara ini tetap memperkuat tali persaudaraan yang baik antara warga dengan hasil yang *balance* tidak *win-lose solution* yang pada akhirnya ada kemungkinan

menyebabkan hubungan antara pihak yang telah bersengketa kurang baik meskipun telah ditemukan solusinya.

Kesimpulannya bahwa hutang piutang yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu ketika terjadi *wanprestasi* atau tidak terpenuhinya janji dari pihak debitur (pihak peminjam) diselesaikan dengan cara tersendiri internal yaitu dengan bermusyawarah berprinsip kekeluargaan dengan istilah unik orang banjar yaitu *adat badamai* terkenal dengan sebutan “*babaikan, bapatut, bamaapan, baakuran dan baampihan.*”

4. Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Masyarakat Talohen Hulu dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa ketika terjadinya *wanprestasi* dari pihak debitur (pihak yang berutang) membuat pihak kreditur (pihak pemberi pinjaman) menjadi emosi yang mengakibatkan sengketa antara pihak yang berserikat. Pihak kreditur (pemberi hutang atau pinjaman) seperti yang telah disinggung sebelumnya berdasarkan keterangan Ibu SR dalam pemaparan data kesimpulannya bahwa pihak kreditur marah-marah, menghina dan mencaci maki Ibu SR.²¹⁴ Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu RA bahwa pihak kreditur (pihak pemberi pinjaman) marah-marah dengan perkataan kasar ketika tidak dapat membayar angsuran keuntungan perbulan.²¹⁵

Perlakuan pihak kreditur (pemberi hutang atau pinjaman) yang demikian berdasarkan keterangan Ibu SR dan RA tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan teori perlindungan konsumen karena berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5 tentang Hak-

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 21 Mei 2016.

hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Salah satu dalam hak nasabah tersebut adalah kenyamanan artinya memberikan rasa nyaman kepada konsumen dalam pemanfaatan uang yang dipinjam namun jika seperti sengketa yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu malah sebaliknya konsumen atau nasabah malah merasa tidak tenang dan menjadi beban bagi mereka karena hutang tersebut, apalagi dengan cara menagih pihak kreditur (pihak pemberi hutang atau pinjaman) dengan cara yang kurang ramah.

Tidak sebanding juga dengan hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya. Mengutip keterangan dari Ibu SR bahwa pihak kreditur tidak peduli kondisi bangkrut usaha yang dijalankan oleh Ibu SR namun keluhan Ibu SR tidak di dengarkan atau diabaikan begitu saja. Selain hal tersebut juga tidak sesuai dengan hak konsumen lainnya yaitu hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif bukan ketika terjadi *waprestasi* seperti yang terjadi pada debitur (pihak yang menerima hutang atau pinjaman) itu dihina dan dicaci maki dengan mengatakan hal yang tidak seharusnya untuk dikatakan jika demikian dilakukan maka pihak kreditur (pemberi pinjaman) telah berperilaku tidak baik karena tidak memperlakukan nasabah atau konsumennya secara tidak benar.

Berbicara tentang sengketa hutang piutang yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota jika dikaitkan dengan UUPK ini memang jika melihat dari satu sisi hak konsumen masih belum terjalankan dengan baik namun dari permasalahan yang terjadi demikian dari

pihak kreditur hanya marah-marah saja tidak pernah berbuat tindakan diskriminatif bahkan menarik ataupun menyita barang-barang dari pihak debitur atau pihak peminjam seperti yang telah disinggung sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa si pihak kreditur masih mempunyai sikap yang baik dan toleran terhadap konsumennya yang kesulitan dalam membayar hutang. Seiring berjalannya waktu pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan secara baik-baik agar tidak terjadi keributan kembali berdasarkan keterangan Ibu RA di dalam pemaparan data kesimpulannya bahwa Ibu RA berbicara baik-baik dengan pihak kreditur bahwa ia tidak dapat membayar hutangnya maka dari itu beliau menyerahkan kebun karetinya sebagai pengganti hutang.²¹⁶

Pada dasarnya berdasarkan keterangan tersebut sengketa dapat terselesaikan secara baik karena kesadaran individu peminjam kalau ia mempunyai hutang yang memang seharusnya untuk dibayar dengan menyerahkan kebun karetinya. Ini sejalan dengan hak konsumen untuk mendapatkan *advokasi*²¹⁷, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kesimpulan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait hal hutang piutang yang terjadi pada masyarakat Talohen Hulu pada dasarnya hak-hak konsumen masih belum terlaksana dengan baik secara keseluruhan hanya ada bagian-bagian tertentu saja yang sudah terlaksana.

²¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu RA, Pada tanggal 19 Mei 2016.

²¹⁷ Suatu bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi, yaitu dukungan aktif. Dina Anggraeni, *Pengertian Advokasi*, www.teksdrama.com.2014/02/pengertian-advokasi.html?M=1, diakses pada tanggal 28 juni 2016.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Terjadinya Praktik Utang Piutang pada Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur adalah karena Ekonomi masyarakat yang rendah kebanyakan profesi sebagai petani karet yang penghasilannya berfluktuasi tergantung faktor internal dan eksternal menyebabkan berutang dengan motif untuk kebutuhan yang mendadak (keperluan fasilitas transportasi anak dan modal usaha). Ini tidak melanggar syariat dan diperbolehkan dalam konsep hutang piutang.
- b. Bentuk Akad Utang Piutang adalah yaitu transaksi dilakukan dirumah kreditur dengan mematuhi aturan dan syarat dari pihak kreditur. Adapun rukun dan syarat akad hutang piutang tersebut yaitu adanya Lafaz utang piutang, adanya penetapan persentasi maupun keuntungan yang diperjanjikan diawal akad, akad ditulis dalam bentuk kwitansi namun hanya nama dan jumlah nominal yang berutang, ada yang menggunakan jaminan namun ada juga yang tidak dan tidak menggunakan waktu tempo pembayaran pengembalian pinjaman. Akad ini merupakan akad Qardhul Hasan yaitu pinjaman yang lunak yang mana ketika pihak debitur kesulitan dalam pembayaran hutang masih ada toleransi yang

mana barang milik pihak peminjam tidak pernah disita maupun ditarik oleh pihak kreditur.

- c. Penyelesaian sengketa utang piutang jumlah sengketa keseluruhan ada 14 orang namun hanya 2 yang diambil karena sengketa yang berkepanjangan, Konflik menyebabkan hubungan warga kurang baik karena perkataan kasar dari pihak kreditur, namun pada akhirnya sengketa dapat terselesaikan dengan baik dengan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak yang berakad berdasarkan prinsip kekeluargaan tanpa harus memuat pihak ketiga penyelesaian sengketa tersebut dikenal dengan istilah unik yaitu *Adat Badamai* yang terlahir dari peristilahan masyarakat Banjar. Adapun penyelesaian sengketa dalam perspektif UUPK pada masyarakat Talohen Hulu bahwa terkait dari hak-hak konsumen masih belum terlaksana secara baik hanya bagian-bagian tertentu saja yang dapat dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan tentang Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Pada Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur, Penulis memberikan saran tanpa bermaksud untuk menggurui siapapun :

1. Hendaknya memberi pertolongan berupa pinjaman semata-mata karena Ridhonya Allah SWT dan Sebelum melakukan perjanjian utang piutang hendaknya hanya dalam keadaan mendesak saja, jika ada jalan lain sebaiknya tidak bertutang.

2. Jika memang harus berutang hendaknya cerdas dalam memilih tempat berutang bukan tergiur dengan latar persyaratan yang cepat dan praktis.
3. Sebelum melakukan perjanjian hutang piutang sebaiknya adanya perjanjian tertulis yang lengkap dan jelas gunanya untukantisipasi kerugian dan perselisihan antar pihak yang berakad.
4. Jika sengketa terjadi dalam akad hendaknya diselesaikan secara baik-baik dan beretika.
5. Perlu adanya Badan Penyelesaian Sengketa dalam tiap kabupaten maupun kecamatan.
6. Adanya Dinas Perdagangan difungsikan sebagai *mediator* dalam hal sengketa hutang piutang atas *pailit* nya suatu usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Telaah Buku

- Adi Nugroho, Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. II, Tangerang: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2011.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Cet.II, Jakarta: Pt RajaGrafindo persada, 2010.
- Arijanto, Agus, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, Cet. I, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011.
- Ali Ahmad Al-Jarjawi, Syekh, *Indahnya Syariat Islam*, Cet.III, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Al-Quthubi, Syaikh Imam *Tafsir Al-Qurthubi*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Mas'adi, Ghufon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2010.
- B.Miles, Matthew, dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif terjemah Tjep Rohendi Rohidi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Buchari dan Juni Priansa, Donni, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet. I, Bandung: Alfabeta Cv, 2009.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo Lestari, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Pt Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Djamili, Abdul, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: MandarMaju, 2002.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- firmanzah Hasan, Abdillah, *Ensiklopedia Akhlak Mulia*, Cet. I, Solo: Tinta Media, 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamid, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Dua, T.ttb.
- Hendra Wiranata, Frans, *Hukum Penyelesaian Sengkata*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVIII, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2004.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jilid VII)* Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhwan Hariri, Wawan, *Hukum Perikatan*, Cet I, Bandung: Pustaka Setia 2011.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. XXIX, Bandung: Pt Sinar Baru Algesindo, 2006.
- Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Cet. I, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. V, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sam, Ichwan, dkk., *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Cet. I, Pt tinta abadi gemilang, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XVIII, Bandung: Alfabeta, 2013.

Shihab, M. Quraish Tafsir Al-Mishbah (*Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*: Volume 1), Cet.I, Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung; Cv Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan*, Cet. I, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

Tim Penyusun, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya Tahun 2007*, Cet. I, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

Tim Penyusun Kamus, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

W. Alhafidz, Ahsin, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.

Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Cet.VIII, Jakarta: Gema Insani, 2013.

B. Penelusuran Internet

Abufawaz, *Majalah Pengusaha Muslim*,
<http://www.alquran-sunnah.com/artikel/kategori/muamalah/787-adab-hutang-piutang.html>, diakses pada tanggal 11 oktober 2015.

Ahmadi Hasan, *Adat Badamai (Penyelesaian Sengketa) Pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan*, <http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/view/414/319>, diakses pada tanggal 5 november 2016.

Briyudistira, *ampah kota*, <https://briyudistira.wordpress.com/2010/10/23/ampah-kota/> diakses pada tanggal 25 juni 2016.

HM Qotrunnada, *Bab II Riba, Rentenir dan Koperasi*, 2014.
<http://digilib.uinsby.ac.id/960/3/Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 11 April 2016.

[Http://www.barito-timur-kab.go.id/hal-Letak-Geografik.html](http://www.barito-timur-kab.go.id/hal-Letak-Geografik.html), diakses pada tanggal 25 juni 2016.

[Http://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf](http://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf), diakses pada tanggal 10 November 2016.

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Ampah_Kota,_Dusun_Tengah,_Barito_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Ampah_Kota,_Dusun_Tengah,_Barito_Timur)
diakses pada tanggal 11 Mei 2016.

Ikhsan Al Hakim, 2013, *penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama purbalingga (studi pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama oleh pengadilan agama purbalingga)*, <http://lib.unnes.ac.id/18443/1/8111409223.pdf>, diakses pada tanggal 12 april 2016.

Irham, Azas *Perikatan akad Islam*, <http://irham-anas.blogspot.co.id/2012/07/azas-perikatan-akad-islam.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2016.

Kalyisah baharuddin jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas hasanuddin, *Penerapan prinsip kekeluargaan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bmt al-amin makassar*, <Http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4777/SKRIPSI%20%20%28KALYISAH%20BAHARUDDIN%20A31108848%29.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 12 april 2016.

Muhammad Isnan, *Harta dalam fiqih muamalah*, <Http://muhisnan.blogspot.co.id/2012/03/harta-dalam-fiqih-muamalah.html>. diakses pada tanggal 02 Maret 2016.

Panjimas, *Biadab rentenir bunuh ibu di bekasi saat tagih hutang rp 300 ribu*, <http://panjimas.com/news/2015/09/02/biadab-rentenir-bunuh-ibu-di-bekasi-saat-tagih-hutang-rp-300-ribu/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2016.

Raden patria Danu negara, fakultas hukum universitas negeri semarang, 2015, *penyelesaian sengketa wanprestasi akad simpanan mudharabah (studi pada bmt ben taqwa)*, <http://lib.unnes.ac.id/21972/1/8111411182-s.pdf>, diakses pada tanggal 12 april 2016.

Reza Karunia, *Mewaspadaai Lintah Darat dan Cara Pelaporan Rentenir – Cermati*, <https://www.cermati.com/artikel/mewaspadaai-lintah-darat-dan-cara-pelaporan-rentenir>, diakses pada tanggal 13 Juni 2016.

Usman, *Lembaga Keuangan*, http://usmankurniawan.blogspot.co.id/2012/11/lembaga-keuangan_6797.html. diakses pada tanggal 11 April 2016.

www.teksdrama.com.2014/02/pengertian-advokasi.html?M=1, diakses pada tanggal 28 juni 2016.

Zahara, *Tinjauan Teoritis Tentang Mekanisme Dan Evaluasi Terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan untuk Usaha Perdagangan*, <http://hukum-islam.net/konsep-dan-dalil-qardhul-hasan-pinjaman-lunak/html>, diakses pada tanggal 10 November 2016.

C. Aplikasi

Lidwa Pustaka-I software, *Kitab 9 imam Bab mencari pinjaman dan melunasi hutang(Memberi pelunasan dengan baik)* No. 2414.